

Misi Pendidikan sangat tergantung pada pendekatan lembaga Pendidikan yang digunakan (di antara lain: Masyarakat secara langsung bertanggung jawab pada kebudayaan dan proses pendidikan yang dimilikinya). Masyarakat memiliki pengaruh sangat besar yang memengaruhi norma dan nilai-nilai di dalam lembaga pendidikan. Dalam mengembangkan pendidikan, kita perlu memperhatikan sebagai lapangan untuk analisisnya, masalah, fase, strategi/teknik/teknologi, konsep atau pendekatan, konsep-konsep, teori-teori, dan sebagainya. Untuk itu, perlu diperhatikan masalah "jati diri" yang merupakan salah satu aspek yang menentukan bagaimana suatu lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat atau *Community Based Education*.

Perubahan lingkungan yang senantiasa menimbulkan masalah adalah salah satu yang paling sering dihadapi masyarakat. Namun ketahanan dan tidak dapat beresuk tidak menjamin orang yang dituntut belajar, maka belajar tidak berhasil. Sering kali masalah pendidikan berkaitan dengan *empowerment*. *Empowerment* merupakan aspek pendidikan menjadi ada, yaitu aksi pendidikan di lembaga yang dapat membantu, dan program yang dapat meningkatkan motivasi, tenaga, profesional di masalah dan permasalahan masyarakat yang dapat mempengaruhi masalah sebagai prioritas.

Maka pendidikan diutamakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dan lembaga-lembaga sosial mereka dalam memalingkan kesempatan untuk pendidikan. Pengembangan sosial yang mendukung program harus merupakan *time that* dibutuhkan sosial yang akurat dan tidak sosial yang tidak akurat untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai ketahanan yang dapat menimbulkan dampak negatif di akar masalah yang mengembangkan kesadaran dan harapan dalam membangun kesadaran.

COMMUNITY  
BASED  
EDUCATION



COMMUNITY BASED EDUCATION

TEORI DAN PRAKTIK DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN MADRASAH MENUJU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Dr. Hanun Asrohan, M.Ag.

# COMMUNITY BASED EDUCATION



TEORI DAN PRAKTIK  
DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN MADRASAH  
MENUJU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

# COMMUNITY BASED EDUCATION

## **Teori dan Praktik**

**dalam Program Pengembangan Madrasah  
Menuju Standar Nasional Pendidikan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a.Penerbitan Ciptaan; b.Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c.Penerjemahan Ciptaan; d.Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentrasformasian Ciptaan; e.Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f.Pertunjukan Ciptaan; g.Pengumuman Ciptaan; h.Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Dr. Hanun Asrohah, M.Ag.**

# COMMUNITY BASED EDUCATION

## **Teori dan Praktik**

**dalam Program Pengembangan Madrasah  
Menuju Standar Nasional Pendidikan**



**Penerbit Lakeisha  
2021**

COMMUNITY BASED EDUCATION  
Teori dan Praktik dalam Program Pengembangan  
Madrasah Menuju Standar Nasional Pendidikan

**Penulis:**

Dr. Hanun Asrohah, M.Ag.

Editor: Andriyanto, S.S., M.Pd.

Layout : Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.

Design Cover : Tim Lakeisha

Cetak I Juli 2021

14,8 cm × 21 cm, 196 Halaman

ISBN: 978-623-6322-45-1

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha  
(**Anggota IKAPI No.181/JTE/2019**)

**Redaksi**

Jl. Jatinom Boyolali, Srikaton, Rt.003, Rw.001,

Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: penerbit\_lakeisha@yahoo.com

Website : [www.penerbitlakeisha.com](http://www.penerbitlakeisha.com)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, berkat karunia Allah SWT. akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Tulisan ini bertujuan mengkaji Pendidikan Berbasis Masyarakat pada program pengembangan madrasah menuju standar nasional yang ada di Jawa Timur. Tulisan ini merupakan pengembangan dari hasil tulisan individu tentang Pengembangan Madrasah Menuju Standar Nasional Pendidikan sebagai Implementasi Program Pengembangan Madrasah di Jawa Timur yang didanai oleh *Asian Development Bank* (ADB). Tulisan ini telah dilakukan pada tahun 2011.

Tulisan ini dilaksanakan di 267 madrasah di Jawa Timur yang telah menjadi sasaran program peningkatan standar nasional pendidikan oleh Kemenag RI, yang berlokasi di 12 kabupaten, yaitu Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Jember, Malang, Bangkalan, Kediri, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, dan Lamongan.

Hasil tulisan ini penulis publikasikan dalam bentuk buku agar bisa dibaca lebih luas terkait Praktik Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah Menuju Standar Nasional Pendidikan. Madrasah yang mayoritas swasta membutuhkan strategi bagaimana bisa mandiri dalam penyelenggaraan pendidikan dan dapat bertahan secara berkelanjutan atau *sustainable*. Temuan penelitian ini semoga bisa menjadi referensi dalam praktik penyelenggaraan pendidikan dengan memaksimalkan dukungan masyarakat.

Buku ini dikemas menjadi enam bab. **Bab pertama** merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang, pertanyaan tulisan dan uraian metode tulisan secara ringkas.

Sengaja metode penelitian tidak diuraikan panjang lebar agar tidak terkesan seperti laporan penelitian dan diberi judul Tantangan madrasah dalam Merespon Persaingan Mutu Pendidikan di Indonesia.

**Bab kedua** membahas Sejarah Madrasah dan Dinamikanya di Indonesia. Secara historis dijelaskan bagaimana kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. Sebagai gambaran dinamika madrasah dipaparkan topik madrasah sebagai arah pendidikan berbasis masyarakat dan politik anggaran dan problem pendanaan di madrasah.

**Bab ketiga** membahas Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu tentang (1) konsep dan perkembangan pendidikan berbasis masyarakat; (2) tujuan pendidikan berbasis masyarakat, (3) pendidikan berbasis masyarakat untuk perubahan performa, (4) optimalisasi partisipasi masyarakat di madrasah; dan (5) pendidikan berbasis masyarakat untuk pemberdayaan.

**Bab keempat** membahas tentang membangun mutu madrasah. Bab ini bertujuan menjelaskan mutu pendidikan yang menjadi bagian penting dalam pengembangan mutu pendidikan di madrasah. Banyak pendapat ahli tentang mutu pendidikan, namun pada bab ini dipaparkan mutu yang dijadikan acuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu (1) mengapa perlu membangun mutu? (2) apa konsep mutu pendidikan; (3) SNP sebagai acuan mutu pendidikan; dan (4) pemenuhan standar acuan mutu oleh satuan pendidikan.

**Bab kelima**, adalah tentang relasi sosial di madrasah sebagai modal sosial dalam membangun pendidikan berbasis masyarakat. Pembahasan bab keempat ini bertujuan memaparkan

perspektif teoritis yang digunakan untuk menganalisis data tentang program pengembangan madrasah menuju standar nasional. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu (1) sistem sosial di madrasah; (2) relasi sosial di madrasah dalam perspektif jaringan sosial; dan (3) modal sosial dalam pendidikan berbasis masyarakat di madrasah. Pada bab ini ditambahkan beberapa referensi yang mutakhir untuk mendapatkan justifikasi teoritis dari referensi yang otoritatif.

**Bab kelima** membahas deskripsi data di berbagai madrasah di Jawa timur yang menjadi sasaran *Madrasah Education Development Program (MEDP)* kerja sama Indonesia dan ADB Loan. Bab ini diberi judul *Best Practices* pengembangan madrasah menuju standar nasional pendidikan agar tidak terkesan sebagai laporan penelitian.

**Bab keenam** membahas hasil diskusi data dan teori sebagai analisis dan diberi judul pendidikan berbasis masyarakat dalam pengembangan madrasah menuju standar nasional. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu (1) relasi antar stakeholder madrasah dalam pendidikan berbasis masyarakat; (2) model pendidikan berbasis masyarakat di madrasah; dan (3) Modal sosial dalam pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. Pada bab ini ditambahkan beberapa referensi yang mutakhir untuk mendapatkan justifikasi teoritis dari referensi yang otoritatif.

**Bab ketujuh** adalah penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan penjelasan saran.

Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, seperti kepala madrasah, guru, pengurus yayasan madrasah, komite madrasah, dan pejabat Kementerian Agama baik di tingkat kabupaten maupun Propinsi serta berbagi pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kabid Mapenda Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur dan *Provincial Coordinating Unit* program pengembangan madrasah di Jawa Timur, Bapak Kasi Mapenda Kementerian Agama di 12 Kaupaten, Bapak dan Ibu Kepala Madrasah dan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan program pengembangan mutu madrasah di 12 Kaupaten di Jawa Timur yang telah membantu peneliti dalam melakukan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait untuk penyelesaian penelitian ini.

Demikian laporan penelitian ini disusun semoga bermanfaat baik bagi pengelola madrasah, penentu kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam mendukung program pengembangan madrasah dan pengembangan kajian ilmiah tentang madrasah.

*Surabaya, 1 Juli 2021*

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Hanun Asrohah, M.Ag.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv

### BAB I

#### **TANTANGAN MADRASAH DALAM MERESPON PERSAINGAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA**

A. Tantangan Mutu bagi Madrasah.....	1
B. Target Pemenuhan Mutu dalam Program Peningkatan Mutu Madrasah.....	10

### BAB II

#### **MADRASAH DI INDONESIA: SEJARAH DAN DINAMIKANYA DI INDONESIA**

A. Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam.....	13
B. Madrasah sebagai Model <i>Archaic</i> Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	19
C. Politik Anggaran dan Problem Pendanaan di Madrasah.....	24

### BAB III

#### **PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DI MADRASAH**

A. Konsep dan Sejarah Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	33
B. Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	40
C. Pendidikan Berbasis Masyarakat untuk Perubahan Performa.....	41
D. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat di Madrasah.....	43
E. Pendidikan Berbasis Masyarakat untuk Pemberdayaan.....	46

## **BAB IV**

### **MEMBANGUN MUTU MADRASAH**

A. Mengapa perlu Membangun Mutu?.....	53
B. Apa Konsep Mutu Pendidikan?.....	58
C. SNP sebagai Acuan Mutu Pendidikan .....	61
D. Pemenuhan Standar Acuan Mutu oleh Satuan/Program Pendidikan .....	63

## **BAB V**

### **BEST PRACTICES COMMUNITY BASED EDUCATION DALAM PROGRAM PENINGKATAN MUTU MADRASAH**

1. Peningkatan Profesionalisme Guru.....	69
2. Peningkatan Sumber Belajar dan Fasilitas Pembelajaran .....	81
3. Peningkatan Effisiensi Internal .....	118
4. Tata Kelola, Manajemen, dan Keberlanjutan Madrasah Sasaran MEDP .....	140

## **BAB VI**

### **RELASI SOSIAL DI MADRASAH SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT**

A. Sistem Sosial di Madrasah .....	147
B. Relasi Sosial di Madrasah: Perspektif Teori Jaringan .....	152
C. Modal Sosial dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madrasah .....	155

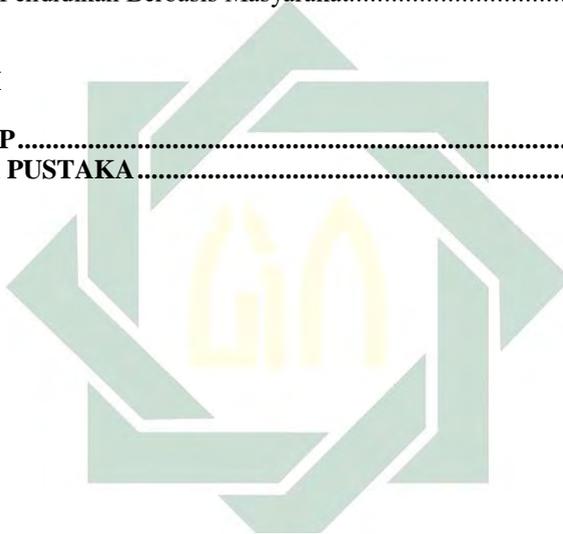
## **BAB VII**

### **PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH MENUJU STANDAR NASIONAL**

A. Relasi antar Stakeholder Madrasah dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	165
B. Model Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madrasah .....	178
C. Hubungan Stakeholder Madrasah sebagai Modal Sosial dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	184

## **BAB VIII**

<b>PENUTUP</b> .....	<b>188</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>191</b>



## DAFTAR TABEL

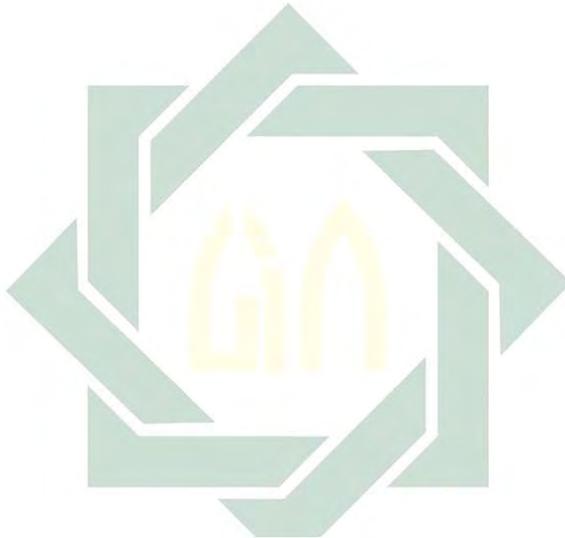
<b>Tabel 1</b>	
Profil Guru Madrasah Sasaran MEDP .....	79
<b>Tabel 2</b>	
Realisasi Program KKG/MGMP .....	81
<b>Tabel 3</b>	
Pelaksanaan Pelatihan Guru di Madrasah Sasaran MEDP .....	83
<b>Tabel 4</b>	
Kegiatan Inovasi Pembelajaran .....	85
<b>Tabel 5</b>	
Jumlah Madrasah yang melaksanakan Pembangunan dan Rehab Fasilitas Pembelajaran.....	89
<b>Tabel 6</b>	
Realisasi Program Pembangunan dan Rehab Gedung di Madrasah MEDP Kabupaten Jember .....	90
<b>Tabel 7</b>	
Realisasi Program Pembangunan dan Rehab Gedung di Madrasah MEDP Kabupaten Jombang .....	91
<b>Tabel 8</b>	
Dana Pendamping Realisasi Program Madrasah MEDP Jawa Timur.....	93
<b>Tabel 9</b>	
Jumlah Madrasah yang melakukan Pengadaan Buku Teks .....	107
<b>Tabel 10</b>	
Realisasi Program Pengadaan Buku Teks .....	108
<b>Tabel 11</b>	
Jumlah Madrasah yang Melakukan Pengadaan Peralatan dan Alat Peraga .....	111
<b>Tabel 12</b>	
Realisasi Program Pengadaan Peralatan Pembelajaran .....	113
<b>Tabel 13</b>	
Pengadaan Furniture .....	126
<b>Tabel 14</b>	
Realisasi Program Remedial antar Madrasah di Kabupaten Lamongan .....	129

<b>Tabel 15</b>	
Realisasi Program Remedial di Jawa Timur .....	131
<b>Tabel 16</b>	
Realisasi Program Beasiswa Transisi.....	133
<b>Tabel 17</b>	
Realisasi Program Guru Pengganti .....	134
<b>Tabel 18</b>	
Jumlah Madrasah yang Mengalami Penurunan Jumlah Siswa ...	135
<b>Tabel 19</b>	
Jumlah Madrasah Yang Mengalami Kenaikan Jumlah Siswa ....	141
<b>Tabel 20</b>	
Penurunan Jumlah Siswa Yang Tidak Lulus Ujian Nasional .....	146
<b>Tabel 21</b>	
Partisipasi Perempuan dalam Komite Madrasah.....	154



## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1</b>	
Realisasi Program KKG/MGMP .....	82
<b>Grafik 2</b>	
Realisasi Program Pelatihan .....	84
<b>Grafik 3</b>	
Realisasi Program Inovasi Pembelajaran .....	86



## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1</b>	
Ruang kelas lama di MI Hidayatut Tholibin Bendo Kapas Bojonegoro.....	99
<b>Gambar 2</b>	
Ruang kelas lama di MI Hidayatut Tholibin Bendo Kapas Bojonegoro.....	99
<b>Gambar 3</b>	
Ruang kelas <b>lama</b> di MI Hidayatut Tholibin Bendo Kapas Bojonegoro.....	100
<b>Gambar 4</b>	
Ruang kelas <b>lama</b> di MI Hidayatut Tholibin Bendo Kapas Bojonegoro.....	100
<b>Gambar 5</b>	
MCK dengan dana Swadaya Masyarakat di MI Hidayatut Tholibin.....	101
<b>Gambar 6</b>	
MCK dengan <b>dana</b> Swadaya Masyarakat di MI Hidayatut Tholibin.....	101
<b>Gambar 7</b>	
Gedung <b>MI</b> Hidayatut Tholibin yang lama tampak dari Gedung Baru .....	101
<b>Gambar 8</b>	
Pembangunan Ruang Kelas dengan dua tingkat berkembang menjadi tiga dengan dana swadaya masyarakattingkat di MI Manbaul Ulum Dagan Solokuro Lamongan.....	102
<b>Gambar 9</b>	
Pembebasan tanah dan Pembangunan Gedung Madrasah dengan Swadaya Masyarakat di MI Maarif Sekaran Lamongan.	103
<b>Gambar 10</b>	
Realisasi Program Pembangunan di Manbaul Hikam Bangkalan.....	105
<b>Gambar 11</b>	
Realisasi Program Pembangunan di Manbaul Hikam Bangkalan.....	106

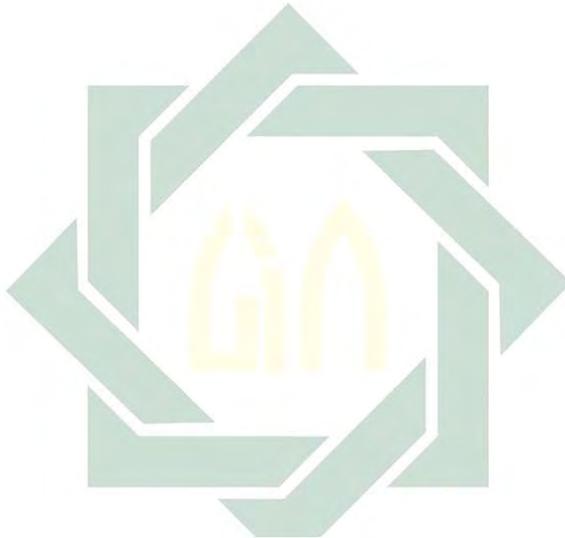
<b>Gambar 12</b>	Fasilitas Perpustakaan dari Program MEDP di MI Islamiyah Pulorejo Ngoro Jombang.....	114
<b>Gambar 13</b>	Fasilitas Perpustakaan dari Program MEDP di MTsN Juwet Nganjuk.....	115
<b>Gambar 14</b>	Fasilitas Pembelajaran IPA dari Program MEDP .....	116
<b>Gambar 15</b>	Fasilitas Pembelajaran IPA dari Program MEDP .....	117
<b>Gambar 16</b>	Fasilitas Pembelajaran Matematika dari Program MEDP .....	118
<b>Gambar 17</b>	Fasilitas Pembelajaran Matematika dari Program MEDP .....	119
<b>Gambar 18</b>	Fasilitas Pembelajaran Matematika dari Program MEDP .....	119
<b>Gambar 19</b>	Fasilitas Pembelajaran Matematika dari Program MEDP .....	120
<b>Gambar 20</b>	Fasilitas Laboratorium IPA dari Program MEDP di MTs Darul Manan Bangkalan .....	120
<b>Gambar 21</b>	Fasilitas Laboratorium Komputer dari Program MEDP di MI Sunan Ampel Nganjuk.....	121
<b>Gambar 22</b>	Fasilitas Pembelajaran ICTr dari Program MEDP di MI Al-Huda Kedung Lho Cengklok Nganjuk .....	122
<b>Gambar 23</b>	Fasilitas Klinik dari Program MEDP di MI Al-Huda Kedunglo Cengklok Nganjuk .....	123
<b>Gambar 24</b>	Pembelajaran IPA Berbasis Laboratorium dengan Program MEDP di MTsN Juwet Nganjuk.....	123
<b>Gambar 25</b>	Hasil Pembelajaran IPA Berbasis Laboratorium dengan Program MEDP di MTs Darul Manan Bangkalan .....	124

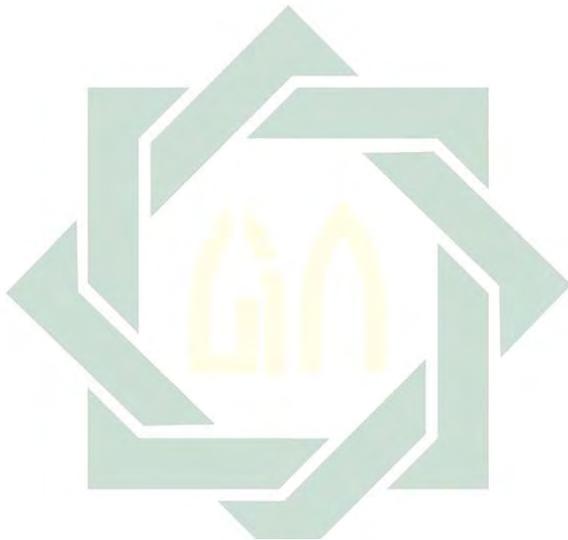
**Gambar 26**

Hasil Pembelajaran IPA Berbasis Laboratorium dengan  
Program MEDP di MTs Darul Manan Bangkalan ..... 124

**Gambar 27**

Hasil Pembelajaran IPA Berbasis Laboratorium dengan  
Program MEDP di MTs Darul Manan Bangkalan ..... 125





## **BAB I**

### **TANTANGAN MADRASAH DALAM MERESPON PERSAINGAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA**

#### **A. Tantangan Mutu bagi Madrasah**

Tuntutan kualitas produk suatu aktivitas dalam dunia globalisasi semakin tinggi. Bisa dikatakan, semua sisi kehidupan yang menghasilkan produk baik barang maupun jasa, termasuk dunia pendidikan dituntut memiliki kualitas yang unggul dalam persaingan. Pada abad ini yang dikenal dengan era revolusi 4.0, menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi yang akan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh pendidikan yang berkualitas. Dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan memegang peranan penting dan strategis dalam membangun masyarakat berpengetahuan. Cara utama yang harus ditempuh adalah dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu pilar pembangunan bagi suatu bangsa melalui pengembangan potensi individu. Karenanya, dapat dikatakan bahwa masa depan suatu bangsa terletak pada mutu dan kualitas pendidikan yang dilaksanakan. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pendidikan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya (1) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (2) persaingan global yang semakin ketat, dan (3) kesadaran masyarakat (orang tua siswa) akan pendidikan yang berkualitas semakin tinggi.

Pendidikan yang berkualitas telah menjadi perbincangan setiap orang. Perdebatan tentang mutu pendidikan telah berkembang sangat serius sehingga terdapat keragaman rumusan tentang karakteristik umum (*common denominators*) bagi sekolah-sekolah yang tergolong bermutu di sejumlah negara. Keragaman rumusan tersebut, antara lain, dipengaruhi oleh konteks budaya setempat dan filosofi tentang tujuan dan fungsi sekolah, serta asumsi tentang variabel-variabel yang dominan dalam menentukan mutu pendidikan. Menurut Bank dunia (1998) dalam laporannya tentang pengalaman dalam melakukan *Educational Quality Improvement Program* di Kamboja, terdapat empat karakteristik mutu Sekolah, yaitu *supporting inputs*, *enabling condition* seperti kepemimpinan yang efektif, tenaga guru yang kompeten, fleksibilitas dan otonomi serta waktu di sekolah yang lama, *school climate*, dan *teaching-learning process*.

Terdorong oleh kenyataan tersebut, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan menerbitkan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan lingkup terdiri 8 standar, yaitu: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan

Untuk merealisasikan standarisasi pendidikan secara nasional Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas Tahun 2007 yang mengatur delapan standar pendidikan. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi. Semua satuan pendidikan harus menerapkan delapan standar yang telah ditetapkan di PP No. 19 Tahun 2005 dan delapan Standar yang telah ditetapkan melalui Permendiknas. Ini berarti setiap satuan pendidikan atau sekolah harus dapat mencapai kualitas minimal sama dengan standar tersebut atau lebih tinggi dari standar tersebut.

Namun, kenyataannya tidak semua madrasah mampu menerapkan standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Bahkan, tidak sedikit madrasah belum memahami standar nasional pendidikan dan delapan standar yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2005.

Permasalahan utama pendidikan adalah disparitas mutu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, (2) prasarana sarana belajar yang belum optimal, (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai, (4) proses pembelajaran yang belum efektif dan efisien.

Pencapaian pendidikan nasional bermutu yang mengacu pada delapan standar nasional pendidikan harus bisa dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah. Standar-standar pendidikan yang mesti dicapai itu jangan hanya manis di atas kertas, namun miskin dalam perwujudannya. Pemenuhan standar sarana dan prasarana, misalnya masih diperhadapkan dengan bangunan gedung sekolah yang belum sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Hingga kini masih banyak bangunan sekolah, terutama SD/MI yang rusak parah dan kekurangan ruangan kelas. Fasilitas perpustakaan, mulai dari jumlah koleksi buku, kondisi ruangan, dan keragaman buku masih jauh dari ideal.

Kondisi pendidik juga masih belum mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional. Selain kompetensi dan profesionalisme guru yang masih rendah, kesejahteraan guru juga masih minim. Proses sertifikasi guru yang dilaksanakan dinilai belum mampu menunjang kinerja guru secara lebih baik. Dengan kondisi guru yang masih jauh dari kualifikasi profesional tersebut, proses pembelajaran yang seharusnya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan masih jauh dari harapan. Begitu pun suasana pendidikan yang menantang dan memotivasi siswa untuk kreatif belum dapat diterapkan. Dari segi pembiayaan pendidikan, kucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar baru mampu menutupi sekitar 50 persen anggaran sekolah.

Salah satu langkah kongkrit peningkatan mutu pendidikan adalah pemberdayaan sekolah agar mampu berperan sebagai subyek penyelenggara sekolah agar mampu berperan sebagai subyek penyelenggara pendidikan dengan menyajikan pendidikan

yang bermutu. Sekolah diberi kewenangan dan peran yang luas untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisinya masing-masing dengan tetap mengacu pada standar minimal yang ditetapkan pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Untuk pemenuhan standard nasional pendidikan di madrasah Kemenag RI telah mengembangkan program peningkatan mutu madrasah menuju madrasah berstandar nasional. Untuk menjembatani ketimpangan kualitas pendidikan antar madrasah, antara madrasah dan sekolah, dan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan kualitas tidak terjadi lagi.

Peningkatan mutu madrasah melalui program ini yang disertai pemberian block grant atau hibah ke madrasah, diharapkan dapat membantu meningkatkan tingkat pencapaian pendidikan di antara generasi muda dalam angkatan kerja dan meningkatkan ketenaga-kerjaan formal serta penghasilan rumah tangga. Hasil jangka menengah dari proyek ini adalah peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas dari pendidikan madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MT), dan madrasah aliyah (MA). Indikator-indikator sukses utama meliputi (i) peningkatan kinerja peserta didik di semua tingkatan, termasuk pengurangan kesenjangan kualitas antara sistem madrasah dan sistem pendidikan umum; (ii) penurunan perbedaan kabupaten dalam kinerja pelajar madrasah, dengan perbaikan yang berarti pada proyek madrasah; (iii) perbaikan tingkat kemajuan dan retensi dalam sistem madrasah; dan (iv) persepsi masyarakat yang lebih positif terhadap kualitas pendidikan madrasah.

Program ini dirancang untuk menghasilkan empat hal yang akan menjamin terpenuhinya standar-standar pendidikan dalam bidang-bidang utama, yaitu (i) profesionalisme guru, termasuk kualifikasi dan kinerja; (ii) tersedianya sumber daya dan fasilitas belajar dan mengajar; (iii) efisiensi internal, khususnya dalam kemajuan peserta didik dan tingkat transisi; dan (iv) tata pemerintahan, manajemen, dan akuntabilitas. Empat tujuan ini dicapai melalui mekanisme pembiayaan bantuan blok (Program) untuk masing-masing madrasah, yang didukung oleh para penyedia jasa yang dikontrak untuk memberikan program-program spesifik, seperti perbaikan kualifikasi guru dan kepala sekolah, dan pelatihan pendidikan jangka menengah.

Beberapa program peningkatan mutu madrasah melalui skema block grant atau hibah melahirkan fenomena yang menarik, yaitu meningkatnya dukungan masyarakat baik dalam bentuk tenaga, dana, pikiran, maupun material lainnya. Fenomena ini merupakan keunikan yang dimiliki madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dekat dengan masyarakat. Madrasah memiliki kemandirian yang tinggi karena dukungan masyarakat yang tinggi pula (*Community based Education*). Madrasah yang jumlahnya hampir 90% swasta dan sisanya negeri. Hal ini menyebabkan problem pendanaan pendidikan di madrasah swasta. Pengelola madrasah dituntut mandiri dan kreatif untuk menggali dana demi kelangsungan pendidikan. Salah satu sumber pendanaan yang menuntut madrasah kreatif adalah melibatkan masyarakat dalam pendanaan pendidikan di madrasah.

Isu yang menarik dalam kajian peningkatan mutu madrasah adalah bagaimana madrasah mengembangkan kreativitas dalam

melibatkan masyarakat untuk meningkatkan mutu madrasah dalam menghadapi persaingan mutu dan keharusan memenuhi standar nasional pendidikan yang menjadi acuan mutu pendidikan di sekolah dan madrasah. Dalam berbagai program peningkatan mutu madrasah dengan skema hibah dari pemerintah maupun lembaga donor asing, sangat menarik jika dilihat dengan pendekatan *community based education*. Oleh karena itu, dalam pendahuluan ini perlu dipaparkan issue-issue menarik bagaimana madrasah mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam pemenuhan mutu pendidikan sehingga hibah dari pemerintah atau lembaga donor asing menjadi tepat sasaran dan memiliki kontribusi signifikan bagi peningkatan mutu madrasah. Berikut ini adalah pertanyaan mendasar dalam pembahasan Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Madrasah:

1. Bagaimana relasi sosial dalam pendidikan berbasis masyarakat pada program pengembangan madrasah menuju standar nasional pendidikan?
2. Bagaimana model pendidikan berbasis masyarakat pada program pengembangan madrasah menuju standar nasional pendidikan?
3. Bagaimana relasi sosial menjadi modal sosial bagi pendidikan berbasis masyarakat pada program pengembangan madrasah menuju standar nasional pendidikan?

Peningkatan mutu madrasah yang dijadikan sasaran kajian buku ini adalah program pengembangan pendidikan madrasah atau *Madrasah Education Development Program* kerja sama dengan ADB kemitraan pendidikan antara Indonesia dan Australia untuk meningkatkan mutu madrasah melalui

pendampingan akreditasi madrasah. Dalam Kemitraan ini terdapat 1500 madrasah di Indonesia yang diberikan hibah untuk persiapan madrasah dalam mengikuti program akreditasi. Di Jawa Timur terdapat sekitar 214 madrasah yang didampingi untuk persiapan akreditasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana implementasi program pengembangan madrasah menuju madrasah berstandar nasional.
2. Mengetahui bagaimana strategi kepala madrasah dalam menarik dukungan masyarakat menuju madrasah berstandar nasional.
3. Mengetahui bagaimana peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam program pengembangan madrasah menuju madrasah berstandar nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang tinggi bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi penting dalam memberikan gambaran tentang bagaimana kualitas operasional program, layanan, kekuatan, kelemahan, dan efektivitas serta arah produktivitas potensial masa depan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang relevan untuk pembuat kebijakan dan membantu menata seperangkat prioritas peningkatan mutu pendidikan di lingkungan madrasah.

Pada kajian ini, penulis terlibat aktif dalam dua program peningkatan mutu madrasah. Pada program MEDP, sasaran program di antaranya adalah pendampingan madrasah dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Sedangkan program

Kemitraan Pendidikan Indonesia dan Australia adalah program pendampingan madrasah dalam memenuhi akreditasi madrasah.

Menurut Stringer, sebagaimana dikutip Creswell, Penelitian tindakan partisipatif memiliki tiga tahap, yaitu Melihat, Memikirkan, dan Bertindak yang disebut *interacting spiral* dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Fase “melihat” terdiri atas pengumpulan data (baik melalui wawancara, observasi, dan dokumen), merekam dan menganalisis informasi, dan mengkonstruksikan serta melaporkan kepada para pemangku kepentingan. Kegunaan fase ini adalah membangun suatu gambaran yang membantu para pemangku kepentingan di madrasah untuk memahami masalah-masalah yang sedang dihadapi terkait peningkatan mutu madrasah.
2. Fase “memikirkan” meliputi kegiatan menginterpretasikan masalah secara lebih mendalam dan mengidentifikasi prioritas untuk bertindak.
3. Fase “bertindak” adalah fase merancang solusi praktis untuk permasalahan.

## **B. Target Pemenuhan Mutu dalam Program Peningkatan Mutu Madrasah**

---

<sup>1</sup> John Creswell, *Riset Penelitian: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif* (Pustaka Pelajar: 2015) Cetakan kelima h.1196.

Tuntutan kualitas produk suatu aktivitas dalam dunia globalisasi semakin tinggi. Bisa dikatakan, semua sisi kehidupan yang menghasilkan produk baik barang maupun jasa, termasuk dunia pendidikan dituntut memiliki kualitas yang unggul dalam persaingan. Terdorong oleh kenyataan tersebut, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan menerbitkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan lingkup terdiri 8 standar, yaitu: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

Untuk merealisasikan standarisasi pendidikan secara nasional Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas Tahun 2007 yang mengatur delapan standar pendidikan. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi. Semua satuan pendidikan harus menerapkan delapan standar yang telah ditetapkan di PP No. 19 Tahun 2005 dan delapan Standar yang telah ditetapkan melalui Permendiknas. Ini berarti setiap satuan pendidikan atau sekolah harus dapat mencapai kualitas minimal

sama dengan standar tersebut atau lebih tinggi dari standar tersebut.

Namun, kenyataannya tidak semua madrasah mampu menerapkan standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Bahkan, tidak sedikit madrasah belum memahami standar nasional pendidikan dan delapan standar yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2005. Permasalahan utama pendidikan adalah disparitas mutu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, (2) prasarana sarana belajar yang belum optimal, (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai, (4) proses pembelajaran yang belum efektif dan efisien.

Pencapaian pendidikan nasional bermutu yang mengacu pada delapan standar nasional pendidikan harus bisa dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah. Standar-standar pendidikan yang mesti dicapai itu jangan hanya manis di atas kertas, namun miskin dalam perwujudannya. Pemenuhan standar sarana dan prasarana, misalnya masih diperhadapkan dengan bangunan gedung sekolah yang belum sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Hingga kini masih banyak bangunan sekolah, terutama SD/MI yang rusak parah dan kekurangan ruangan kelas. Fasilitas perpustakaan, mulai dari jumlah koleksi buku, kondisi ruangan, dan keragaman buku masih jauh dari ideal.

Kondisi pendidik juga masih belum mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional. Selain kompetensi dan profesionalisme guru yang masih rendah, kesejahteraan guru juga masih minim. Proses sertifikasi guru yang dilaksanakan dinilai belum mampu menunjang kinerja guru secara lebih baik. Dengan kondisi guru yang masih jauh dari kualifikasi profesional tersebut,

proses pembelajaran yang seharusnya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan masih jauh dari harapan. Begitu pun suasana pendidikan yang menantang dan memotivasi siswa untuk kreatif belum dapat diterapkan. Dari segi pembiayaan pendidikan, kucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar baru mampu menutupi sekitar 50 persen anggaran sekolah.

Salah satu langkah kongkrit peningkatan mutu pendidikan adalah pemberdayaan sekolah agar mampu berperan sebagai subyek penyelenggara sekolah agar mampu berperan sebagai subyek penyelenggara pendidikan dengan menyajikan pendidikan yang bermutu. Sekolah diberi kewenangan dan peran yang luas untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisinya masing-masing dengan tetap mengacu pada standar minimal yang ditetapkan pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Untuk pemenuhan standar nasional pendidikan di madrasah Kemenag RI telah mengembangkan program peningkatan mutu madrasah menuju madrasah berstandar nasional. Untuk menjembatani ketimpangan kualitas pendidikan antar madrasah, antara madrasah dan sekolah, dan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan kualitas tidak terjadi lagi.

## BAB II

### MADRASAH DI INDONESIA: SEJARAH DAN DINAMIKANYA DI INDONESIA

#### A. Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Madrasah berasal dari Bahasa Arab yang artinya –sekolah”. Kata Madrasah berasal dari akar kata Arab yang sama dengan *dars*, yang berarti pelajaran atau instruksi. Kata madrasah adalah kata Arab yang arti harfiahnya adalah –sekolah.” Kata berasal dari akar kata Arab yang sama dengan *dars*, yang berarti pelajaran atau instruksi. Di daerah berbahasa Arab, itu tidak secara khusus mengacu pada seminari agama; malahan sekolah dari berbagai tingkatan disebut sebagai madrasah. Namun, dalam masyarakat yang tidak berbahasa Arab, kata ini memiliki makna yang berbeda, dan sering dipahami untuk menunjuk suatu jenis lembaga khusus untuk pelatihan ulama (secara harfiah para sarjana, jamak dari alim). Dalam konteks Asia Selatan, madrasah berarti lembaga pendidikan yang menawarkan instruksi tentang Al-Qur'an, perkataan (hadis) Nabi Muhammad, fiqih, dan hukum. Dengan kata lain, sekolah yang mempromosikan kurikulum Islam disebut madrasah. Meskipun kata madrasah digunakan sebagai deskripsi umum dari lembaga pendidikan yang mencakup pendidikan dasar hingga tingkat universitas, bagi para sarjana Muslim mereka mewakili tingkat pendidikan dasar dan menengah hingga kelas sepuluh. Institusi pendidikan yang menawarkan kurikulum yang setara dengan tingkat kesebelas dan dua belas disebut *darul uloom* (secara harfiah, tempat tinggal pengetahuan),

dan jamia menawarkan kurikulum yang setara dengan perguruan tinggi dan universitas.<sup>2</sup>

Sistem pendidikan berkembang di masyarakat seiring kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan dan ketrampilan untuk mempertahankan kehidupan. Masyarakat yang sederhana yang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari bergantung pada alam dan sudah tersedia di alam, belum Nampak kebutuhannya terhadap pendidikan. Teori Ibn Khaldun tentang masyarakat nomad dan masyarakat *muqim* atau menetap menggambarkan bagaimana terjadinya gejala terbentuknya sistem pendidikan di masyarakat.

Ibn Khaldun dalam karyanya yang monumental, yaitu *Muqaddimah*, mengelompokkan masyarakat menjadi dua, yaitu masyarakat badui dan masyarakat menetap (*sedentar*). Masyarakat badui adalah kelompok atau organisasi sosial sebelum menetap. Masyarakat yang menetap dalam istilah Ibn Khaldun adalah masyarakat yang telah mencapai kematangan dalam urbanisme yang hidup menetap di kota-kota (*tatamaddan al-madinah*). Masyarakat badui dan sedentar adalah kelompok alamiah.<sup>3</sup> Yang dimaksudkan oleh Ibn Khaldun dengan kelompok alamiah adalah bahwa kedua jenis masyarakat ini dihasilkan dari perbedaan mencari nafkah.

Masyarakat badui yang belum mencapai suatu kematangan dalam urbanisme –di mana kota-kotanya belum berkembang—

---

<sup>2</sup> George Makdisi, “Muslim Institution of Learning in Eleventh-Century Baghdad” dalam George Makdisi (Ed.), *Religion, Law, and Learning in Classical Islam*, Britain: Variorum, 1991, h. 10-11.

<sup>3</sup>Ibn Khaldun (1978), *The Muqaddimah: An Introduction to History*, diterjemahkan oleh Franz Rosental. New York: Bollingen Foundation, hal. 91-93.

cenderung untuk memusatkan diri pada usaha untuk mencukupi kebutuhan subsisten, yaitu mengusahakan bahan pangan pokok. Mata pencaharian mereka seperlunya. Mereka hidup di padang pasir dan mencari nafkah dengan menunggang unta. Mereka tinggal di goa atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan padang rumput dan mata air untuk ternak mereka

Kehidupan badui bisa terlampaui setelah mereka hidup dengan cara bertani dan memelihara ternak, seperti biri-biri, unta, sapi, dan tinggal menetap. Tahap berikutnya, komunitas mereka berkembang menjadi kota. Kota-kota mereka kian maju dan sejumlah bidang pekerjaan (*al-a'mal*) mulai muncul. Kemudian, pelan-pelan mereka akan mulai memanfaatkan surplus kekayaan yang ada (*al-zai'd*) untuk hal-hal yang bersifat kemewahan hidup, "*luxuries*" (*al-kamalat min al-ma'ash*).

Menurut Ibn Khaldun, ada dua aspek yang inheren pada manusia yang menyebabkan terjadinya gejala pembentukan pendidikan Islam. Pertama, aspek yang menyebabkan manusia berbeda dengan binatang, yaitu intelektualitas (*fikr*), dan aspek kehewanian serta nutritif (*al-hayawaniyyah wa al-ghidza'iyah*). Kebutuhan manusia untuk memenuhi tuntutan aspek yang kedua ini biasanya lebih mendesak, dan karena itu harus didahulukan, ketimbang tuntutan aspek yang pertama.<sup>4</sup>

Daya intelektualitas manusia menghasilkan berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang didapat melalui kemampuan berpikir maupun melalui pengajaran (pendidikan). Ibn Khaldun membedakan perolehan pengetahuan atau ilmu melalui kekuatan

---

<sup>4</sup> Ibid., hal. 33-339

berpikir secara reflektif terhadapm obyek, permasalahan, dan beragam argument dengan pengetahuan yang diperoleh melalui otoritas seorang guru melalui proses pengajaran. Kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan melalui proses pengajaran inilah yang melahirkan sejumlah lembaga-lembaga pendidikan.<sup>5</sup>

Madrasah sebagai lembaga pendidikan muncul karena kebutuhan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan termasuk ajaran Islam sehingga lama kelamaan melembaga menjadi salah satu sistem pendidikan Islam. Menurut Horton dan Hunt, lembaga sosial muncul sebagai hasil kehidupan sosial yang tidak terencana. Masyarakat berusaha mencari cara-cara praktis untuk memenuhi kebutuhan mereka sampai ditemukan pola-pola yang terjadi secara berulang-ulang dan menjadi standar kebiasaan.<sup>6</sup> Sesuai dengan teori munculnya lembaga sosial, madrasah merupakan perkembangan dari bentuk lembaga pendidikan yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu mesjid. Akibat besarnya semangat belajar umat Islam, membuat mesjid-mesjid penuh dengan halaqah-halaqah. Dari tiap-tiap halaqah terdengar suara guru-guru yang menjelaskan pelajaran atau suara perdebatan dalam proses belajar-mengajar sehingga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang ibadah.<sup>7</sup> Semakin banyak umat Islam yang tertarik untuk menuntut ilmu, sehingga membuat mesjid penuh dan tidak muat untuk menampung murid-murid

---

<sup>5</sup> Ibid., hal. 341.

<sup>6</sup> Paul B.Horton dan Chester L. Hunt, *Sociology*, Tokyo: Mc Graw-Hill, cet. III, 1972, hal., 178

<sup>7</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, terjemahan oleh Muchtar Jahja dan Sanusi Latief, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 106.

yang belajar mendorong lahirnya bentuk lembaga pendidikan baru. Perkembangan bentuk lembaga ini melalui tiga tahap; yaitu dari mesjid ke mesjid Khan, kemudian menjadi madrasah.

Mesjid Khan adalah pemondokan atau semacam asrama di samping mesjid yang dibangun umat Islam diperuntukkan bagi murid-murid yang datang dari luar kota untuk belajar di mesjid-mesjid. Mereka yang datang dari jauh dan tidak punya cukup uang untuk menyewa penginapan, diberi izin tinggal di komplek tanpa dipungut bayaran. Tahap berikutnya adalah perkembangan dari mesjid-Khan menjadi Madrasah. Setiap Madrasah biasanya memiliki pemondokan untuk pelajar dan para guru. Lembaga ini juga dilengkapi dengan sebuah aula besar. Aula yang biasa disebut dengan *iwān* merupakan bagian terpenting dari Madrasah, di mana di sinilah kuliah disampaikan oleh profesor-profesor.<sup>8</sup>

Banyak ahli sejarah yang berbeda pendapat mengenai madrasah yang pertama muncul dalam Islam. Suatu pendapat menyatakan bahwa “madrasah” sudah dikenal di masa sahabat. Mahmud Yunus dalam bukunya *Sejarah Pendidikan Islam* menyebut-nyebut madrasah di Makkah, Madinah, Kufah, Damaskus, dan Basrah. Madrasah di Makkah memiliki guru-guru awal seperti Abdullah Bin Abbas (634 M) dan Muadz Bin Jabal yang memiliki murid-murid Mujahid Bin Jabbar (Ahli Tafsir), Atha` Bin Abi Rabbah (Ahli Fiqih), Thawus Bin Kaisan (Mufti Di Makkah).

Data tentang madrasah pertama yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus ini berbeda dengan pendapat ahli sejarah lainnya.

---

<sup>8</sup> Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999, hal. 124-125.

yang menyatakan bahwa madrasah baru dikenal umat Islam sekitar abad ke-10 M. atau ke-11 M.

Sebagian besar ahli sejarah sepakat bahwa madrasah pertama muncul di dunia Islam sekitar abad ke-10 atau ke-11 M dan penulis sepakat dengan pendapat ini. Sedangkan data yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus, menurut penulis lebih pada pengajaran di Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Damaskus, dan Basrah yang oleh Mahmud Yunus disebut dengan "madrasah". Syalabi dan K. Hitti mengangkat Madrasah Nizhamiyah sebagai madrasah yang mula-mula muncul. Mungkin mereka berangkat dari popularitas Nizhamiyah. memang Nizhamiyah sering disebut-sebut dalam buku sejarah dan namanya sangat terkenal dalam sejarah Islam. Ketenaran Nizhamiyah inilah --mungkin-- yang membuat Syalabi dan K. Hitti memastikan Nizhamiyah sebagai madrasah yang pertama muncul. Jadi Nizhamiyah adalah madrasah besar yang pertama berdiri di dunia Islam sehingga ia diangkat sebagai tonggak pertama dari bentuk madrasah. Al-Maqrizi dan Bulliet menemukan bukti lain tentang madrasah pertama. Namun demikian, mereka tidak memiliki pendapat yang sama mengenai madrasah yang pertama tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Asrohah, *Sejarah...* hal. 126.

## **B. Madrasah sebagai Model *Archaic* Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Akhir-akhir ini perkembangan mtu pendidikan di madrasah menunjukkan kegembiraan. Di berbagai kota mulai bermunculan madrasah unggulan seperti MIN Malang, MIN Pembangunan Ciputat, Madrasah Amanatul Ummah, MAN Insan Cendekia yang jumlahnya terus bertambah di berbagai daerah. Di beberapa program kompetisi, prestasi siswa-siswi madrasah juga mengagumkan, seperti olimpiade Sains dan Matematika baik tingkat nasional maupun internasional. Hasil nilai Ujian Nasional siswa dan siswi madrasah juga menunjukkan tren peningkatan yang dapat menyamai nilai UN siswa dan siswi dari sekolah-sekolah favorit dan sekolah negeri di kota-kota besar di Indonesia.

Namun demikian, tidak sedikit madrasah-madrasah yang ada di pinggiran kota, atau yang ada dikota-kota kecil, pedesan, bahkan di daerah-daerah terpencil yang perlu mendapatkan perhatian. Tidak semua madrasah memiliki kemampuan meningkatkan kapasistas pengelolaan madrasah, terutama dalam pendanaan pendidikan. Padahal di abad ke-21 lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi pendidikan alternatif. Di era globalisasi agama memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Di zaman modern ilmu pengetahuan dan teknologi dipandang sebagai faktor utama dalam mencapai kemajuan bangsa karena iptek mendatangkan kemajuan dan membuat kehidupan manusia lebih muda dan convenient (nyaman). Akan tetapi, pada saat yang sama masyarakat modern lebih cenderung kepada pendewaan terhadap materi. Kecenderungan materialistik mendorong manusia dihadapkan

pada budaya kompetitif yang dapat berujung pada kekerasan dan kezaliman.

Dalam era ilmu pengetahuan dan teknologi agama sangat relevan bagi kehidupan manusia. Agama menawarkan nilai-nilai yang dapat menciptakan keseimbangan sosial dan mengeliminir segala bentuk permusuhan, kebencian, kekerasan, dan eksploitasi manusia. Pentingnya agama di abad ke-21 menjadi kekuatan bagi lembaga pendidikan Islam yang selama ini menjadi ciri khas. Jiwa lembaga pendidikan Islam sebagai “benteng” moral-kultural bangsa Indonesia sangat relevan dengan visi pengembangan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang takwa dan produktif.

Abad ke-21 menuntut kualitas manusia yang menguasai iptek dan memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan peradaban di atas dasar rasionalitas dan etika keagamaan yang humanis. Agama dan rasionalitas akan bertemu. Manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang beriman sekaligus bertakwa. Lembaga pendidikan Islam dapat mengemban misi ini. Misi lembaga pendidikan Islam tidak hanya menjadi “eagar budaya” atau berperan pada fungsi moral-spiritual, tetapi juga sebagai “*agent of change*” (agen perubahan) sehingga lembaga pendidikan bersifat responsif terhadap tuntutan masa depan.

Dengan demikian, madrasah dituntut mampu mengembangkan fungsi edukatif yang diembannya. Lembaga pendidikan tidak bisa hanya memberikan perhatian pada fungsi moral-spiritual, tetapi juga harus mengembangkan fungsi pada aspek ekonomis, politis, dan sosial-budaya tanpa kehilangan ciri keislamannya. Kebutuhan bagi modernisasi menuntut madrasah

menghasilkan kepemimpinan modernitas dan inovator yang memelihara dan meningkatkan pembangunan; mempersiapkan anak didik memiliki kemampuan mengisi berbagai lapangan pekerjaan; dan memelihara stabilitas dan peningkatan sosio-kultural bagi pembangunan bangsa.

Tuntutan tersebut membawa implikasi yang cukup mendasar bagi sebagaimana dikemukakan oleh Azra, bahwa madrasah yang semula dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan harus mengalami pengkayaan peran dan fungsi sehingga madrasah mendapatkan beban tambahan yang cukup berat. Di samping ia harus memberikan materi-materi essential keislaman yang selama ini telah diajarkan, madrasah juga harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh.<sup>10</sup>

Beratnya beban yang diemban madrasah tersebut masih ditambah dengan rendahnya kualitas guru yang umumnya masih belum sesuai dengan kualifikasi guru matapelajaran, khususnya matapelajaran umum. Minimnya fasilitas pembelajaran, seperti laboratorium, ruang komputer, perpustakaan, dan alat pembelajaran, memperberat beban yang harus dipikul oleh madrasah. Madrasah juga memiliki kendala manajemen, terutama berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan dan mengembangkan sumber daya yang ada; kemampuan untuk mencari sumber-sumber yang baru; dan rendahnya visi dan misi para pengelola untuk meningkatkan mutu pendidikan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Azra, Azyumardi, 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas h. 5.

<sup>11</sup> Ibid.

Namun demikian, madrasah masih memiliki kekuatan dalam pengelolaan yang berbasis masyarakat. Pendirian madrasah, terutama di pedesaan, tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dan peran serta masyarakat. Madrasah telah tumbuh dan dimiliki oleh masyarakat sekitar. Dalam pertumbuhannya, madrasah hidup dari kemampuan sendiri. Pendidikan berbasis masyarakat sebenarnya telah diselenggarakan kaum Muslimin di Indonesia.

Sebagian besar madrasah dikelola dengan biaya dari masyarakat sendiri. Peran pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang belum maksimal. Data pada Kementerian Agama menunjukkan, bahwa MI swasta mencapai 95,2 % dibandingkan MIN yang jumlahnya hanya 4,8 %. Sebaliknya, SDN berjumlah 93,1 %, berbanding SD swasta 6,9 %. Pada tingkat MTs terdapat 75,7 % MTs swasta, berbanding 24,3 % MTsN. Sedangkan SLTPN berjumlah 44,9 %, berbanding SLTP swasta yang jumlahnya 55,9 %. Pada tingkat SLTA terdapat 70 % MA swasta, berbanding 30 % MAN. Sedangkan SMUN berjumlah 30,5 % berbanding SMU swasta yang berjumlah 69,4 %.<sup>12</sup>

Pengelolaan madrasah merupakan wujud pendidikan berbasis masyarakat. Corak dan karakteristik madrasah adalah wujud tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan. Kehidupan madrasah telah ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya. Menurut Tilaar, pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah merupakan model *archaic* dari pengelolaan pendidikan oleh masyarakat *community-based*

---

<sup>12</sup> Ibid., h. 8.

management).<sup>13</sup> *Community-based management* yang didukung oleh aktivitas dan kreativitas pengelola dan guru akan mampu melahirkan institusi pendidikan Islam yang maju dan unggul. Oleh karena itu, masyarakat Muslim di Indonesia mempunyai pesantren-pesantren besar, seperti Pesantren Tebuireng Jombang, Darul Ulum Jombang, Paiton Probolinggo, Gontor Ponorog, dan pesantren besar lainnya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Di dalam kekuatan yang dimiliki madrasah, terletak kelemahan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam. Karena madrasah dikelola dengan kemampuan sendiri, apalagi di tengah masyarakat miskin, madrasah berada dalam kondisi yang serba sulit. Keadaan ini melahirkan kecurigaan yang berlebihan yang berakibat *defense mekanisme*, yaitu mekanisme mengisolasi diri dan menolak perubahan. Keadaan ini, menurut Tilaar, menyebabkan lembaga pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda, Jepang, dan pasca kemerdekaan “terlempar” dari *mainstream* pendidikan.<sup>14</sup>

Pengelolaan madrasah yang berorientasi pada masyarakat telah melahirkan keanekaragaman pengelolaan sehingga sulit dicarikan standar untuk meningkatkan mutu. Meskipun di tengah-tengah masyarakat telah lahir madrasah terkenal dan memiliki keunggulan-keunggulan, seperti MIN Malang dan MAN Insan Sendekia, tidak sedikit madrasah dikelola dengan sederhana.. Di dalam menghadapi tuntutan dunia modern standar-standar

---

<sup>13</sup> Tilaar, H.A.R., 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka, h.77.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 152.

tertentu dibutuhkan, di mana madrasah harus menyesuaikan agar lebih peka menyerap dan meningkatkan kemampuan lembaga tersebut di dalam kehidupan global yang penuh persaingan.

### **C. Politik Anggaran dan Problem Pendanaan di Madrasah**

Jika politik adalah kekuatan yang menyebabkan eksisnya madrasah dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Anggaran adalah kekuatan yang bisa menjaga keberlangsungan madrasah. Tidak ada yang meragukan bahwa kemajuan dan perkembangan lembaga pendidikan bergantung kepada biaya atau dana. Pembiayaan pendidikan tidak hanya bergantung kepada lembaga dan masyarakat pengguna lembaga pendidikan, seperti orang tua, tokoh masyarakat, atau badan usaha. Peran dan tanggung jawab Negara tak kalah pentingnya dalam penentuan anggaran dan pembiayaan pendidikan. Menurut Sirozi, setiap periode perkembangan di masyarakat, pendidikan adalah *factor politik* dan *kekuatan politik*. Pendidikan pada hakekatnya adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan dari kekuatan-kekuatan politik yang sedang berkuasa. Kebijakan perencanaan, atribut edukasi, pelaksanaan, tujuan pendidikan, relasi structural dengan lembaga nonedukatif lain, pembiayaan, dan manajemen pendidikan diputuskan berdasarkan konsensus dan keputusan politik pemerintah.<sup>15</sup>

Lebih dari itu, saat ini sering ditemukan calon-calon penguasa daerah dan elit politik menggunakan pendidikan sebagai alat kampanye untuk meraih partisipasi rakyat untuk memilih pemimpinnya dan elit politik. Kampanye “pendidikan gratis”

---

<sup>15</sup> M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.185.

sering digunakan sebagai jargon politik dalam kampanye politik. Pada kampanye 2 Mei 1997, Tony Blair menyebutkan bahwa, “pendidikan, pendidikan, pendidikan adalah sebuah janji pemerintahannya untuk masa depan”. Selanjutnya Blair menjanjikan bahwa pendidikan akan menjadi salah satu program kerja utama pada pemerintahannya.<sup>16</sup> Dengan didukung partai buruh, Blair berhasil memenangkan pemilu yang mengantarkannya menjadi Perdana Menteri Inggris.

Menurut Elliot, salah satu komponen pendidikan dapat dijadikan sebagai media sosialisasi politik.<sup>17</sup> Anggaran pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan salah satu issue politik yang penting karena anggaran pendidikan menjadi pusat kepentingan yang mempengaruhi maju-mundurnya pendidikan.

Dalam politik pendidikan, yang perlu mendapat perhatian adalah politik anggaran. Di Indonesia telah terjadi perbedaan alokasi anggaran di lingkungan lembaga pendidikan formal, yaitu terdapat perbedaan penganggaran antara sekolah dengan madrasah, apalagi antara sekolah dengan lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah diniyah. keberpihakan pemerintah terhadap madrasah berbeda dengan sekolah. Madrasah yang 90% swasta membutuhkan perhatian pemerintah karena lembaga-lembaga pendidikan swasta, terutama madrasah tidak cukup dana untuk pembiayaan pendidikan apalagi

---

<sup>16</sup> Jack Demaine, *Education Policy and the Contemporary Politics*. Britain: PalgraveMacmillan, 1999), hal. 6

<sup>17</sup> Thomas H. Elliot, “Toward an Understanding of Public School Politics” dalam *American Political Science Review*, vol. 53, No. 4 Desember, hal. 1047.

penyiapan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan.

Tidak sedikit madrasah kesulitan mendapatkan kesulitan akses dana pendidikan yang cukup untuk memberikan layanan pendidikan bermutu karena dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah pusat, bukan tanggung jawab yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah. Desentralisasi memberikan implikasi pembagian kewenangan dan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah.<sup>18</sup> Dejelaskan pada Pasal 2 ayat (3)UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pemerintah daerah –menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan (pusat), dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.” Pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, serta agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

---

<sup>18</sup> Abdullah zainie, “Dilema Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” dalam Syamsuddin Haris (Edt.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hal. 265-266. Penerapan paradigm desentralisasi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, termasuk bidang pendidikan secara resmi dimulai berkenaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hanya dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, dua undang-undang tersebut mengalami revisi. Tanggal 15 Oktober 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara resmi diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan nama yang sama. Lihat Sirozi, *Politik Pendidikan ....* hal. 230-31.

Pengelolaan pendidikan di Indonesia saat ini berwujud dualism. Lembaga sekolah dan perguruan tinggi umum dikelola di bawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan madrasah, pesantren, dan pendidikan Islam yang berbasis agama dipandang sebagai pendidikan keagamaan dan dikelola di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Dualisme pengelolaan pendidikan ini dipahami bahwa pendidikan berbasis agama yang dikelola oleh kementerian Agama menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Akibatnya, politik anggaran untuk pendidikan Islam berbasis agama tidak didukung anggaran daerah secara simultan. Kebijakan anggaran APBD provinsi dan kabupaten/kota sempat tersandung oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma`ruf Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 tentang “Pedoman Penyusunan APBD 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2005”. Surat Edaran tersebut oleh sebagian kepala daerah diartikan sebagai larangan alokasi APBD untuk pendidikan keagamaan karena bidang agama tidak mengalami desentralisasi sehingga penganggarannya diambilkan dari belanja pemerintah pusat di APBN, bukan dari APBD.<sup>19</sup>

Kebijakan anggaran ini membuat kepala daerah gelisah; satu sisi tidak mau salah dalam mengalokasikan anggaran, di sisi lain tidak ingin berkonfrontasi dengan tokoh agama karena tidak memberikan perhatian pada pendidikan Islam berbasis agama dan khawatir popularitasnya menurun. Banyak daerah yang menyetop bantuan untuk madrasah dengan alasan urusan agama tidak diserahkan ke daerah. Padahal yang dimaksud dengan

---

<sup>19</sup> Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum santri: Wajah Baru Pendidikan Islami*, (Bandung: Mizan, 2009), hal. 65

urusan agama dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah urusan keagamaan, sedangkan urusan pendidikan sudah menjadi urusan wajib pemerintah daerah.

Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap urusan agama semakin kuat dan dipertegas dengan amar putusan MK 58/PUU-VIII/2010 untuk hasil uji materi terhadap UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 55 ayat (4), pada 23 September 2011 kata “dapat” yang terdapat pada ayat tersebut diganti wajib sehingga perubahan ayat tersebut menjadi demikian:

Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat wajib memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/pemerintah daerah. Amar Mahkamah Konstitusi ini memberikan angin segar bagi lembaga pendidikan Islam berbasis agama dan memiliki peluang yang menjanjikan untuk mengakses anggaran pendidikan dari pemerintah daerah. Peluang ini semakin nyata setelah keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450). Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dirubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013. Pada Pasal 30 Permendagri Nomor 39 Tahun 2013 dijelaskan tentang bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, yaitu: (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. individu dan/atau keluarga;

- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.

Lembaga pendidikan Islam dalam konteks permendagri di atas termasuk lembaga non pemerintahan dan bisa mengajukan bantuan sosial baik berupa uang atau barang. Sementara itu madrasah negeri tidak bisa mendapatkan bantuan sosial karena termasuk satuan kerja (Satker) yang sudah mendapatkan anggaran dari DIPA. Dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan Islam, pemerintah daerah memiliki kebijakan daerah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan perbedaan prioritas anggaran masing-masing kabupaten, dukungan politis dari partai-partai terhadap pendidikan Islam, dan potensi daerah yang terkait dengan ketersediaan anggaran. Daerah-daerah yang potensial secara ekonomis memiliki anggaran yang tinggi di banding daerah yang tidak memiliki sumber daya alam dan manusia sehingga berpengaruh terhadap alokasi anggaran pendidikan Islam yang berbasis keagamaan..

Kebijakan (*policy*), seperti disebutklan oleh Waluyo Iman Isworo, merupakan hasil dari suatu keputusan setelah melalui pemilihan alternatif yang tersedia, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Menurutnya, kebijakan akan menyangkut dua aspek besar, yaitu proses pelaksanaan keputusan serta dampak daripada pelaksanaan tersebut.<sup>20</sup> Di sini, kebijakan yang dimaksudkan adalah kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan politik anggaran yang dimaksud adalah hasil dari suatu keputusan

---

<sup>20</sup> Waluyo Iman Isworo, "Beberapa Pendekatan Dalam Analisis dan Implementasi Kebijakan Publik," dalam Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti (Penyunting), *Teori-Teori Politik Dewasa Ini*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pres, Cet. I, 1996), h. 229.

yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setelah melalui pemilihan alternatif yang tersedia untuk merespon aspirasi masyarakat baik melalui lembaga legislatif atau birokrasi.

Les Bell dan Howard Stevenson menjelaskan bahwa menyangkut adalah *what ever government chose to do or not to do*. kebijakan memiliki beberapa model, misalnya studi bagaimana proses kebijakan dapat dipahami dan ditafsirkan.<sup>21</sup> Dror, sebagaimana dijelaskan dalam Miriam Budiarjo, mengatakan bahwa kajian kebijakan akan menyangkut pemahaman terhadap pembuatan dan penyempurnaan suatu kebijakan. Kebijakan publik berkaitan secara spesifik dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui proses politik yang dilakukan oleh seluruh atau sebagian masyarakat dalam suatu yurisdiksi pemerintahan tertentu. Jadi, kebijakan publik akan menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang administrator. Hal ini menyangkut bukan hanya substansi, akan tetapi juga proses pelaksanaan dinamis serta akibatnya terhadap masyarakat.

Lingkup bahasan kebijakan sangat luas sekali, meliputi, *pertama*, proses pelaksanaan keputusan, dan *kedua*, isi dari kebijakan, dan *ketiga*, berkaitan dengan dampak daripada pelaksanaan tersebut. Taylor (1991) sebagai mana dikutip oleh Bell dan Stevenson, menjelaskan tiga fokus kajian kebijakan, yaitu fokus pada *context, text, and consequences*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Les Bell dan Howard Stevenson, *Education Policy: Process, Themes, and Impact*, (New York:Routledge, 2006), hal. 12.

<sup>22</sup> Ibid.

Kajian Konteks kebijakan mengacu pada anteseden dan tekanan yang mengarah pada formulasi kebijakan. Kebijakan negara atau institusional akan memiliki konteks mereka sendiri. Kajian teks kebijakan mengacu pada isi dari kebijakan itu sendiri. Bagaimana kebijakan diartikulasikan dan berbingkai? Apa tujuan kebijakan dilakukan? Apa nilai-nilai terkandung dalam kebijakan tersebut? Apakah ini eksplisit, atau implisit? Apakah kebijakan tersebut memerlukan tindakan, jika demikian apa dan oleh siapa? Sedangkan kajian konsekuensi dari kebijakan cenderung mengkaji pelaksanaannya, yang mungkin terjadi perbedaan karena kondisi yang unik yang berlaku di masing-masing lembaga.

Dalam kebijakan publik ini ada dua unsur utama yang ikut menentukan. *Pertama*, peran politik lembaga legislatif dalam perumusan kebijakan. *Kedua*, peranan birokrasi ketika dihadapkan pada tahap implementasi kebijakan tersebut. Campbell dan Mazzone (1976), sebagaimana dikutip oleh Jean Madsen,<sup>23</sup> menyatakan bahwa ketentuan kebijakan pemerintah sangat bergantung kepada model dan hirarki tatakelola pemerintahan daerah. Penentuan kebijakan tentang anggaran pendidikan di pemerintah daerah harus mengikuti berbagai prosedur yang akan melibatkan berbagai pihak, seperti anggota dewan perwakilan rakyat, kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan dinas pendidikan, maupun dinas lainnya yang terkait. Tiap-tiap daerah kabupaten/kota memiliki tata kelola yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Perbedaan tata kelola ini akan

---

<sup>23</sup> Jean Madsen, *Educational Reform at the State level: The Politics and Problems of Implementation*, (London: The Falmer Press, 1994), hal. 45.

mempengaruhi proses penentuan kebijakan, bentuk kebijakan, dan dampak dari kebijakan dalam pendidikan Islam.

Berbagai kalangan menyebutkan bahwa ada beberapa langkah-langkah yang mesti ada dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu (1) identifikasi masalah yang akan mengarah kepada permintaan untuk mengatasi masalah tersebut, (2) formulasi kebijakan berupa langkah yang dilakukan setelah pemilihan alternatif, (3) legitimasi dari kebijakan, (4) implementasi, dan (5) evaluasi melalui berbagai sumber untuk melihat sejauh mana usaha pencapaian tujuan.<sup>24</sup> Dengan demikian, kajian kebijakan yang ditelorkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang akan dikaji di sini meliputi (i) formulasi atau pembentukan, (ii) isi kebijakan, (iii) proses pelaksanaan kebijakan, serta (iv) dampak dari kebijakan anggaran pemerintah daerah lembaga pendidikan Islam berbasis keagamaan. Anggaran pelayanan dasar merupakan rencana keuangan yang mencerminkan pilihan dari kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Musgrave, seperti dikutip oleh Fathurrahman, telah mengidentifikasi tiga fungsi anggaran. *Pertama*, fungsi alokasi. Dalam konteks Indonesia, fungsi alokasi sering disebut “belanja publik”, karena alokasi anggaran untuk memenuhi pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan. *Kedua*, fungsi distribusi. Fungsi ini bertujuan untuk menanggulangi kesenjangan sosial-ekonomi. Anggaran merupakan instrumen untuk membagi sumberdaya dan pemanfaatannya kepada masyarakat secara adil. *Ketiga*, fungsi stabilisasi. Penerimaan dan pengeluaran Negara tentu akan mempengaruhi agregat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

---

<sup>24</sup> Waluyo Iman Isworo, “Beberapa Pendekatan Dalam Analisis dan Implementasi Kebijakan Publik,” h. 230-231.

### BAB III

## PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DI MADRASAH

### A. Konsep dan Sejarah Pendidikan Berbasis Masyarakat

Salah satu platform penting dalam kerangka reformasi pendidikan nasional adalah pengembangan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Kata "*Community*" berasal dari istilah Latin, "*Communis*," yang berarti persekutuan atau umum hubungan dan perasaan. Komunitas adalah istilah yang sarat nilai yang membangkitkan berbagai deskripsi oleh beragam individu. Konsep komunitas memiliki makna multidimensi dalam ruang lingkup dan perspektif yang menghasilkan sejumlah definisi, misi, tujuan, dan gambaran. *Community* juga menggambarkan. Istilah *community* dapat diartikan dengan "*gemeinschaft*" dan "*gesellschaft*" untuk menggambarkan dua cara bagaimana orang berhubungan satu sama lain. Komunitas *gemeinschaft* adalah karakteristik keluarga, lingkungan, dan kelompok persahabatan yang berhubungan satu sama lain dalam rasa kebersamaan, stabilitas, identitas bersama dan keprihatinan, dan kebiasaan umum untuk norma-norma sosial, ikatan dan kewajiban. Sedangkan *gesellschaft* adalah komunitas di mana orang-orang berhubungan satu sama lain dalam cara-tujuan saling berhubungan. Berbagai bentuk pertukaran mencirikannya dengan orang lain untuk tujuan utama untuk melayani kepentingan individu. Di antara dua konsep *community* menunjukkan bahwa *gemeinschaft* tampaknya paling tepat untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis dan

mengandung proses harmonis.<sup>25</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh Rosser dan Maloney bahwa "community" dipandang bercorak geografis dan lokal. Berdasarkan. Ada beragam cara untuk mendefinisikan "komunitas." Mendefinisikan komunitas secara ketat sebagai geografis atau lokasional akan menghambat kekayaan makna dan tujuannya. Dengan menerima keragaman definisi "community" komunitas dapat didefinisikan sebagai "kombinasi dan keterkaitan antara geografis dan lokasi." Filosofi makna Pendidikan Berbasis Masyarakat berakar jauh ke belakang dalam gerakan pengabdian masyarakat. Beberapa tanggal dan kegiatan penting dapat diidentifikasi sebagai: langkah penting dalam sejarah pendidikan berbasis masyarakat. Pada tahun 1969 tiga buku penting diterbitkan, yaitu *The Community Dimension of the Community College* ditulis oleh Erwin L. Harlacher, *Dateline 79: Heretical Concepts for the Community College*, disusun oleh Arthur M. Cohen; and *Community Services in the Community College*, disusun oleh Gunder A. Myran. Buku-buku ini menandai awal dari sebuah evolusi dari bentuk pelayanan masyarakat yang sempit menuju hubungan di mana "perguruan tinggi" mulai bekerja dengan "komunitasnya" untuk memecahkan masalah daripada hanya melayani masyarakat akademis.<sup>26</sup>

Di Indonesia, Pendidikan Berbasis Masyarakat menjadi

---

<sup>25</sup> Dionne Rosser-Mims dan James Maloney, "The Historical and Contemporary, Relevance of the Interconnectivity of Community, Community-Based Education, and Transformative Education," dalam *International Journal of Adult Vocational Education and Technology*, Volume 8 • Issue 1 • January-March 2017, h. 48.

<sup>26</sup> Ibid. h. 49.

kebijakan pendidikan nasional setelah lahirnya UU No 22/99 tentang Otonomi Daerah sebagai sebuah langkah baru bagi lahirnya sistem pendidikan yang demokratis dan tidak lagi memusat. Sebab, dalam undang-undang tentang otonomi daerah ini wilayah (daerah) berhak mengelola sistem pendidikan sesuai kebutuhan lokal daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah meletakkan kewenangan sebagian besar pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang selama ini berada pada pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah (Kabupaten/Kota).

Lahirnya Undang-Undang No. 22 1999 merupakan konsekuensi dari keinginan reformasi untuk menegakkan kehidupan demokrasi. Sistem pemerintahan sentralistik melahirkan sistem pendidikan nasional yang bersifat birokratik-sentralistik. Sistem pendidikan yang selama ini sepenuhnya dikelola secara birokratik dan sentralistik dianggap 'biang keladi' yang telah memurukkan mutu dan keunggulan pendidikan. Ini terjadi, karena sistem birokrasi selalu menempatkan 'kekuasaan' sebagai faktor paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Madrasah-madrasah saat ini telah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi yang 'menggurita' dari tingkat pusat hingga daerah. Kebijakan yang sentralistik cenderung melahirkan keseragaman, yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas kondisi, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia di daerah. Kebijakan pendidikan nasional hampir tidak memberikan ruang gerak yang memadai bagi masyarakat di wilayah atau daerah tertentu untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dan relevan dengan daerah dan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Desentralisasi pendidikan diperlukan untuk mewujudkan

masyarakat baru yang demokratis. Kehidupan demokratis tidak akan terwujud apabila segala sesuatu ditentukan oleh pusat. Ciri-ciri kehidupan demokratis adalah diakuinya kebebasan berbicara dan berpikir kritis. Hak-hak asasi manusia diakui dan dikembangkan dalam batas-batas kemerdekaan. Demokrasi akan mati apabila kebebasan berpendapat, berpikir, dan bertindak dibatasi. Akibatnya, lahirah manusia-manusia yang tidak kreatif. Perkembangan masyarakat menjadi lamban dan tidak produktif.

Desentralisasi pendidikan adalah pengalihan tanggung jawab atas perencanaan, manajemen, penggalian dan alokasi sumber daya dalam pendidikan dari pemerintah pusat dan perwakilannya kepada unuit-unit pelaksana pendidikan, unit-unit di bawah pemerintah pusat, otoritas publik dan korporasi-korporasi semi otonom, otoritas regional atau fungsional yang lebih luas, atau lembaga swadaya masyarakat.<sup>27</sup> Dalam desentralisasi ada pelimpahan wewenang, baik secara luas atau sempit. Desentralisasi yang dikehendaki adalah dekonsentrasi wewenang dari pusat kepada unit di bawah sesuai dengan garis kebijakan pusat. Dengan demikian, otonomi pendidikan adalah dekonsentrasi wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, masyarakat, bahkan kepada madrasah sebagai ujung tombak otonomi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan madrasah.

Makna sebenarnya dari otonomi pendidikan adalah mengembalikan tanggung jawab pendidikan kepada *the stakeholder*, yaitu masyarakat itu sendiri. Dalam otonomi

---

<sup>27</sup> Duhou, Ibtisam Abu-, 2002. *Manajemen Berbasis Madrasah*, Jakarta: Logos, h. 11.

pendidikan, masyarakat secara langsung bertanggung jawab atas keberadaan dan proses pendidikan yang dimilikinya.<sup>28</sup> Penyelenggaraan pendidikan harus mengikutsertakan masyarakat karena masyarakat adalah *the stakeholder* yang pertama dan utama dari proses pendidikan. Dengan demikian, proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana pendidikan, termasuk pula mutu pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung mendorong madrasah menjadi maju. Berdasarkan penelitian, madrasah yang termasuk kategori unggul, mengoptimalkan keterlibatan masyarakat, terutama orang tua, dalam mencapai tujuan madrasah. Orang tua murid diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengenali madrasah, bukan saja bentuk fisiknya, tetapi juga program pendidikannya.<sup>29</sup>

Di Indonesia partisipasi masyarakat terhadap pendidikan sangat lemah meskipun sebagian besar lembaga-lembaga pendidikan didanai oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap proses pendidikan belum optimal. Hal ini disebabkan sistem pendidikan yang sentralistik sehingga organisasi penyelenggara pendidikan telah mengabaikan tanggung jawab masyarakat. Dalam sistem pendidikan sentralistik, organisasi penyelenggara pendidikan telah mengasingkan diri dari masyarakat dan jauh dari usaha pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendidikan berbasis

---

<sup>28</sup>Tilaar, H.A.R., 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: ineka, h. 77.

<sup>29</sup> Tilaar, H.A.R., 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka, h. 77. Azra, Azyumardi, 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas h. 7

masyarakat (*Community based education*). Otonomi pendidikan nasional diwujudkan dengan sistem MBS (Manajemen Berbasis Madrasah). Dalam MBS madrasah diberi wewenang untuk merancang keuangan, pengembangan kurikulum, termasuk tujuan dan sasaran pendidikan, alokasi waktu, serta pemanfaatan media, sumber, instrumen, dan teknologi bagi pendidikan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang optimal. Konsep manajemen berbasis madrasah adalah pengelolaan madrasah dengan pelimpahan wewenang tertentu, tetapi tetap dalam kerangka kebijakan nasional.

Konsep desentralisasi dalam sistem pendidikan nasional lebih mengacu pada madrasah manajemen mandiri (*self-managing schools*) dari pada penyelenggaraan mandiri (*self-governing schools*).<sup>30</sup> Desentralisasi pendidikan bukan berarti penciptaan substansi pendidikan yang bersifat sempit dan lokal yang dapat melahirkan sentimen kedaerahan, tetapi pelimpahan kekuasaan dan wewenang kepada daerah dan madrasah dalam mengelola berbagai sumber meliputi ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana yang mengacu kebijakan nasional.

---

<sup>30</sup> Dalam *self-governing schools* (penyelenggaraan madrasah secara mandiri), mengandung arti penguatan unit-unit pelaksana pendidikan dan unit-unit pemerintah di daerah yang berbeda dengan pusat. Penguasa hanya menjalankan pengawasan tidak langsung kepada unit-unit di bawah. Sedangkan konsep *self-managing schools*, pelimpahan wewenang dilakukan oleh pusat kepada unit pelaksana untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan program atau proyek disesuaikan dengan kondisi lokal sesuai garis pedoman yang dirumuskan oleh pusat. Pusat mempunyai kontrol terhadap unit-unit di bawahnya. Duhou, *Ibid.*, h. 11-13.

Dalam merealisasi desentralisasi pendidikan, konsep manajemen berbasis madrasah tidak dapat dipisahkan dari konsep pendidikan berbasis masyarakat. Di era otonomi partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam penyelenggaraan pendidikan sangat penting. Partisipasi masyarakat diharapkan menjadi kekuatan kontrol bagi pelaksanaan dan peningkatan kualitas madrasah. Oleh karena itu, lahir gagasan komite madrasah yang berperan sebagai mitra madrasah yang menyalurkan partisipasi masyarakat. Komite Madrasah berfungsi menjaga transparansi, akuntabilitas madrasah, dan menyalurkan partisipasi masyarakat pada madrasah.

Dalam konteks desentralisasi, MBS dan Komite Madrasah saling berkaitan. Jika MBS dan Komite Madrasah berjalan, proses demokratisasi pendidikan telah berjalan dan tanggung jawab pendidikan telah dikembalikan kepada masyarakat karena masyarakat tentunya yang memiliki *sustainability* (kemampuan menopang) yang handal untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Namun demikian, Pengembangan manajemen berbasis madrasah masih sangat sulit karena sudah puluhan tahun manajemen pendidikan nasional bersifat sentralistik sehingga perlu waktu dan keberanian untuk berubah. Partisipasi masyarakat sangat membantu implementasi manajemen berbasis madrasah. Namun, dibutuhkan waktu dan tenaga untuk menggalang peran serta masyarakat dalam proses pendidikan mengingat selama ini sistem pendidikan nasional terisolasi dari peran serta masyarakat.

## **B. Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Tujuan pengembangan platform pendidikan berbasis masyarakat, sebagaimana dikemukakan Azyumardi Azra,<sup>31</sup> adalah pertama membantu pemerintah dalam memobilisasi SDM setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat dalam mengambil bagian dalam pendidikan. Kedua, mendorong perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan madrasah, tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan menerima kesediaan sosial budaya. Ketiga, mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap madrasah. Keempat, mendukung peranan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan; membuka kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan; dan efisiensi manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pada UU Sisdiknas 2003 Pasal 54 dalam butir (1) dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.. Pada butir (2) dalam pasal yang sama diuraikan bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil hasil pendidikan.

Pendidikan Berbasis Masyarakat bermakna bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemangku kepentingan lembaga pendidikan. Pendidikan bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah. Apalagi kemampuan pemerintah yang belum mampu menanggung sepenuhnya

---

<sup>31</sup> Azra, *Paradigma Baru Pendidikan.*, h. 7-8.

penyelenggaraan pendidikan, maka Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pengembangan platform pendidikan berbasis masyarakat bertujuan: pertama, membantu pemerintah dalam memobilisasi SDM setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk ambil bagian lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Kedua, mendorong perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan madrasah, tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kesediaan menerima sosial budaya, Ketiga, mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap madrasah melalui kebijakan desentralisasi. Keempat, mendukung peranan masyarakat dalam mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran madrasah; dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi; membuka kesempatan lebih besar dalam memperoleh pendidikan; serta meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan dasar untuk wajib belajar pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.<sup>32</sup>

### **C. Pendidikan Berbasis Masyarakat untuk Perubahan Performa**

Kinerja merupakan kapasitas untuk menanamkan kesadaran pada anggota dan menyarankan sikap dan perilaku yang diperlukan untuk pengembangan pribadi. Hal ini bisa dicapai,

---

<sup>32</sup> Moedjiarto, 2002. *Madrasah Unggul: Metodologi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Duta Graha Pustaka, h. 95-97.

menurut Leigh Anne Howard jika kinerja memiliki dampak dalam menciptakan visi dan realitas yang lebih baik. Kinerja harus menempatkan setiap warga madrasah sebagai agen yang dapat membuat perubahan dan mengasah keterampilan untuk meningkatkan jejak individu mereka. Kesadaran pribadi dan perubahan, adalah langkah pertama menuju kinerja utopis yang kuat.<sup>33</sup>

Perubahan yang dihasilkan dari pendidikan berbasis masyarakat melibatkan pergeseran pemahaman siswa sebagai berikut.<sup>34</sup>

1. Siswa memahami peran dalam layanan pembelajaran kepada sesama teman.
2. Program layanan pembelajaran oleh siswa ini dapat mengembangkan ketrampilan kunci yang harus dikuasai oleh siswa.
3. Mereka juga terlibat dalam pemecahan masalah. Sehingga mereka memiliki kemampuan berpikir kritis.
4. Perubahan pemikiran stereotip antar sesama siswa. Mereka mampu menjalin kerja sama yang baik dalam memecahkan masalah pembelajaran atau tugas-tugas di madrasah.
5. Semua siswa yang terlibat dalam program madrasah dapat mengartikulasikan kemampuan personal untuk menguasai kompetensi dalam pembelajaran.

---

<sup>33</sup> Leigh Anne Howard, " Performance, Pedagogy, Potential: Utopian Performance as Community-Based Education," dalam *Michigan Journal of Community Service Learning*, 2019, h.5-17.

<sup>34</sup> Ibid.

## **D. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat di Madrasah**

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional menjadi sangat penting dan strategis. Seiring dengan kebijakan Manajemen berbasis Madrasah, partisipasi masyarakat membutuhkan pengejawantahan dalam bentuk lembaga yang menjadi mitra madrasah untuk menyalurkan partisipasi masyarakat.

Komite madrasah akan membantu madrasah dalam menyusun kebijakan, perencanaan, dan pengawasan. Dengan demikian, kepala madrasah dan para penyelenggara serta pelaksana pendidikan di madrasah secara substansial akan bertanggung jawab kepada komite madrasah.

Selama ini garis pertanggungjawaban madrasah dan para penyelenggara pendidikan di madrasah bertanggung jawab kepada pemerintah, dalam hal ini Dikdasmen, maka dengan konsep pendidikan berbasis madrasah, pertanggungjawaban itu diberikan kepada Komite Madrasah. Sedangkan pemerintah hanya memberikan legalitas.<sup>35</sup>

### **1. Sejarah terbentuknya Komite Madrasah**

Komite Madrasah merupakan perwujudan dari berbagai lembaga yang menjadi mitra madrasah. Orang tua murid pernah memiliki satu wadah yang memiliki peran memajukan madrasah dalam bentuk Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (PMOG) yang dihapus pada 1974. Sebagai gantinya, dibentuk Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0293/U/1993. Setelah bangsa Indonesia

---

<sup>35</sup> Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar*, h. 133-34.

dilanda krisis ekonomi sejak 1997, kapasitas kemampuan masyarakat untuk menikmati pendidikan semakin menurun sehingga angka putus madrasah semakin tinggi dan kemampuan masyarakat pada pendidikan melemah khususnya pada tingkat menengah dan tinggi. Untuk mengatasinya, pemerintah memberikan bantuan kepada murid yang tidak mampu melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang mendorong lahirnya Komite Madrasah JPS.

Dalam sistem desentralisasi pendidikan dan ditetapkannya manajemen berbasis madrasah, BP3 perlu disesuaikan dengan nuansa dan paradigma pendidikan nasional. Maka dibentuklah Komite Madrasah yang merupakan gabungan Komite Madrasah JPS, organisasi Orang Tua Siswa, dan BP3 untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di madrasah dalam upaya ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional.<sup>36</sup>

Jika Komite Madrasah JPS beranggotakan dari masyarakat 50% dan birokrat 50%, keanggotaan Komite Madrasah yang baru terdiri dari orang tua siswa, tokoh masyarakat, pakar dan pengamat pendidikan, LSM-LSM, dan mungkin juga perwakilan-perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat dan pemuda yang ada.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 134

<sup>37</sup> *Ibid.*, 135.

## 2. Peran dan Fungsi Komite Madrasah

- a. Komite Madrasah secara aktif memberi pertimbangan dalam penentua dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah.
- b. Komite Madrasah memberikan dukunga baik yang berujud finansial dan barang, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Komite Madrasah melaksanakan pengawasan dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan madrasah.
- d. Komite madrasah berfungsi sebagai pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- e. Komite madrasah menjalin kersa sama dengan perorangan, pemerintah, dan badan usah untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- f. Menampung dan menganalisa ide, aspirasi, ide, tuntutan dari masyarakat
- g. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD berkaitan dengan(1) kebijakan dan program pendidikan, (2) kriteria kinerja pendidikan di daerahnya, (3) kriteria tenaga kependidikan, termasuk kepala madrasah, (4) kriteria sarana dan prasarana pendiidikan sesuai dengan kemampuan daerah, dan (5) berbagai kebijakan pendidikan lainnya.
- h. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas, relevamsi, dan pemerataan pendidikan.

- i. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan kebijakan, program, dan out put pendidikan.<sup>38</sup>

## **E. Pendidikan Berbasis Masyarakat untuk Pemberdayaan**

Tujuan dari otonomi pendidikan adalah pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan sehingga menjadi lembaga yang mandiri. Dengan demikian, otonomi pendidikan harus membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari kungkungan birokrasi dan menjadi lembaga profesional dengan tanggung jawab yang jelas.

Selama ini lembaga pendidikan terjebak dalam sistem birokratis-sentralistik. Kebijakan-kebijakan dan program-program pendidikan ditentukan oleh pusat. Akibatnya, lahir kebijakan uniformitas sehingga pendidikan tercabut dari tanggung jawab masyarakat. Madrasah-madrasah tidak mampu mengembangkan kreatifitas dan kemandirian. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan kehilangan relevansi dengan kehidupan nyata dan tidak mampu melahirkan output yang kritis dan inovatif.

Otonomisasi akan memberikan wewenang kepada unit pelaksana terdepan untuk mengambil keputusan sendiri sesuai dengan tuntutan, tidak menunggu petunjuk dari pusat. Hal ini akan mendorong unit-unit pelaksana bersifat kreatif dan mandiri. Pada gilirannya, akan tumbuh kemampuan daya saing yang tinggi. Sikap kompetitif bukan berarti kemampuan untuk saling

---

<sup>38</sup> Mulyasa, *Menjadi Kepala Madrasah Profesional*, Bandung: Rosdakarya, 2000, h. 189.

membunuh dan saling menyingkirkan, tetapi dalam kerangka kerja sama untuk saling meningkatkan kualitas. Iklim kompetitif akan mendorong rasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai sehingga membuka peluang untuk melahirkan ide-ide baru. Kemampuan inovasi yang akan membawa madrasah-madrasah menjadi madrasah yang unggul dan mampu bersaing. Hanya madrasah yang unggul yang mampu bersaing di era persaingan global. Sedangkan madrasah yang lemah akan tertinggal dan tidak mampu eksis di tengah kehidupan global yang terbuka.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan madrasah-madrasah unggul. Pertama, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi di madrasah diperlukan kepala madrasah yang cakap yang dapat membuat perencanaan, bujeting, dan memahami visi dan misi pendidikan nasional untuk diimplementasikan dalam program-program madrasah. Program-program pendidikan di madrasah dapat diselaraskan dengan arah dan kebijakan pendidikan nasional. Maka, dibutuhkan kepemimpinan kepala madrasah yang dapat memberdayakan, mengoptimalkan, dan mengarahkan segala sumber daya untuk peningkatan kualitas pendidikan.<sup>39</sup> Kedua, dibutuhkan manajemen madrasah yang bagus. Bukan rahasia lagi, banyak madrasah yang menerapkan manajemen "asal jalan". Kegiatan pendidikan tidak direncanakan dengan baik. Terkadang madrasah dikelola oleh keluarga-keluarga dengan kepemimpinan yang otoriter. Arus informasi tidak berjalan dengan baik. Di madrasah

---

<sup>39</sup> Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberadaan kepala madrasah yang baik sangat besar sumbangannya terhadap madrasah unggul. Tidak pernah ada madrasah unggul yang memiliki kepala madrasah yang bermutu rendah. Lihat, Moedjiarto,, h. 16-20.

tidak memiliki saluran untuk menyampaikan pendapat dan kritik, yang biasanya disebabkan budaya “*ewuh pakewuh*” (keengganan menyampaikan pendapat dan kritik karena segan pada pimpinan). Kondisi ini mempersulit madrasah untuk berkembang dengan baik. Sulit bagi madrasah dengan manajemen demikian untuk melakukan perubahan karena terbentur sikap otoriter pimpinan yang disegani. Terkadang program-program reformasi terhambat karena sikap pimpinan yang takut kehilangan pengaruh atau jabatan.

Ketiga, diperlukan SDM yang berkualitas. Secara umum kualitas sumber daya manusia di Indonesia sangat rendah. Mereka pada umumnya belum memenuhi standar sebagai guru bidang studi. Tidak jarang wawasan keilmuannya masih sempit. Madrasah-madrasah miskin, merekrut tenaga pendidikan seadanya. Jumlahnya pun kurang memadai karena mereka tidak memiliki dana cukup untuk menggaji guru. Sehingga seorang guru harus memegang beberapa mata pelajaran. Kekurangan SDM yang berkualitas akan mempersulit madrasah untuk melakukan reformasi pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan tenaga pendidikan yang berkualitas dan profesional.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Profesionalisme guru di Indonesia saat ini pada umumnya sangat rendah. Dalam dunia global sekarang, guru kita banyak yang kurang wawasan dan tertinggal pengetahuan. Akibatnya, kadar profesionalismenya menjadi terbatas. Bahkan, saat ini, banyak guru yang terjangkiti perasaan tidak berdaya karena mereka merasa kurang sanggup mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian cepat. Sehingga, tidak sedikit guru yang dihinggapi perasaan rendah diri berlebihan. Akibatnya, mereka tak bisa berfungsi secara profesional. Sudah barang tentu, dengan

Keempat, harus didukung dana dan fasilitas yang memadai. Secara umum madrasah di Indonesia tidak memiliki sarana pendidikan yang layak sebagai sebuah lembaga pendidikan. Bahkan, beberapa waktu lalu, dunia pendidikan harus dikejutkan robohnya gedung madrasah di beberapa daerah. Lokasi madrasah miskin sering ditemukan di pinggiran kota, di lingkungan yang kumuh, di gang-gang sempit, dan di tengah lingkungan masyarakat ekonomi lemah. Ini menyebabkan pendanaan dan penyediaan fasilitas pendidikan yang seadanya saja. Padahal, untuk menghasilkan sebuah sistem pendidikan dan out put (siswa) yang berkualitas, sarana pendidikan sangat menentukan, di samping faktor kualitas tenaga pendidikan. Bagi madrasah miskin, menyediakan gedung yang representatif, ruang UKS, sarana komputer, serta laboratorium (IPA dan bahasa) merupakan suatu hal yang mustahil bila tidak mendapatkan bantuan

---

kondisi seperti tersebut, produk-produk pendidikan yang bermutu tinggi sukar dihasilkan. Semua itu bisa terjadi karena penghasilan guru kita sampai saat ini kurang memadai, masih sangat rendah. Penghasilan guru kita relatif rendah bila dibandingkan para profesional lain pada umumnya. Atau dibandingkan dengan teman-teman profesional yang sama di negara manca. Kesejahteraan guru kita dibandingkan dengan guru di negara-negara Asia Tenggara saja sudah *njomplang*. Gaji guru baru di Indonesia tak akan lebih dari Rp 450 ribu atau atau USD 50 per bulan, sedangkan guru di ASEAN menerima gaji lebih dari 70 USD. Guru di Singapura, Malaysia, dan Brunai bahkan bisa menerima gaji lebih dari USD 100 per bulan ditambah aneka fasilitas. Di Jepang, begitu masuk, guru mendapatkan gaji sekitar 200 ribu yen atau sekitar Rp 17 juta tiap bulan. Guru di madrasah-madrasah ternama seperti Shokutoku Yono, Setagoya Gakuen, Tokyo Joshi Gakuen, Honan, Saitama Sakai, dan Showa Daiichi menerima gaji jauh lebih tinggi. Supriyoko, "Refleksi Hardiknas 2 Mei: Menggugat Komitmen Pemerintah" (Mei 02, 2003) <http://www.jawapos.co.id>

pemerintah, selain orang yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Madrasah miskin biasanya hanya bergantung pada dana dari siswa yang jumlahnya sangat kecil. Padahal madrasah bermutu itu mahal.

Pemberdayaan madrasah (*schools empowerment*) untuk menyediakan sistem pendidikan bermutu kepada masyarakat harus ditunjang empat aspek tersebut di atas, yaitu kepemimpinan instruksional, manajemen yang rapi, tenaga pendidikan profesional, serta dana dan fasilitas pendidikan yang memadai. Madrasah yang dikelola dengan tertib dan rapi akan memiliki kesempatan besar untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas. Jika empat aspek tersebut dimiliki oleh madrasah-madrasah swasta, madrasah-madrasah swasta akan dapat mengalahkan mutu madrasah-madrasah pemerintah.

Apabila madrasah memiliki empat aspek yang dibutuhkan dalam pemberdayaan madrasah, tidak tertutup kemungkinan madrasah tersebut akan menjadi madrasah efektif, yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Jika demikian, pemberdayaan madrasah akan melahirkan madrasah-madrasah yang otonom. Madrasah-madrasah otonom inilah yang menjadi ujung tombak reformasi pendidikan dalam kerangka desentralisasi pendidikan.

Otonomi pendidikan adalah suatu keniscayaan (*necessary*) karena otonomi akan menjadi daya dorong bagi madrasah-madrasah untuk meningkatkan kreativitas. Dalam otonomi pendidikan, yang mengimplikasikan persaingan, semua madrasah dituntut mampu bersikap mandiri, kreatif, dan inovatif agar dapat menyediakan sistem pendidikan berkualitas. Persaingan bukan berarti negatif karena persaingan mampu mendorong kepada kemajuan.

Namun demikian, otonomi pendidikan bukan berarti serta merta dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pertama, desentralisasi yang memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada otoritas daerah, akan memindahkan –borok-borok” pusat ke daerah. Penyelewengan kekuasaan oleh kelompok elit pusat akan berkembang di kalangan penguasa elit daerah. Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tumbuh subur di kalangan elit kekuasaan pusat akan beralih di daerah. Desentralisasi tanpa kontrol kuat oleh masyarakat tidak akan membawa perubahan dalam pendidikan di Indonesia karena pendidikan tetap dapat diselewengkan oleh segelintir orang untuk kepentingan mereka sehingga pendidikan akan tetap dikembali oleh penguasa sebagaimana yang selama ini terjadi.

Kedua, otonomi pendidikan akan memperlebar kesenjangan antara madrasah maju dan madrasah terbelakang. Masalah yang muncul dalam otonomi pendidikan adalah kesiapan madrasah-madrasah sebagai ujung tombak dari implementasi otonomi pendidikan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, ada dua jenis madrasah yang berbeda, yakni negeri dan swasta. Madrasah negeri adalah lembaga pendidikan yang didirikan dan dibiayai pemerintah. Sedangkan madrasah swasta adalah lembaga pendidikan yang didirikan dan dibiayai oleh swasta (masyarakat). Madrasah negeri dengan segala kelebihan yang dimiliki tidak sebanding dengan madrasah swasta. Dari segi wujud fisik dan sarana penunjang pendidikan, madrasah negeri jauh lebih memadai. Begitu pula dengan manajemen dan mutu pendidikannya. Sebab, kebutuhan pendidikan madrasah negeri dapat terpenuhi. Sedangkan madrasah swasta sebagian besar kondisinya memprihatinkan, yang tergolong madrasah miskin.

Otonomi pendidikan merupakan tantangan berat bagi madrasah-madrasah untuk dapat bersaing dengan madrasah-madrasah maju. Mekanisme pasar telah mewarnai pendidikan Indonesia. Fenomena mekanisme pasar dalam pendidikan dapat dilihat dari sikap orang tua calon siswa yang menjadikan madrasah-madrasah swasta unggulan dan madrasah-madrasah negeri teladan sebagai pilihan utama mereka. Sedangkan madrasah-madrasah yang terbelakang ditinggalkan oleh masyarakat. Mereka memilih madrasah-madrasah favorit dan teladan karena madrasah teladan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Kedisiplinan di madrasah teladan cukup tinggi sehingga pembelajaran berjalan efektif. Itu sebabnya ranking nilai siswa favorit sangat tinggi. Siswa dari madrasah favorit memiliki peluang besar melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi luar negeri (PTLN) dibandingkan dengan siswa yang berasal dari madrasah nonfavorit. Selain itu, orang tua siswa memasukkan putra putrinya ke madrasah favorit bertujuan menyiapkan masa depan anaknya yang lebih baik agar mampu menghadapi tantangan dan persaingan hidup.

Madrasah-madrasah miskin --yang sebagian besar adalah madrasah Islam termasuk madrasah-- yang kekurangan siswa akan terancam gulung tikar. Sedangkan madrasah-madrasah yang mempunyai kualitas tinggi akan terus eksis sehingga memacu madrasah lain untuk mengembangkan diri guna menjadikan pendidikan di Indonesia bisa bersaing di tingkat global. Apalagi, era globalisasi yang sudah merasuk ke bidang pendidikan, di mana asing diperbolehkan mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia; sehingga persaingan madrasah-madrasah miskin tidak hanya di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga internasional. Hanya madrasah-madrasah yang berkualitas tinggi yang dapat menjawab tantangan globalisasi.

## BAB IV

### MEMBANGUN MUTU MADRASAH

#### A. Mengapa perlu Membangun Mutu?

Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan titik strategis dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu pilar pembangunan bagi suatu bangsa melalui pengembangan potensi individu. Karenanya, dapat dikatakan bahwa masa depan suatu bangsa terletak pada mutu dan kualitas pendidikan yang dilaksanakan.

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pendidikan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya (1) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (2) persaingan global yang semakin ketat, dan (3) kesadaran masyarakat (orang tua siswa) akan pendidikan yang berkualitas semakin tinggi.

Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan titik strategis dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu pilar pembangunan bagi suatu bangsa melalui pengembangan potensi individu. Karenanya, dapat dikatakan bahwa masa depan suatu bangsa terletak pada mutu dan kualitas pendidikan yang dilaksanakan.

Persaingan global dalam era pasar bebas, menyebabkan adanya kompetisi yang sangat ketat. Untuk dapat berpartisipasi dalam persaingan global tersebut, seseorang dituntut memiliki kemampuan yang lebih/berkualitas, yaitu memiliki kecakapan

berkomunikasi, memiliki kemampuan menjalin kerjasama, memiliki keterampilan atau *skill* tertentu, individu yang ulet, disiplin, beretos kerja yang tinggi, pandai menangkap peluang, dan memiliki semangat untuk maju.

Kita semua tahu dan merasakan makna madrasah berkualitas ketika kita mengalami hal itu. Akan tetapi, menggambarkan dan menjelaskan madrasah bermutu apalagi membangunnya adalah tugas yang lebih sulit. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita biasanya menjadikan mutu sebagai jaminan, terutama ketika secara teratur ketika memberikan layanan mutu dalam pendidikan. Untuk itu, perlu pemahaman tentang “membangun madrasah yang berkualitas”. David Hopkins berupaya menggambarkan cara memahami apa yang dimaksud dengan “membangun madrasah berkualitas”. Arti yang lebih umum tentang “membangun madrasah yang berkualitas” adalah berkaitan dengan usaha-usaha untuk membuat madrasah sebagai tempat yang lebih baik bagi peserta didik untuk belajar. John Gray menggambarkan bahwa upaya membangun madrasah yang berkualitas adalah dengan meningkatkan hasil belajar peserta didik secara terus menerus dari tahun ke tahun. Atau dengan kata lain meningkatkan efektivitas madrasah dari waktu ke waktu. Sebaliknya, Peter Mortimore menggambarkan bahwa “membangun madrasah yang berkualitas” adalah sebagai proses meningkatkan cara bagaimana madrasah mengatur, mempromosikan dan mendukung pembelajaran. Hal ini termasuk juga merubah tujuan, harapan organisasi, cara belajar, metode pengajaran, dan budaya organisasi.

Dengan demikian membangun madrasah yang berkualitas bagi Hopkin adalah proses menjadi madrasah lebih baik sebagai tempat belajar bagi siswa. Sebagaimana Hopkins, Gray menggambarkannya sebagai proses secara terus menerus untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Mortimore lebih menekankan pada proses meningkatkan pembelajaran yang ditunjang dengan perumusan tujuan, harapan, dan budaya organisasi. Bagi Mortimore “madrasah yang berkualitas” tidak cukup dengan nilai dan prestasi siswa yang bagus tetapi “madrasah yang berkualitas” harus direncanakan, disadari melalui perumusan visi dan perencanaan madrasah, tetapi juga harus didukung dengan “budaya madrasah yang berkualitas”. Budaya madrasah merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk siswa menjadi manusia yang penuh optimis, berani, tampil, berperilaku kooperatif, dan kecakapan personal dan akademik.

Roland Barth mengidentifikasi dua pendekatan dalam “membangun madrasah yang berkualitas”. Pertama pendekatan peningkatan madrasah dari dalam, yang Bath sebut sebagai “proliferasi daftar” karena berupa daftar karakteristik efektivitas madrasah, guru, dan peserta didik, daftar kompetensi minimum, daftar peraturan, indikator kinerja dan sebagainya. Bath berargumen bahwa apa yang berbahaya dan merugikan adalah pandangan dan pola pikir seseorang. Yang melekat dalam pandangan ini adalah asumsi tentang orang-orang, bagaimana mereka merasa, bagaimana mereka harus bersikap dan tentang bagaimana organisasi harus bekerja. Bath kemudian berpendapat tentang dasar untuk reformasi madrasah adalah ketrampilan, aspirasi, dan energi orang-orang di sekitar madrasah, seperti kepala madrasah, guru, dan orang tua. Pendekatan kedua adalah melalui

”komunitas pelajar” berupa seperangkat asumsi yang berbeda secara radikal, sebagaimana asumsi berikut ini:

1. Madrasah memiliki kapasitas untuk maju, jika dikondisikan dengan benar. Tanggung jawab orang-orang di luar madrasah adalah membantu ketersediaan kondisi ini untuk madrasah.
2. Ketika kebutuhan dan tujuan yang ada, ketika kondisi benar, orang-orang dewasa dan siswa sama-sama belajar, dan masing-masing memberikan kontribusi untuk saling belajar.
3. Apa yang perlu ditingkatkan tentang madrasah adalah budaya, kualitas hubungan interpersonal, sifat dan kualitas pengalaman belajar
4. Membangun madrasah yang berkualitas dan reformasi madrasah pada dasarnya adalah: Membangun madrasah atau reformasi madrasah adalah sebuah usaha untuk menentukan dan memberikan kondisi dimana orang-orang dewasa dan siswa akan mempromosikan dan mempertahankan pembelajaran di antara mereka.

Semua yang ada di dunia ini termasuk masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan secara terus menerus dan tidak ada yang bisa menghindarinya, termasuk madrasah. Perubahan di masyarakat yang berdampak pada perubahan di madrasah adalah modernisasi di masyarakat.

Agar madrasah dapat merespon perubahan di masyarakat bahkan menjadi pendorong bagi kemajuan masyarakat, madrasah harus mampu mewujudkan peran dan fungsinya dalam transformasi sosial, di mana pendidikan mampu mencetak individu-individu yang kreatif. Pendidikan transformatif adalah pendidikan yang dialogis. Artinya, proses pendidikan merupakan

proses yang membebaskan dan memerdekakan individu sehingga mewujudkan proses berpikir yang kreatif dan menginginkan perubahan. Menurut Paulo Freire pendidikan yang mampu mencetak individu kreatif adalah pendidikan pembebasan dan humanis yang mengembangkan kreativitas manusia.

Madrasah tradisional biasanya hanya memosisikan dalam transmisi nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan kebudayaan pada saat itu dan memandang individu adalah obyek perubahan sosial. Individu tersebut mempelajari peranan yang baru di dalam kehidupan sosial yang berubah. Madrasah adalah tempat yang memperoleh legitimasinya dari kehidupan masyarakat atau pemerintah yang mempunyai individu berperan pasif dan reaktif dalam perubahan sosial. Sebaliknya, madrasah yang transformatif akan mendorong semua komponen berperan emansipatif dan partisipatif dalam perubahan sosial. Dalam merespon perubahan sosial secara emansipatif dan partisipatif madrasah perlu memperhatikan program-program dalam pengembangan diri agar sesuai dengan perkembangannya. Secara garis besar program-program membangun madrasah yang berkualitas adalah:

1. Fokus pada prestasi dengan fokus pada peningkatan hasil belajar dan prestasi siswa dalam arti lebih luas dari pada hanya sekedar hasil ujian.
2. Memberdayakan dalam aspirasi dengan secara inten melibatkan pemangku kepentingan madrasah dalam proses perubahan dengan ketrampilan belajar dan pelaku perubahan yang akan meningkatkan tingkat harapan dan keyakinan seluruh komunitas pendidikan.

3. Melakukan kajian dan telaah teori yang mendasarkan pada strategi dan unsur-unsur program yang jitu dan efektif dalam membangun madrasah yang berkualitas
4. Konteks spesifik, yaitu memperhatikan fitur unik dari situasi madrasah dan membangun strategi berdasarkan analisis dan konteks khusus
5. Peningkatan kapasitas yang bertujuan membangun kondisi organisasi yang mendukung perbaikan madrasah secara terus menerus.
6. Dorongan inquiri dengan menghargai refleksi terhadap berbagai pengalaman dipandang secara integral dan sebagai proses untuk bertahan.
7. Orientasi implementasi dengan memberikan perhatian secara langsung pada kualitas belajar siswa dan praktik-praktik di kelas.
8. Strategi dan cara intervensi yang dirancang untuk meningkatkan situasi madrasah atau sistem dan mengambil pandangan jangka menengah dari manajemen perubahan serta merencanakan dan memprioritaskan pengembangan-pengembangan.
9. Dukungan eksternal dengan membangun lembaga.
10. Sistemik dengan menerima realitas konteks kebijakan dari pusat, tetapi juga menyadari kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan eksternal untuk tujuan internal dan menggali kreativitas dan sinergi yang ada dalam sistem.

## **B. Apa Konsep Mutu Pendidikan?**

Sulit untuk mendefinisikan makna "mutu" makna "mutu" juga 'sulit dipahami'. Menurut Zheng, G., Cai, Y., & Ma, S., mutu

merupakan konsep yang ambigu.<sup>41</sup> –Mutu” telah didefinisikan dengan berbagai perspektif dan orientasi. Menurut Danny Meirawan, ada dua konsep tentang mutu atau quality, yaitu konsep klasik yang bersifat absolut dan konsep modern yang bersifat relative.<sup>42</sup> Dalam konsep klasik, mutu suatu produk ditentukan oleh produsen sedangkan dalam konsep modern mutu ditentukan oleh konsumen atau tergantung pada penilaian konsumen.

Dalam konsep klasik ini mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat –baik” nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga. Adapun dalam konsep relatif mutu menunjukkan kepada sifat suatu produk apakah memuaskan konsumen atau tidak. Menurut definisi klasik, yang dikembangkan oleh Harvey dan Green’s (1993), konsep mutu dibedakan pada lima kategori sebagai mana berikut:

- (1) Kualitas sebagai pengecualian: yaitu konsep mutu secara tradisional yang berhubungan dengan arti'unggul', termasuk tiga gagasan: (a) gagasan tradisional tentang kualitas sebagai ciri khas, (b) pandangan tentang kualitas yang terkandung dalam keunggulan, (c) pandangan yang lebih lemah tentang

---

<sup>41</sup> (Gaoming Zheng , Yuzhuo Cai & Shaozhuang Ma2017). *Towards an analytical framework for understanding the development of a quality assurance system in an international joint programme*. *European Journal of Higher Education*, 7(3), 243–260. doi:10.1080/21568235.2017.1290877 ).

<sup>42</sup> Danny Meirawan, “Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan Secara Nasional dalam Otonomi Pendidikan” dalam *Educationist*, Vol. IV No. 2 Juli 2010, h. 127.

- pengecualian kualitas, seperti melewati serangkaian standar yang disyaratkan / minimum.
- (2) Kualitas sebagai kesempurnaan: Konsep yang berkonsentrasi pada proses. Konsep kesempurnaanterkait dengan ide-ide “tidak ada cacat” (*zero defects*) dan memperbaiki keadaan pertama kali. Hal ini terikat dengan gagasan budaya mutu, di mana semua orang di organisasi, bertanggung jawab atas kualitas dan bukan hanya pengontrol kualitas.
  - (3) Kualitas sebagai kesesuaian untuk tujuan (FFP/ *fitness for purpose*): Kualitas dinilai sejauh mana a produk atau layanan memenuhi tujuan yang dinyatakan. Tujuannya mungkin (1) FFP/ *fitness for purpose* 1: berdasarkan spesifikasi pelanggan, ditentukan oleh pelanggan, atau (2) FFP2: misi lembaga, ditentukan oleh lembaga atau badan profesional eksternal.
  - (4) Kualitas sebagai nilai untuk uang atau *value for money*: Kualitas disamakan dengan tingkat spesifikasi dan terkait dengan biaya. Gagasan ini menilai kualitas dengan pengembalian investasi atau pengeluaran.
  - (5) Kualitas sebagai transformasi: Gagasan melihat kualitas sebagai proses transformatif, yang menambah nilai bagi siswa melalui pengalaman belajar mereka. Srikanthan dan Dalrymple (2003) berpendapat bahwa interpretasi kelima Harvey dan Green kualitas, kualitas sebagai ‘transformasi’ adalah konsep meta-kualitas, yang mendukung yang lain yang, dengan demikian dikecualikan dalam kategorisasi mereka. Sebenarnya Harvey dan Knight (1996) juga menyatakan bahwa empat konsep kualitas lainnya agak mungkin operasionalisasi proses transformatif dari pada tujuan itu sendiri. Jadi, dalam kategorisasi kami mengenai

konsep kualitas, kami hanya mempertimbangkan empat kategori kualitas pertama yang ditentukan oleh Harvey dan Green (1993).

Selain itu, pemahaman Harvey dan Green (1993) tentang kualitas mencakup dua orientasi: 'orientasi hasil' dan 'orientasi proses'. Baik kualitas prihatin dengan hasil, produk / layanan akhir, atau proses menghasilkan ini (Harvey dan Green 1993; Sahney, Banwet, dan Karunes 2004).

### **C. SNP sebagai Acuan Mutu Pendidikan**

Satuan pendidikan (sekolah/madrasah) dikatakan bermutu apabila satuan pendidikan tersebut telah memenuhi kriteria minimal dari setiap komponen SNP. Fokus peningkatan mutu pendidikan harus diarahkan pada bagaimana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dengan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal, maka berdampak pada pencapaian atau pemenuhan kriteria minimal pada komponen standar kompetensi lulusan. Menurut Mardapi (2003, p. 8), usaha peningkatan mutu pendidikan (tercapainya standar mutu kompetensi lulusan) dapat ditempuh melalui peningkatan mutu pembelajaran dan mutu sistem penilaian. Dengan kata lain, meningkatnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan.

Secara historis, sekolah merupakan lembaga pendidikan modern yang dikembangkan untuk membantu keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seseorang. Dalam konteks ini, sekolah diharapkan dapat menyediakan

layanan pendidikan yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Dalam perkembangannya, fungsi sekolah dan kompetensi (kemampuan) lulusan yang dihasilkannya dipersepsi dan dipahami secara beragam oleh berbagai pihak.

Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena 1) meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada sekolah, 2) menjamin mutu lulusannya, 3) bekerja lebih professional, dan 4) meningkatkan persaingan yang ini berarti bahwa lingkungan pendidikan menjadi inspirasi, dan proses kehidupan bermutu. Namun dalam kenyataannya, mutu pendidikan masih jauh ketinggalan dibandingkan dunia bisnis. Oleh karena itu, pengukuran mutu dan penjaminannya menjadi kebutuhan dalam mempertanggungjawabkan fungsi dan proses proses pencapaian pendidikan bermutu. Hasil pemetaan mutu pendidikan dianalisis menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah.<sup>43</sup>

Selanjutnya berdasarkan pada teori quality assurance mencakup quality designs and quality control, maka efektivitasnya juga dipengaruhi dengan tools quality assurance yang digunakan, atau dengan kata lain dalam implementasinya

---

<sup>43</sup> Bambang Ismanto, "Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Volume 5 Nomor 1, Mei 2018)

sistem penjaminan mutu internal sekolah perlu menggunakan tools quality assurance itu sendiri dimana dari suatu organisasi.<sup>44</sup>

#### **D. Pemenuhan Standar Acuan Mutu oleh Satuan/Program Pendidikan.**

Pemenuhan standar acuan mutu berupa pencapaian SPM dan SNP merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Pemenuhan standar acuan mutu pendidikan pada dasarnya menjadi tanggung jawab satuan/program pendidikan. Untuk satuan/program pendidikan yang belum memiliki kemampuan untuk melakukan pemenuhan standar secara mandiri, pemenuhan standarnya menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan/program pendidikan. Pada saat satuan/program pendidikan telah memenuhi SNP, maka diharapkan tetap melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

#### **E. Program Peningkatan Mutu Madrasah dalam Memenuhi SNP di Jawa Timur**

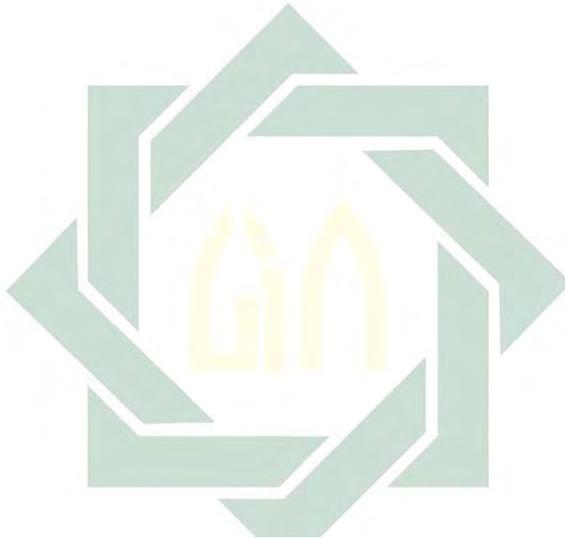
Program peningkatan mutu madrasah berlokasi di 12 kabupaten yang dijadikan sebagai sasaran program peningkatan mutu madrasah, yaitu kabupaten Jember, Bangkalan, Malang, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Nganjuk, Trenggalek, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan dengan 267 madrasah, yaitu 113 madrasah Ibtidaiyyah, 125 madrasah tsanawiyah, dan 29

---

<sup>44</sup> Jaja Jahari, "Pengukuran Kinerja Mutu Sekolah Berbasis Balanced Scorecard (BSC)" *Jurnal Administrasi Pendidikan* Vol.XXV No.1 April 2018, h. 1.

madrasah aliyah dengan 22 madrasah negeri. MIN sebanyak 9 (3,4%), MTsN sebanyak 12 (4.5%), dan MAN ada 2 (0,8%).

Dari 267 madrasah peneliti mengambil sampel dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh madrasah sampling sebagai berikut:



No	Nama Madrasah	No	Nama Madrasah	No	Nama Madrasah
1	MA MAMBAUL HIKAM BURNEH	36	MTs SUNAN GUNUNG JATI KATEMAS	71	MTs AL IRSYAD WONOSARI SINE
2	MTs AL IBROHIMY GALIS	37	MTs AL HIKMAH KLITIH PLANDAAN	72	MTs MA'HADUL MUTA'ALLIMIN WIDODAREN
3	MTs NURUL AMANAH TANAH MERAH	38	MTs DARUL ULUM KEPUHDOKO TEMBELANG	73	MTs YASPI SINE
4	MTs AL MA'ARIF BANGKALAN	39	MTs RAHMAT SAID PETERONGAN	74	MTs MUHAMMADIYAH TEMPURREJO WIDODAREN
5	MTs DARUL MANHAN AROSBAYA	40	MTs BAHRUL ULUM GENUKWATU NGORO	75	MTs DARUL HIKMAH NGOMPAK NGRAMBE
6	MTs AN NAMIRAH TANAH MERAH	41	MTs MAMBAUL ULUM COROGO JOGOROTO	76	MTs GUPPI PADAS NGAWI
7	MTs RAUDLATUL ULUM KLAMPIS	42	MTs UMAR ZAHID SEMELO	77	MTs PERSIAPAN JOGOROGO
8	MI RAUDLATUL ULUM GALIS	43	MI AL MURSYIDAH MOJOAGUNG	78	MI ISLAMIYAH I MAJASEM KENDAL
9	MI	44	MI	79	MI PSM BENDO

	RAUDLATUS SIBYAN KONANG		MIDANUTTA'LIM I JOGOROTO		BARAT PARON
10	MI DARUSSALAM MODUNG	45	MI MUJAHIDIN	80	MI GUPPI NGANCAR PITU
11	MI AN- NAFI'YAH GEGER	46	MI GHOZALIYAH JOGOROTO	81	MI ISLAMIYAH KEDUNG JAMBU PARON
12	MI HIDAYATUL ULUM GEGER	47	MI NURUL IMAN DIWEK	82	MI PSM SULURSEWU PARON
13	MA MA'ARIF AMBULU	48	MI AL IHSAN KALIKEJAMBON TEMBELANG	83	MIN GELUNG PARON
14	MA MIFTAHUL ULUM SUREN LEDOKOMBO	49	MI ISLAMIYAH NGORO	84	MI PSM AL AMIN SUMBERAGUNG PARON
15	MTs BANIY KHOLIEL BANGSALSARI	50	MI TARBIYATUNNAS YIIN 2 DIWEK	85	MA MA'ARIF PACITAN
16	MTs WALISONGO UMBULSARI	51	MI MIFTAHUL ULUM JOGOROTO	86	MA PEMBANGUNAN ARJOSARI
17	MTs MIFTAHUL ULUM AJUNG	52	MI FATHUL HUDA GROBOGAN MOJOWARNO	87	MTs MUHAMMADIYAH 2 TULAKAN
18	MTsN UMBULSARI	53	MI DARUL ULUM NGUMPUL JOGOROTO	88	MTs MA'ARIF TULAKAN
19	MTs AL HIDAYAH MANGLI KALIWATES	54	MA SUNAN KALIJOGO MOJO	89	MTs MUHAMMADIYAH 1 TEGALOMBO

20	MTsN ARJASA	55	MTs RAUDLATUT THALABAH NGADILUWIH	90	MTs PONDOK TREMAS ARJOSARI
21	MTs AL AMIEN AMBULU	56	MTs MASHLAHIYAH BADAS	91	MTs MUHAMMADIYAH NAWANGAN
22	MTs WAHID HASYIM BALUNG	57	MTs AL FATAH BADAS	92	MTsN KEBONAGUNG
23	MI MIFTAHUL ULUM BALUNG	58	MTs DIPONEGORO SUMBERJO KANDAT	93	MTs MUHAMMADIYAH 8 KASIHAN TEGALOMBO
24	MIMA 38 HIDAYATUL MUBTADIIN WULUHAN	59	MTs SUNAN GUNUNG JATI GURAH	94	MTs MA'ARIF SIDOMULYO KEBONAGUNG
25	MIMA 32 SALAFIYAH SYAFIYAH	60	MTs ABDULLOH MOJO	95	MIS MUHAMMADIYAH NGUMBUL TULAKAN
26	MIS MA 22 AL IKLHAS	61	MTs HASAN MUCHYI PAGU	96	MIS MUHAMMADIYAH BABAKAN TULAKAN
27	MI ASSALAM PLUS JOMBANG JEMBER	62	MTs AL HIKMAH PURWOASRI	97	MIN SIDOHARJO PACITAN
28	MI 35 NURUL ULUM AMBULU	63	MI ROUDLOTUT THOLABAH MOJO	98	MA AL MUKARROM KAUMAN
29	MIS TARBIYATUL ISLAMIYAH	64	MI MAFATIHL HUDA MOJO	99	MTs AL HASANAH SLALIUNG

	WULUHAN				
30	MA MUALLIMIN MUALLIMAT	65	MI ISLAMIYAH PUNCU	100	MTs AL AZHAR SAMPUNG
31	MA DARUL FAIZIN	66	MI ISLAMIYAH SUKOHARJO PLEMAHAN	101	MTs ASSALAM SOOKO
32	MTs NURUL QUR'AN JOGOROTO	67	MI MIFTAHUL HUDA NGRECO KANDAT	102	MTs PGRI NGRAYUN
33	MTs AR RAHMAN DIWEK	68	MI BUSTANUL ULUM BADAS	103	MTs MA'ARIF MUNGGUNG PULUNG
34	MTs BABUSSALAM MOJOAGUNG	69	MI AL FALAH PAGU WATES	104	MI MA'ARIF NGRUPIT JENENGAN
35	MTs AL MA'ARIF SUMOBITO	70	MAN PARON NGAWI	105	MI MA'ARIF PATIHAN WETAN BABADAN
				106	MI MA'ARIF MAYAK PONOROGO

Data program ini diperoleh pada tahun 2011 melalui observasi, wawancara dan angket. Teknik pengumpulan data dengan observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait perilaku pihak-pihak yang berkepentingan di madrasah sasaran MEDP (*Madrasah education development program*), proses kerja dalam realisasi Program, seperti proses pembangunan, kegiatan pelatihan, dan pembelajaran, serta benda-benda, barang, serta bangunan madrasah dari hasil program MEDP.

## BAB V

### **BEST PRACTICES COMMUNITY BASED EDUCATION DALAM PROGRAM PENINGKATAN MUTU MADRASAH**

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat sekarang ini telah mempengaruhi struktur ekonomi dan demografi, pekerjaan dan keterampilan kerja yang seluruhnya menghasilkan kecenderungan-kecenderungan dan tantangan-tantangan yang juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pengaruh ini adalah: (i) orientasi arti penting nilai tambah; (ii) perubahan nilai-nilai sosial; dan (iii) efek proses globalisasi.

Tantangan pertama adalah orientasi mengenai pentingnya nilai tambah adalah keharusan untuk menyempurnakan tingkat produktifitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Ini artinya melanjutkan dan meningkatkan pembangunan semua aspek kehidupan sosial. Orientasi ke arah nilai tambah untuk meningkatkan kekuatan daya saing rakyat Indonesia hanya bisa dicapai dengan kemajuan kualitas sumber daya manusianya. Termasuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengadaptasinya ke dalam budaya industri nasional.

Tantangan kedua adalah proses transformasi dari komunitas pertanian ke komunitas industri. Ini merupakan salah satu indikator pembangunan nasional berkelanjutan. Transformasi yang terjadi sebagai akibat dari kehadiran komunitas industri ditunjukkan dengan ragam pekerjaan yang menuntut keterampilan dan keahlian inovatif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterampilan dan keahlian yang dituntut oleh

pekerjaan tersebut akan menimbulkan perubahan struktur sosial yang akan memicu perubahan sistem nilai. Perubahan-perubahan ini akan menciptakan konflik antar kelompok yang mendukung dan ingin melanjutkan nilai-nilai tradisional sistem pertanian dan kelompok-kelompok yang mengiginkan perubahan dan penerimaan nilai-nilai komunitas industri. Meskipun secara tradisional di setiap budaya terdapat kemampuan dan mekanisme untuk memecahkan persoalan-persoalan internal, metode pemecahan konflik ini harus dipertimbangkan matang-matang.

Tantangan ketiga adalah proses globalisasi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Globalisasi sedang terjadi di semua segi kehidupan yang akan mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi. Ini juga dipengaruhi oleh budaya internasional. Dengan globalisasi, persaingan ketat akan terjadi di antara negara-negara dalam bidang pengetahuan dan teknologi tetapi khususnya dalam bidang ekonomi. Hanya negara dengan keunggulan ekonomi dan teknologi yang bisa mendapat manfaat dari globalisasi. Kekuatan dasar ekonomi dan teknologi hanya bisa dicapai dengan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Untuk menyediakan sumber daya manusia berkualitas, pendidikan memiliki peran sangat penting. Konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan menuntut sistem pendidikan yang rasional, inovatif, kreatif, unggul dan reaktif terhadap perubahan. Sistem pendidikan semacam itu harus diwujudkan bukan hanya di tingkat birokrat organisasi pendidikan, tetapi yang lebih penting harus diwujudkan di tingkat mikro organisasi madrasah. Madrasah harus mampu terus meningkatkan performa mereka dalam agenda tersebut untuk mengelola dan menyediakan layanan pendidikan yang demokratis, adil, dan berkesinambungan terhadap kebutuhan

masyarakat akan SDM berkualitas. SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang memiliki perilaku kreatif, pemikir inovatif, cerdas, memiliki karakter santun, memiliki orientasi ke depan dan nasionalisme untuk terus mencoba mengembangkan semua aspek kehidupan agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks pengembangan sistem pendidikan nasional tersebut, seperti ditetapkan dalam UU No. 20/2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah mendorong madrasah negeri dan swasta yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi madrasah yang bisa menghasilkan lulusan yang diakui sejajar dengan sekolah-sekolah di seluruh dunia.

Salah satu langkah kongkrit peningkatan mutu pendidikan adalah pemberdayaan sekolah agar mampu berperan sebagai subyek penyelenggara sekolah agar mampu berperan sebagai subyek penyelenggara pendidikan dengan menyajikan pendidikan yang bermutu. Sekolah diberi kewenangan dan peran yang luas untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisinya masing-masing dengan tetap mengacu pada standar minimal yang ditetapkan pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Untuk pemenuhan standar nasional pendidikan di madrasah Kemendag RI telah bekerja sama dengan ADB melalui proyek MEDP (*Madrasah Education Development Project*) untuk menjembatani ketimpangan kualitas pendidikan antar madrasah, antara madrasah dan sekolah, dan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan kualitas tidak terjadi lagi.

Program pengembangan madrasah di lingkungan Kemenag RI di Jawa Timur diwujudkan untuk member bantuan kepada beberapa madrasah di tiga provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah,

Jawa Timur, dan Makasar. Bantuan ADB diperuntukkan empat komponen, yaitu Peningkatan Profesionalisme Guru; Peningkatan Sumber Belajar dan Fasilitas Pembelajaran; Peningkatan Efisiensi Internal; dan Tata Kelola, Manajemen, dan Keberlanjutan Madrasah Sasaran MEDP.

Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap madrasah sasaran MEDP akan digambarkan berdasarkan ketentuan berikut:

### **1. Peningkatan Profesionalisme Guru**

Jumlah seluruh madrasah sasaran MEDP di Jawa Timur sebanyak 267 madrasah; 113 madrasah Ibtidaiyyah, 125 madrasah tsanawiyah, dan 29 madrasah aliyah dengan 22 madrasah negeri. MIN sebanyak 9 (3,4%), MTsN sebanyak 12 (4.5%), dan MAN ada 2 (0,8%).

Berdasarkan data yang masuk dari hasil monev tahap I profil status guru madrasah sasaran MEDP mayoritas adalah guru tetap yayasan), mayoritas guru PNS adalah dari guru madrasah negeri. Jumlah guru yang laki-laki baik PNS maupun guru tetap lebih tinggi dari pada guru perempuan.

Ditinjau dari kualifikasi akademik, tingkat pendidikan guru madrasah sasaran MEDP terjadi peningkatan. terdapat guru yang berijazah S-2 sebanyak 149 orang, berijazah S-1 sebanyak 2606 orang, sedangkan yang berijazah Diploma atau di bawahnya sebanyak 341 orang. Dan yang masih berijazah diplomah atau SMA/Aliyah telah mengikuti program kualifikasi S-1 sebanyak 324 orang. Berikut ini adalah tabel profil Guru Madrasah Sasaran MEDP,

**Tabel I**  
**Profil Guru Madrasah Sasaran MEDP**

No	Nama Kabupaten	Guru PNS		Guru Tetap		Guru Tidak Tetap		Diploma		Guru S1		Pend. S2		Program Kualifikasi	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	JOMBANG	22	13	179	121	28	26	37	21	196	129	13	2	41	34
2	BOJONEGORO	8	4	89	67	85	43	21	12	122	84	6	1	34	13
3	JEMBER	29	30	150	110	38	23	25	7	127	95	17	4	24	13
4	LAMONGAN	27	22	436	227	31	15	47	15	367	227	27	7	31	17
5	MALANG	0	1	19	8	1	0	0	0	14	8	2	0	1	0
6	NGANJUK	46	31	139	120	32	36	17	14	156	135	13	4	15	12
7	NGAWI	17	26	10	15	17	14	8	2	31	56	7	4	1	-
8	TRENGGALEK	44	39	130	104	27	19	16	20	150	134	14	1	17	9
9	KEDIRI	6	4	137	147	34	24	19	13	127	160	6	4	22	20
10	BANGKALAN	1	5	12	8	23	39	1	2	15	38	2	1	0	1
11	PACITAN	31	28	85	66	12	13	16	12	76	68	7	6	5	3
12	PONOROGO	2	4	91	56	3	1	9	7	52	39	1	0	5	6
	JUMLAH	233	207	1477	1049	331	253	216	125	1433	1173	115	34	196	128
	∑	440		2526		584		341		2606		149		324	
				3550				341		2606		149		324	

*Sumber data diambil dari realisasi Program MEDP di Jawa Timur*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Karena sebagian besar Madrasah sasaran MEDP adalah Madrasah swasta maka Jumlah guru PNS masih sedikit, tidak sebanyak guru tetap dan tidak tetap.
- 2) Keterwakilan gender dari segi tenaga pendidik lebih dari 30% dari jumlah seluruh tenaga pendidik di Madrasah sasaran MEDP.
- 3) Sebagian besar tenaga pendidik di Madrasah sasaran MEDP sudah berkualifikasi S1, meski ada yang sudah S-2 tetapi masih ada beberapa tenaga pendidik yang masih berkualifikasi

Diploma walaupun mereka mengajar pada jenjang MTs dan MA

- 4) Untuk meningkatkan kualifikasi akademik Tenaga Pendidik di Madrasah sasaran MEDP maka diadakan program Kualifikasi S1, hal ini dilakukan untuk memenuhi standar minimal kompetensi akademik guru adalah S1. Jumlah guru yang mengikuti kualifikasi akademik S1 pada masing-masing Kabupaten tidak sama tergantung pada besarnya jumlah guru yang belum berkualifikasi S1. Berdasarkan data, guru yang banyak mengikuti program kualifikasi adalah Kabupaten Jombang.
- 5) Kualifikasi guru di madrasah sasaran MEDP 86,2% guru S1, 9,6% guru diploma, dan 4,2% S2.

**a. KKG/MGMP**

Peningkatan Profesionalisme guru di madrasah sasaran MEDP Jawa Timur dalam bentuk KKG/MGMP beragam di antara 12 kabupaten. Yang tertinggi di Kabupaten Lamongan di mana 90% madrasah MEDP melaksanakan program KKG/MGMP. Dalam realisasi Program KKG/MGMP, terdapat beberapa model. Pertama, pelaksanaan KKG/MGMP antar madrasah Kegiatan KKG/MGMP dalam satu tahun minimal 1 kali dan tertinggi 15 kali. Pelaksanaan KKG/MGMP di 12 kabupaten sasaran MEDP telah melahirkan organisasi KKG/MGMP dengan pengurusnya di tingkat kecamatan dan kabupaten meskipun belum ada pengangkatan secara resmi dari kemenag kabupaten. Realisasi KKG/MGMP telah melahirkan organisasi KKG/MGMP tingkat kabupaten seperti yang

telah dirintis di kabupaten Nganjuk, Bangkalan, dan Jember. Berikut ini tabel realisasi block gran KKG/MGMP

**Tabel 2**  
**Realisasi Program KKG/MGMP**

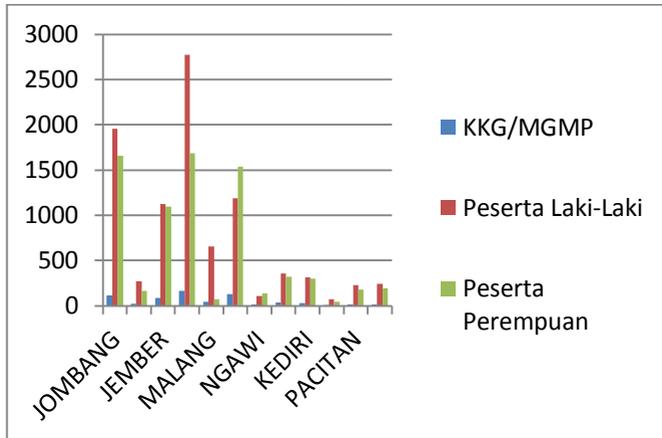
No	Nama Kabupaten	Jumlah Kegiatan	Peserta		Pagu Program (Rp)
			Lk	Pr	
1	JOMBANG	114	1955	1654	339,328,136
2	BOJONEGORO	19	270	165	162,684,000
3	JEMBER	89	1125	1096	362,552,500
4	LAMONGAN	166	2777	1688	482,484,600
5	MALANG	44	654	70	226,746,250
6	NGANJUK	126	1187	1538	421,380,000
7	NGAWI	13	107	138	66,760,000
8	TRENGGALEK	38	354	319	175,789,000
9	KEDIRI	26	310	299	198,216,000
10	BANGKALAN	8	68	40	18,000,000
11	PACITAN	16	229	179	124,531,680
12	PONOROGO	16	242	190	79970000
JUMLAH		675	9278	7376	0
Persentase			56%	44%	0

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Tiap Kabupaten telah merealisasikan program peningkatan mutu guru melalui KKG/MGMP, meski ada beberapa Madrasah yang sangat aktif (dalam 1 tahun hingga 15 kali kegiatan) dan ada yang kurang aktif (hanya 1-2 kegiatan). Kabupaten yang paling aktif adalah Kabupaten Lamongan.
- 2) Keterwakilan perempuan dalam program peningkatan mutu guru melalui KKG/MGMP Madrasah sasaran MEDP mencapai 44%

- 3) Data program peningkatan mutu guru melalui KKG/MGMP Madrasah sasaran MEDP dapat disajikan dalam bentuk grafik sbb:

**Grafik 1**  
**Realisasi Program KKG/MGMP**



#### b. Pelatihan Guru

Melalui pelatihan guru, MEDP telah membantu mengembangkan kelompok belajar guru untuk madrasah tingkat dasar dan lanjutan pertama yang menyediakan forum bagi guru untuk menolong satu sama lain dalam memecahkan persoalan belajar dan mengajar. Pelaksanaan kegiatan pelatihan guru di madrasah sasaran MEDP bervariasi.

- 1) Pelatihan guru yang dilaksanakan di satu madrasah sasaran MEDP dengan mengun guru di madrasah lain. Model ini secara tidak langsung menyebabkan pengimbasan peningkatan mutu guru ke madrasah lain

yang bukan sasaran MEDP sehingga Program MEDP tidak hanya dirasakan bagi guru-guru madrasah MEDP, tetapi juga guru dari madrasah lain.

- 2) Pelatihan guru yang dilaksanakan berama-sama antara madrasah sasaran MEDP.

Bantuan blok skala kecil diberikan setiap tahun pada madrasah-madrasah yang berlokasi secara sentral untuk membentuk dan mendukung kelompok-kelompok belajar guru. Berikut adalah data tentang realisasi Program pelatihan guru di madrasah sasaran MEDP:

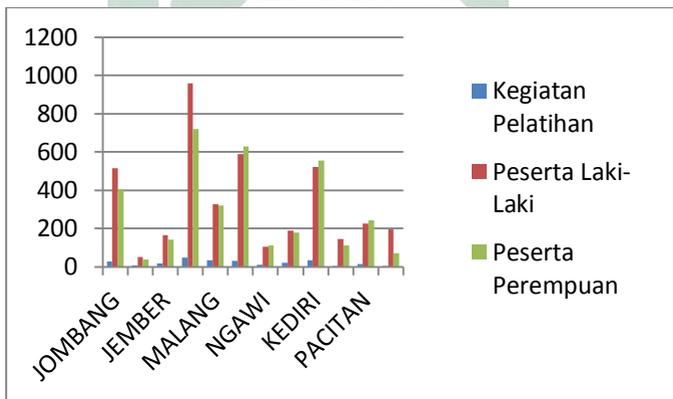
**Tabel 3**  
**Pelaksanaan Pelatihan Guru di Madrasah Sasaran MEDP**

No	Nama Kabupaten	Jumlah Kegiatan	Peserta		Pagu Program (Rp)
			Lk	Pr	
1	JOMBANG	28	516	403	154,025,000
2	BOJONEGORO	8	51	38	84,162,700
3	JEMBER	17	166	140	189,895,000
4	LAMONGAN	48	960	720	225,694,000
5	MALANG	33	326	318	252,092,300
6	NGANJUK	32	589	630	99,619,000
7	NGAWI	11	105	111	59,875,000
8	TRENGGALEK	19	188	178	159,422,000
9	KEDIRI	33	523	556	219,350,000
10	BANGKALAN	5	144	110	28,500,000
11	PACITAN	12	224	241	65,050,000
2	PONOROGO	4	195	70	23,100,000
JUMLAH		250	3987	3515	0
PERSENTASE			53%	47%	

Sumber data diambil dari realisasi Program MEDP di Jawa Timur

Dari data di atas menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan guru di madrasah sasaran MEDP lebih sedikit jumlahnya dibanding kegiatan KKG/MGMP karena KKG/MGMP merupakan kegiatan musyawarah guru yang harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Keterwakilan perempuan dalam kegiatan pelatihan guru mencapai 47% lebih tinggi dari pada KKG/MGMP. Data ini dapat digambarkan dalam bentuk grafik seperti berikut:

**Grafik 2**  
**Realisasi Program Pelatihan**



**a. Inovasi Pembelajaran**

MEDP telah menyediakan bantuan-bantuan blok setiap tahunnya untuk mengembangkan inovasi-inovasi belajar dan mengajar yang dikembangkan oleh individu guru, kelompok belajar guru, atau kelompok madrasah. Berikut adalah table realisasi Program inovasi pembelajaran di madrasah sasaran MEDP.

**Tabel 4**  
**Kegiatan Inovasi Pembelajaran**

No	Nama Kabupaten	Jumlah Kegiatan	Peserta		Pagu Program (Rp)
			Lk	Pr	
1	JOMBANG	23	501	447	135,533,000
2	BOJONEGORO	11	151	98	80,913,000
3	JEMBER	7	92	57	65,910,000
4	LAMONGAN	35	571	438	173,982,500
5	MALANG	26	125	90	51,285,000
6	NGANJUK	58	681	706	46,350,200
7	NGAWI	8	82	71	87,670,000
8	TRENGGALEK	6	77	71	41,700,000
9	KEDIRI	13	110	112	47,660,000
10	BANGKALAN	0	0	0	0
11	PACITAN	2	26	34	75,000,000
12	PONOROGO	13	405	215	40,080,000
JUMLAH		202	2821	2339	0
PERSENTASE			55%	45%	0

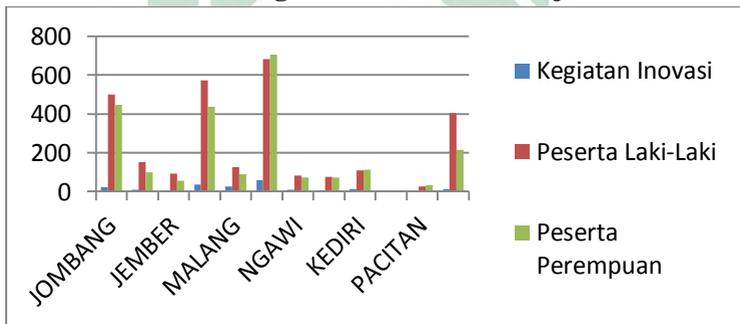
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Selain melalui pelatihan, Peningkatan Profesionalisme guru dilakukan melalui inovasi pembelajaran. Kegiatan ini di harapkan mampu meningkatkan kompetensi guru agar pembelajaran lebih bervariasi dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan hasil belajar siswa.
- b. Beberapa kegiatan inovasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Madrasah sasaran MEDP antara lain: 1) Pembelajaran berbasis ICT; 2) Pengembangan media pembelajaran; 3) Penyusunan bahan ajar; 4) Strategi pembelajaran PAKEM,

Quantum Teaching And Learning; 5) Penelitian Tindakan Kelas.

- c. Keterwakilan gender sebagai peserta dalam program peningkatan mutu guru melalui inovasi pembelajaran mencapai 45% dari jumlah seluruh tenaga pendidik di Madrasah sasaran MEDP.
- d. Data program peningkatan mutu guru melalui inovasi pembelajaran pada Madrasah sasaran MEDP dapat disajikan dalam bentuk grafik sbb:

**Grafik 3**  
**Realisasi Program Inovasi Pembelajaran**



Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa program peningkatan profesionalisme guru menunjukkan hasil positif, salah satu indikator yang dapat digunakan antara lain:

- a. Peningkatan jumlah siswa yang masuk ke Madrasah sasaran MEDP setiap tahun.
- b. Mutu guru semakin berkembang baik melalui peningkatan guru melalui KKG/MGMP

- c. Guru semakin kreatif dalam mengembangkan metode dan model pembelajaran
- d. Guru semakin memahami sistem penilaian dalam pendidikan dan mengimplementasi-kannya dalam KBM
- e. Guru semakin sering mulai menyusun proposal dan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
- f. Guru semakin kreatif menyusun bahan ajar
- g. Program remidi untuk membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar berjalan dengan cukup baik

Meskipun ada peningkatan tetapi ada beberapa hal yang masih belum optimal, antara lain:

- a. Pengembangan model-model pembelajaran tidak dapat dijalankan karena berada di Ma'had (isalnya MTs. Umar Zahid Sumelo Kayen Jombang)
- b. Perlu penjelasan fokus untuk akademik (Misalnya MTs. Umar Zahid Sumelo Kayen Jombang)

## **2. Peningkatan Sumber Belajar dan Fasilitas Pembelajaran**

Salah satu komponen penunjang dalam kegiatan pembelajaran di Madrasah adalah kelengkapan sarana dan prasarana. Salah satu program MEDP adalah peningkatan sumber belajar dan fasilitas pembelajaran. Komponen ini dibagi menjadi beberapa program antara lain:

### **a. Pembangunan Gedung dan Rehab**

MEDP telah mendukung rehabilitasi dan konstruksi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan klinik kesehatan yang dibutuhkan. Bantuan rehabilitasi dan konstruksi menggunakan skema berbasis masyarakat atau swakelola. Berdasarkan data yang terkumpul, di madrasah sasaran MEDP Jawa Timur telah terjadi peningkatan fasilitas pembelajaran; yaitu sebanyak 89( 33 %) madrasah yang memiliki laboratorium IPA; 114 (43%) madrasah yang memiliki laboratorium komputer; 128 (48%) madrasah yang memiliki perpustakaan; 217 (81%) madrasah yang mengalami peningkatan kepemilikan bangunan ruang kelas baik melalui pembangunan baru maupun rehab; 46 (17%) madrasah memiliki klinik; 2 (0,7%) madrasah yang membangun laboratorium bahasa; dan 131 (49%) madrasah yang melakukan pembangunan MCK atau toilet. Berikut adalah table jumlah madrasah yang melakukan konstruksi atau rehab fasilitas pembelajaran dengan bantuan dari MEDP:

**Tabel 5**  
**Jumlah Madrasah yang melaksanakan Pembangunan dan Rehab Fasilitas Pembelajaran**

No	Kabupaten	Lab IPA	Lab Komp	Perpust	Kelas	Klinik	Lab Bahasa	Toilet
1	PACITAN	7	8	12	13	3	0	4
2	PONOROGO	6	11	8	17	2	0	0
3	TRENGGALEK	5	5	6	9	4	0	9
4	NGAWI	4	10	9	16	2	0	7
5	NGANJUK	6	19	14	20	6	0	21

6	KEDIRI	3	5	3	13	3	0	16
7	JOMBANG	13	8	15	20	1	0	12
8	MALANG	12	10	19	29	8	2	9
9	BOJONEGORO	12	9	6	24	5	0	15
10	LAONGAN	11	16	21	30	6	0	5
11	BANGKALAN	3	5	7	15	1	0	17
12	JEMBER	7	8	8	11	5	0	16
JUMLAH		89	114	128	217	46	2	131

*Sumber data diambil dari realisasi Program MEDP Tahap I di Jawa Timur*

Sebagaimana pada Program lainnya, Program pembangunan dan rehab gedung bervariasi antara satu madrasah dengan madrasah lainnya tergantung pada kemampuan prediksi harga bahan bangunan dan kejelian dalam menghitung kebutuhan. Berikut ini digambarkan perbedaan pagu Program pembangunan dan rehab gedung antara satu madrasah dengan madrasah lain di dua kabupaten:

**Tabel 6**  
**Realisasi Program Pembangunan dan Rehab Gedung di Madrasah MEDP Kabupaten Jember**

No	Nama Madrasah	Pembangunan Ruang Baru							Pagu Program (Rp)
		Kelas	Lab IPA	Lab Komp	Lab Bahasa	Perpus	Klinik	MCK	
1	MIS 22 AL IKHLAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MIS MA 35 NURUL ULUM	0	1	1	0	1	0	4	201,971,900

No	Nama Madrasah	Pembangunan Ruang Baru							Pagu Program (Rp)
		Kelas	Lab IPA	Lab Komp	Lab Bahasa	Perpus	Klinik	MCK	
3	MIS TARBIYATUL ISLAMİYAH	2	0	0	0	0	1	4	245,000,000
4	MIMA 32 SALAFIYAH SYAFI'İYAH	0	0	1	0	1	1	4	245,000,000
5	MI ASSALAM PLUS	0	1	0	0	1	0	4	283,049,000
6	MIMA 38 HIDAYATUL MUBTAD	2	0	0	0	0	0	4	170,000,000
7	MIS MIFTAHUL ULUM	0	0	1	0	1	0	6	170,000,000
8	MTS MA'ARIF BANI KHOLIEL	2	1	1	0	0	0	4	349,835,499
9	MTS WAHID HASYIM	2	1	0	0	0	0	1	291,500,000
10	MTSN ARJASA	2	1	0	0	0	1	2	314,400,000
11	MTS MIFTAHUL ULUM	1	1	1	0	1	1	0	538,836,000
12	MTSN UMBULSARI	1	0	0	0	0	0	4	116,227,167
13	MTS AL HIDAYAH	0	0	1	0	1	1	3	308,745,600
14	MTS AL AMIEN	1	0	1	0	0	0	4	286,680,000
15	MA MA'ARIF	0	0	0	0	0	0	4	20,000,000

No	Nama Madrasah	Pembangunan Ruang Baru							Pagu Program (Rp)
		Kelas	Lab IPA	Lab Komp	Lab Bahasa	Perpus	Klinik	MCK	
	AMBULU								
16	MA MIFTAHUL ULUM	0	1	1	0	1	0	0	262,750,882

**Tabel 7**

**Realisasi Program Pembangunan dan Rehab Gedung di Madrasah MEDP Kabupaten Jombang**

No	Nama Madrasah	Pembangunan Ruang Baru							Pagu Program
		Kls	Lab IPA	Lab Komp	Lab Bahasa	Perpus	Klinik	MCK	
1.	MI AL MURSYIDAH MOJOAGUNG	6R	0	0	0	1	0	5	120.016.000
2.	MI MIFTAHUL ULUM JARAK KULON	1	0	0	0	1	0	4	200.000.000
3.	MI FATHUL HUDA	1	1	0	0	1	0	1	236.440.250
4.	MI ISLAMIYAH BANJARPOH PULOREJO	1	1	0	0	1R	0	0	115.530.000
5.	MI MUJAHIDIN	2	0	0	0	0	0	0	155.000.000
6.	MI GHOZALIYAH JOGOROTO	0	0	0	0	1	1	1	179.250.000
7.	MTS NURUL QUR'AN	1R	1	0	-0	1	0	0	198.600.000
8.	MTS AR-RAHMAH	1	0	1R	0	1	0	2	261.999.904
9.	MTS BAHRUL ULUM GENUK WATU	0	0	1	0	0	0	0	85.060.000
10.	MTS UMAR ZAHID	1	0	0	0	0	0	0	0

.	SEMELO								
11	MTS MAMBAUL ULUM COROGO	0	1	1R	0	1	0	1	294.257.000
12	MI MIDANUTTA'LIM 1	2	0	0	0	1	0	0	118.000.000
13	MI DARUL ULUM 03 NGUMPUL	1	1	0	0	1	0	0	196.230.000
14	MTS BABUSSALAM MOJOAGUNG	3	1	0	0	0	0	1	411.010.750
15	MTSN PANGLUNGAN WONOSALAM	2	1	0	0	1	0	4	388.053.000
16	MI TARBIYATUNNASYII N 1 DIWEK	2	0	0	0	0	0	3	247.100.000
17	MA DARUL FAIZIN MOJOWARNO	1	0	0	0	1	0	4	340.450.000
18	MI NURUL IMAN DEMPOK DIWEK	4	0	0	0	1	0	0	252.999.920

Keterangan: R = realisasi Program dengan rehabilitasi

Pembangunan dengan kode R berarti realisasi Program dengan rehab bukan pembangunan baru. Hal ini dikarenakan dana yang tidak mencukupi sehingga dialihkan dengan merehab bangunan lama yang rusak. Namun demikian, ada juga madrasah yang pagu Programnya tidak memadai mengerahkan kekuatan dengan memberdayakan masyarakat sekitar madrasah. Pembangunan gedung dengan sistem swakelola mampu menarik minat sebagian pemangku kepentingan madrasah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi tersebut bisa dalam bentuk tenaga, pikiran, dan dana. Berdasarkan data yang terkumpul dari ada 38 (14%) madrasah yang mampu menarik pemangku kepentingan

madrasah dalam memberikan bantuan dana untuk pendamping pembangunan fisik. Dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 4,169,978,214 (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah). Berikut adalah tabel besarnya dana pendamping baik dari masyarakat, yayasan, maupun pemerintah daerah;

**Tabel 8**  
**Dana Pendamping Realisasi Program Madrasah**  
**MEDP Jawa Timur**

No	Nama Madrasah	Pembangunan							Pagu Program (Rp)	Sumber Dana
		Kls	Lab IPA	Lab Komp	Lab Bahasa	Perpus	Klinik	MCK		
1	MTSN KEBONAGUNG PACITAN	√					√		75,631,000	SM
2	MAS PEMBANGUNAN PACITAN		√						13,750,000	SM
3	MIS GUPPI PITINGAWI			√					20,000,000	SM
4	MIN GELUNG NGAWI						√		3.450.000	SM
5	MTS MA`HADUL MUTA`ALLIMIN KATERBAN NGAWI	√	√	√		√			407,055	Y
6	MTS PERSIAPAN						√		20,000,000	SM

No	Nama Madrasah	Pembangunan						Pagu Program (Rp)	Sumber Dana
		Kls	Lab IPA	Lab Komp	Lab Bahasa	Perpus	Klinik		
	JOGOROGO								
7	MI KARANGGANDU WATULIMO TRENGGALEK	√					√	157,907,000	SM
8	MI WB HIDAYATUT THULLAB TRENGGALEK	√					√	230,000,000	SM
9	MTS GUPPI BEDUNGAN TRENGGALEK			√			√	32,000,000	SM Y
10	MTS GUPPI DONGKO TRENGGALEK	√						91,000,000	BP
11	MTS GUPPI POGALAN TRENGGALEK	√						25,778,950	SM
12	MTS NURUL HUDA PULE TRENGGALEK		√	√				56,147,000	SM
13	MTS PSM KEDUNGOMBONG ANJUK	√					√	40,000,000	SM
14	MI AL-HUDA KEDUNGLO CENGKOK ANJUK		√					91,000,000	BP
15	MIS AL-HUDA TANJUNG ANOM			√		√		13,895,000	SM

No	Nama Madrasah	Pembangunan						Pagu Program (Rp)	Sumber Dana
		Kls	Lab IPA	Lab Komp	Lab Bahasa	Perpus	Klinik		
	NGANJUK								
16	MI SUNAN AMPEL PATIANROWO	√					√	75,000,000	Y
17	MTS NU MOJOSARI NGANJUK	√		√			√	114,197,900	
18	MTS PSM PACE			√		√		153,246,000	
19	MTS ROUDLOH SEMAMBUNG BOJONEGORO	√		√			√	178,560,200	SM
20	MI ISLAMIYAH BAURENO	√	√				√	14,395,392	
21	MI MIFTAHUL ULUM						√	2,000,000	
22	MI ISLAMIYAH MLINJENG SUMBEREJO BOJONEGORO	√					√	152,200,000	SM
23	MTS AL-FALAH BAURENO BOJONEGORO		√	√			√ √	287,300,000	SM
24	MTS YASPIRA	√	√	√				431,999,784	SM
25	MTSS FALAKIYAH NGASEM BOJONEGORO		√			√		81,389,000	Y
26	MI ISLAMIYAH KEMBANGBAH					√		27,000,000	SM

No	Nama Madrasah	Pembangunan						Pagu Program (Rp)	Sumber Dana	
		Kls	Lab IPA	Lab Komp	Lab Bahasa	Perpus	Klinik			MCK
	U LAMONGAN									
27	MI DARUL ULUM WUDI SABENG LAMONGAN	√						54,186,000	SM	
28	MI NURUL HUDA SUGIO LAMONGAN	√		√			√	220,414,000	SM	
29	MTS AL-KHOIRIYAH SIDODOWO LAMONGAN	√	√	√		√		36,401,000	SM	
30	MTS DARUL HIKAM TRACAL KARANGGENE NG LAMONGAN		√					104,463,300	SM	
31	MTS AL-MUSLIMUN KARANGGENE NG LAMONGAN	√	√				√	164,999,933	SM	
32	MTS BAHRUL ULUM KARANG BINANGUN LAMONGAN	√	√	√			√	√	218,836,000	SM
33	MTS ISLAMIYAH NGUWOK	√						50,250,000	SM	

No	Nama Madrasah	Pembangunan						Pagu Program (Rp)	Sumber Dana	
		Kls	Lab IPA	Lab Komp	Lab Bahasa	Perpus	Klinik			MCK
	LAMONGAN									
34	MAS FATKHUL HIDAYAH LAMONGAN		√					42,379,850	Y	
35	MA SUNAN DRAJAT SUGIO LAMONGAN	√		√			√	√	508,363,000	SM
36	MA RAUDLOTUL MUTA' ALLIMIN		√						43,379,850	Y
37	MTS AL-MAARIF BANGKALAN	√						√	14,000,000	
38	MTS DARUL MANAN AROSBAYA BANGKALAN	√		√					51,401,000	Y
39	MTS MA'ARIF AL-HIKMAH PONOROGO	√		√		√			40,000,000	SM
40	MTS MA'ARIF MAYAK	√							91,500,000	BP
41	MI MA'ARIF PATIHAN WETAN PONOROGO	√	√	√		√		√	74,600,000	SM
42	MTS MA'ARIF AL-ISLAH BUNGKAL PONOROGO	√							70,000,000	SM

No	Nama Madrasah	Pembangunan							Pagu Program (Rp)	Sumber Dana
		Kls	Lab IPA	Lab Komp	Lab Bahasa	Perpus	Klinik	MCK		
JUMLAH								4,169,978,214		

*Keterangan: SM = Swadaya asyarakat; Y = Yayasan; dan BP = Bantuan Pemerintah*

Masih banyak madrasah sasaran MEDP yang berhasil menghimpun dana pendamping dari masyarakat namun belum sempat dilaporkan, misalnya MI Hidayatut Tholibin Bendo Kapas yang mendapat bantuan pembangunan 4 ruang kelas baru. Karena tanah tidak cukup, madrasah merencanakan membangun ruang baru bertingkat di atas gedung lama. Kemudian seorang aghniya` memberi wakaf tanah ditambah swadaya masyarakat sehingga madrasah mampu membeli tanah di samping tanah wakaf. Di samping itu madrasah juga mampu membangun 4 MCK dengan dana dari swadaya masyarakat. Berikut foto-foto pembebasan tanah dan pembangunan dengan swadaya masyarakat:



**Gambar 1**

Ruang kelas lama di MI  
Hidayatut Tholibin Bendo  
Kapas Bojonegoro

**Gambar 2**

Ruang kelas lama di MI  
Hidayatut Tholibin Bendo  
Kapas Bojonegoro

Foto ini adalah bangunan MI Hidayatut Tholibin Bendo Kapas Bojonegoro yang lama. Rencana pembangunan ruang kelas baru dibangun bertingkat di atas gedung lama di tanah yang lama karena tanah madrasah yang sempit. Karena bantuan wakaf dan dana swadaya, serta bantuan tenaga masyarakat sekitar, madrasah membangun ruang kelas baru di atas tanah wakaf yang berlokasi di seberang bangunan lama dengan mengembangkan 4 MCK baru.



**Gambar 3**  
Ruang kelas lama di MI Hidayatut  
Tholibin Bendo Kapas  
Bojonegoro



**Gambar 4**  
Ruang kelas lama di MI Hidayatut  
Tholibin Bendo Kapas Bojonegoro



**Gambar 5**  
MCK dengan dana Swadaya  
Masyarakat di MI Hidayatut  
Tholibin



**Gambar 6**  
MCK dengan dana Swadaya  
Masyarakat di MI Hidayatut  
Tholibin



Gambar 7  
Gedung MI Hidayatut Tholibin yang lama tampak dari  
Gedung Baru

Selain MI Hidayatut Tholibin di Bojonegoro, MI Maarif NU Sekaran Lamongan meskipun tidak dilaporkan, juga berhasil memberdayakan masyarakat sekitar dalam realisasi Program pembangunan gedung madrasah sehingga mampu menghimpun dana dan bantuan lainnya dari masyarakat untuk pengembangan madrasah. Dari 4 ruang kelas dengan bertingkat berhasil dibangun tiga tingkat dengan tambahan dua ruang kelas. Bahkan madrasah berhasil melakukan pembebasan tanah di belakang gedung madrasah dan membangun ruang baru dengan dana swadaya masyarakat. Berikut pembangunan ruang kelas bantuan MEDP dan pembebasan tanah dengan swadaya masyarakat



### **Gambar 8**

Pembangunan Ruang Kelas dengan dua tingkat berkembang menjadi tiga dengan dana swadaya masyarakat tingkat di MI Manbaul Ulum Dagan Solokuro Lamongan



**Gambar 9**

Pembebasan tanah dan Pembangunan Gedung Madrasah dengan Swadaya Masyarakat di MI Maarif Sekaran Lamongan

Berdasarkan pengamatan di madrasah sasaran MEDP di 12 kabupaten, pembangunan fasilitas pembelajaran masih banyak yang belum ditindaklanjuti dengan pemanfaatan, pemeliharaan kebersihan, dan perawatan. Pemanfaatan gedung yang tidak maksimal di antaranya disebabkan tidak disertai pengadaan furniture dan peralatan, sehingga pembangunan gedung belum dimanfaatkan secara maksimal, bahkan ada yang masih digunakan untuk menyimpan barang. Perpustakaan hanya digunakan untuk menyimpan buku. Dalam artian, perpustakaan

belum dioptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber belajar, tempat siswa membaca buku dan mengakses berbagai informasi. Pembangunan belum diikuti peningkatan jumlah pengunjung ke perpustakaan. Madrasah belum memiliki perpustakaan yang membuat siswa betah di perpustakaan dan berminat ke perpustakaan untuk membaca dan akses informasi sebagai perwujudan “belajar bagaimana belajar” MCK di madrasah belum disertai dengan program pemeliharaan kebersihan dan perawatan sehingga beberapa MCK madrasah masih kumuh dan kotor.

Bantuan Program untuk pembangunan gedung, tidak hanya berdampak pada peningkatan sumber belajar dan fasilitas pembelajaran, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam bentuk tenaga, pikiran, dan material financial. Pembangunan dengan swakleola mampu menarik masyarakat untuk menyumbangkan tenaga, materi bangunan, dan dana yang bernilai investasi sehingga madrasah mampu membeli tanah dari dana masyarakat, membangun gedung tambahan dari dana partisipasi masyarakat.

Secara umum implementasi block MEDP untuk pembangunan gedung sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Namun demikian, ada beberapa madrasah yang belum selesai dalam realisasi Program, misalnya Madrasah Manbaul Hikam Bangkalan. Meskipun dana Program sudah habis, namun pembangunan belum selesai sama sekali. Program MEDP untuk madrasah Manba`ul ikam meliputi pembangunan laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang kelas, ruang klinik, dan toilet. Berikut adalah gambar pembangunan gedung di Manba`ul Hikam yang belum selesai sementara di madrasah lainnya sudah selesai;



Gambar 10

Realisasi Program Pembangunan di Manbaul Hikam Bangkalan



**Gambar 11**

Realisasi Program Pembangunan di Manbaul Hikam Bangkalan

**a. Pengadaan Buku Teks**

Bantuan MEDP dalam bentuk program juga untuk membantu madrasah sasaran dalam pengadaan buku teks. Dengan menggunakan dana bantuan blok, madrasah-madrasah mampu memilih dan membeli buku-buku teks dan materi-materi belajar dalam mata pelajaran yang diujikan secara nasional (subjek utama), mata pelajaran agama bagi madrasah yang telah memiliki buku teks untuk subjek utama, buku pengayaan, buku referensi, dan buku pegangan guru untuk mengajar.

Selain buku-buku yang terkait dengan materi UN, pengadaan buku non UN dan referensi oleh Madrasah adalah untuk menambah wawasan dan pengembangan minat belajar guru serta siswa. Melalui bantuan MEDP Tahap I, sebanyak 165 (62%) madrasah telah melakukan pengadaan buku. Madrasah diberi kewenangan untuk memilih rekanan atau toko buku yang mensuplai buku teks yang dibutuhkan. Ini merupakan wujud otonomi madrasah dalam membelanjakan bantuan pengadaan buku sesuai dengan kebutuhan buku di madrasah dan madrasah memiliki kemandirian untuk menunjuk pensuplai buku sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tabel jumlah madrasah yang melakukan pengadaan buku;

**Tabel 9**  
Jumlah Madrasah yang melakukan Pengadaan Buku Teks

No	Kabupaten	Jumlah Madrasah
1	PACITAN	11
2	PONOROGO	12
3	TRENGGALEK	10
4	NGAWI	14
5	NGANJUK	14
6	KEDIRI	10
7	JOMBANG	9
8	MALANG	29
9	BOJONEGORO	7
10	LAONGAN	25
11	BANGKALAN	12
12	JEMBER	12
<b>Jumlah</b>		165

*Sumber data diambil dari realisasi Program MEDP Tahap I di Jawa Timur*

Berikut ini adalah data realisasi Program Tahap I pengadaan buku di madrasah sasaran MEDP Jawa Timur,

**Tabel 10**  
**Realisasi Program Pengadaan Buku Teks**

No	Nama Kabupaten	Pengadaan Buku						Pagu Program (Rp)
		Mapel UN		Mapel Non UN		Referensi		
		Jml Judul	Jumlah Exemplar	Jml Judul	Jumlah Exemplar	Jml Judul	Jml Exemplar	
1	JOMBANG	71	7,180	341	8,434	334	8,138	497,568,416
2	BOJONEGORO	170	7,033	153	7,128	0	0	232,480,280
3	JEMBER	123	10,073	16	945	615	888	610,905,168
4	LAMONGAN	356	21,505	353	12,228	69	194	630,742,324
5	MALANG	57	13,339	0	0	0	0	333,738,938
6	NGANJUK	220	13668	187	9719	328	899	51796000
7	NGAWI	15	1,102	89	1,448	48	749	202,443,600
8	TRENGGALEK	112	9,077	119	5,273	65	442	366,699,241
9	KEDIRI	30	1,238	21	369	25	94	40,580,375
10	BANGKALAN	20	1742	0	0	5	546	48,518,000
11	PACITAN	108	8351	38	1326	344	370	241,436,601
12	PONOROGO	46	4354	17	1989	23	906	99086118
JUMLAH		1328	98,662	1334	48,859	1856	13,226	3,355,995,061

Materi pelajaran yang di Ujian Nasional masih menjadi prioritas di Madrasah selain materi Agama Islam yang merupakan ciri khasnya. Hal ini dimaksudkan:

- 1) Ujian Nasional masih menjadi salah satu penentu kelulusan siswa di Madrasah
- 2) Karena di Madrasah materi agama diajarkan dengan jumlah jam pelajaran yang lebih banyak dari sekolah umum maka diperlukan buku penunjang yang memadai

Buku-buku yang telah dibeli madrasah sasaran MEDP akan meningkatkan mutu pembelajaran. Pengadaan buku teks dirasakan manfaatnya, baik bagi siswa, guru, madrasah, dan orang tua, yaitu:

- 1) Bagi setiap siswa memiliki buku pelajaran yang membantu dan mempermudah siswa untuk belajar.
- 2) Bagi guru, tugas mengajar akan lebih ringan karena setiap siswa memiliki buku teks sehingga guru tidak harus menjelaskan dan melakukan ceramah dalam pembelajaran. Siswa diajak belajar secara aktif dengan penelusuran informasi dari buku, mendiskusikan buku, dan sebagainya. Dengan demikian, pengadaan buku teks ini memungkinkan terjadinya perubahan pola dan paradigma pembelajaran dari tradisional menuju pembelajaran aktif dan kreatif.
- 3) Bagi madrasah, bantuan buku untuk madrasah akan memberi peluang madrasah untuk memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai standar nasional sehingga memungkinkan madrasah untuk memenuhi standar akreditasi, bahkan membantu madrasah untuk meningkatkan status akreditasi.
- 4) Bagi orang tua, pengadaan buku teks telah membantu meringankan beban orang tua untuk membeli buku pelajaran. Madrasah meminjamkan buku teks ke siswa dengan rasio 1:1 atau satu buku untuk satu siswa.

### a. Pengadaan Peralatan dan Alat Peraga

Pengadaan peralatan dan alat peraga di madrasah sasaran MEDP meliputi peralatan perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan media pembelajaran. Peningkatan peralatan tertinggi pada media pembelajaran dengan jumlah madrasah 144 (54%), kedua, pengadaan peralatan laboratorium komputer di 108 (40%) madrasah, ketiga, laboratorium IPA di 91 (34%) madrasah, keempat pengadaan peralatan perpustakaan di 60 (22,4%) madrasah, kelima pengadaan peralatan klinik sekolah di 22 (8,2%) madrasah, dan keenam pengadaan peralatan laboratorium bahasa yang hanya diadakan di 4 (1,5%) madrasah.

**Tabel 11**  
**Jumlah Madrasah yang Melakukan Pengadaan Peralatan dan Alat Peraga**

No	Kabupaten	Perpust	Lab IPA	Lab Komputer	Klinik Sekolah	Lab Bahasa	Media Pembelajaran
1	PACITAN	2	9	7	3	1	7
2	PONOROGO	1	6	7	0	0	7
3	TRENGGALEK	2	7	8	1	0	0
4	NGAWI	13	4	6	0	0	14
5	NGANJUK	9	12	18	3	0	24
6	KEDIRI	1	2	7	3	0	11
7	JOMBANG	9	11	9	0	0	12
8	MALANG	10	14	11	2	2	15
9	BOJONEGORO	3	7	10	1	0	13
10	LAONGAN	2	8	13	5	0	21
11	BANGKALAN	4	3	6	0	0	8
12	JEMBER	4	8	6	4	1	12
JUMLAH		60	91	108	22	4	144

*Sumber data diambil dari realisasi Program MEDP Tahap I di Jawa Timur*

Pengadaan peralatan pembelajaran di madrasah sasaran MEDP membantu madrasah dalam memenuhi fasilitas pembelajaran yang berpengaruh pada proses dan hasil belajar di madrasah. Dengan peralatan yang inovatif membantu guru dalam berkreasi dan melakukan inovasi dalam pembelajaran yang menyenangkan, efektif dan efisien. Berikut adalah tabel realisasi program peralatan;



**Tabel 12**  
**Realisasi Program Pengadaan Peralatan**  
**Pembelajaran**

No	Nama Kabupaten	Pengadaan Peralatan												Pagu Program (Rp)
		Lab IPA		Lab Bahas		Lab Komputer		Perpus		Media pembelajaran		Klinik		
		Jenis	Jml	Jenis	Jml	Jenis	Jml	Jns	Jml	Jenis	Jml	Jenis	Jml	
1	JOMBANG	103	371	0	0	28	45	13	23	85	221	0	0	1,086,908,854
2	BOJONEGORO	19	44	0	0	35	55	4	7	32	62	0	0	727,406,000
3	JEMBER	425	668	0	0	30	238	1	2	54	92	66	75	1,201,544,250
4	LAMONGAN	84	392	0	0	87	535	6	2,767	69	162	27	36	2,445,228,147
5	MALANG	1,020	1,958	1	1	134	175	4,608	4,637	103	103	18	18	2,482,168,072
6	NGANJUK	331	811	97	416	15	70	0	0	156	239	32	27	340660000
7	NGAWI	188	334	0	0	8	27	0	0	13	13	0	0	363,637,500
8	TRENGGALEK	55	861	53	245	0	0	0	0	22	105	0	1	1034768100
9	KEDIRI	108	136	0	0	23	121	3	3	84	142	28	49	1,036,198,500
10	BANGKALAN	6	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	125,115,000
11	PACITAN	6	57	9	57	0	0	20	23	1	1	28	51	752509000
12	PONOROGO	8	13	36	83	0	0	0	0	41	8	0	0	744482500
JUMLAH		2353	5655	196	802	360	1266	4655	7462	670	1158	199	257	12,340,625,923

Peralatan yang jumlahnya paling banyak adalah peralatan perpustakaan dan laboratorium IPA. Contoh-contoh peralatan pembelajaran yang berasal dari bantuan MEDP adalah:



**Gambar 12**  
Fasilitas Perpustakaan dari Program MEDP di MI Islamiyah Pulorejo  
Ngoro Jombang



Gambar 13  
Fasilitas Perpustakaan dari Program MEDP di MTsN Juwet Nganjuk



Gambar 14  
Fasilitas Pembelajaran IPA dari Program MEDP



Gambar 15  
Fasilitas Pembelajaran IPA dari Program MEDP



Gambar 16  
Fasilitas Pembelajaran Matematika dari Program MEDP



Gambar 17  
Fasilitas  
Pembelajaran  
Matematika  
dari Program  
MEDP



Gambar 18  
Fasilitas Pembelajaran Matematika dari Program MEDP



Gambar 19  
Fasilitas Pembelajaran Matematika dari Program MEDP



Gambar 20  
Fasilitas Laboratorium IPA dari Program MEDP di MTs Darul Manan



Gambar 21  
Fasilitas  
Laboratorium  
Komputer dari  
Program MEDP di  
MI Sunan Ampel  
Nganjuk



Gambar 22  
Fasilitas Pembelajaran ICTr dari Program MEDP di MI Al-Huda  
Kedung Lho Cengkok Nganjuk



Gambar 23  
Fasilitas Klinik  
dari Program  
MEDP di MI  
Al-Huda  
Kedung Lho  
Cengkok  
Nganjuk



Gambar 24  
Pembelajaran IPA Berbasis Laboratorium dengan Program MEDP di  
MTsN Juwet Nganjuk



Gambar 25  
Hasil Pembelajaran  
IPA Berbasis  
Laboratorium  
dengan Program  
MEDP di MTs  
Darul Manan  
Bangkalan



Gambar 26  
Hasil Pembelajaran IPA Berbasis Laboratorium dengan Program  
MEDP di MTs Darul Manan Bangkalan



Gambar 27  
Hasil Pembelajaran IPA Berbasis Laboratorium dengan  
Program MEDP di MTs Darul Manan Bangkalan

## b. Pengadaan Furniture

Pengadaan furniture di madrasah sasaran MEDP telah meningkatkan ketersediaan perlengkapan dan mebel yang pantas. Perlengkapan tersebut diperuntukkan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan klinik. Peningkatan furniture kelas madrasah sebanyak 112 (42%) madrasah; furniture perpustakaan sebanyak 75 (28 %) madrasah; lab IPA sebanyak 41 (15%, lab komputer sebanyak 55 (21%), laboratorium bahasa sebesar 8 (3%), dan furniture klinik madrasah sebesar 26 (10%).

**Tabel 13**  
**Pengadaan Furniture**

No	Kabupaten	Kelas	Perpustakaan	Lab IPA	Lab Komputer	Lab Bahasa	Klinik
1	PACITAN	8	5	5	5	0	1
2	PONOROGO	4	2	1	1	0	0
3	TRENGGALEK	7	0	2	3	1	0
4	NGAWI	12	5	2	3	0	3
5	NGANJUK	11	9	6	6	0	6
6	KEDIRI	9	3	0	5	0	2
7	JOMBANG	8	10	4	4	1	1
8	MALANG	12	14	7	7	5	5

9	BOJONEGORO	13	6	6	5	1	2
10	LAONGAN	7	9	5	9	0	4
11	BANGKALAN	12	7	1	4	0	0
12	JEMBER	9	5	2	3	0	2
JUMLAH		112	75	41	55	8	26

Sumber data diambil dari realisasi Program MEDP Tahap I di  
Jawa Timur

### 3. Peningkatan Effisiensi Internal

#### a. Program Remedial

Di dalam Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional (Permen Mendiknas) 22, 23, 24 Tahun 2006 dan Permendiknas No. 6 Tahun 2007, ditentukan bahwa pencapaian hasil pembelajaran peserta didik diperhatikan dengan menerapkan sistem belajar tuntas, dan sistem pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Kebijakan ini berkonsekuensi pada pelayanan kepada siswa secara individual dengan memberikan perlakuan secara berbeda antar siswa. Bagi siswa yang lambat belajar harus dibedakan dengan siswa yang cepat dalam belajar. memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi korektif, fungsi penyesuaian, fungsi akselerasi, dan fungsi terapi, yaitu:

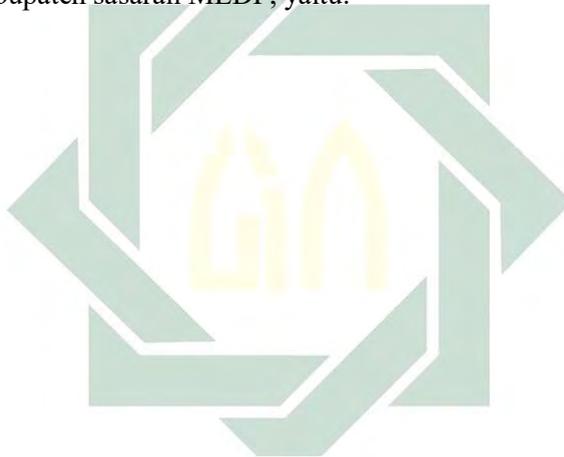
- 1) fungsi korektif. Fungsi ini berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan sekaligus cara mengajar guru, serta memahami kelebihan dan kekurangan dirinya.

- 2) fungsi penyesuaian; Fungsi ini bagi siswa berguna untuk menyesuaikan diri dengan berbagai media atau contoh yang diberikan guru dalam proses meremidi, dan bagi guru berfungsi sebagai penyesuaian teknik pembelajaran dengan karakteristik peserta didik;
- 3) fungsi akselerasi; fungsi ini bagi siswa maupun bagi guru mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran dan
- 4) fungsi terapi; fungsi ini bagi guru membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial- pribadi

Dasar inilah yang melahirkan kebijakan program remedial dalam menangani peserta didik yang belum tuntas. Menindaklanjuti kebijakan ini, MEDP mengembangkan bantuan Program untuk kegiatan remedial. Bantuan ini telah membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran berbasis ketuntasan belajar, di mana guru akan terlatih melakukan penilaian, diagnosis kesulitan belajar bagi peserta didik, dan memberikan treatment kepada peserta didik yang menghadapi kesulitan belajar termasuk peserta didik yang memiliki kelebihan dalam pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran, penilaian, dan hasil belajar siswa akan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Berdasarkan data monev madrasah memiliki kewenangan dalam merealisasikan bantuan blok remedial karena menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Madrasah tingkat ibtdaiyyah mengalokasikan bantuan remedial untuk mata pelajaran ujian nasional, seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. Di madrasah tingkat tsanawiyah remedial dikembangkan lagi untuk mata

pelejaran Bahasa Inggris, sedangkan untuk madrasah tingkat aliyah disesuaikan dengan jurusan. Jika jurusan IPS maka bantuan remedial juga dialokasikan untuk mata pelajaran IPS. Jumlah kegiatan remedial tiap madrasah berbeda-beda antara satu madrasah dengan madrasah lainnya tergantung pada besarnya anggaran bantuan dan tingkat efisiensi dari madrasah. Berikut ini adalah contoh variasi realisasi Program remedial di madrasah dalam satu kabupaten dan jumlah kegiatan remedial di dua belas kabupaten sasaran MEDP, yaitu:



Tabel 14  
Realisasi Program Remedial antar Madrasah di Kabupaten Lamongan

No	Nama Madrasah	IPA			Bhs. Indonesia			Matematika			Bhs. Inggris			Pagu Program (Rp)
		Kgt	Lk	Pr	Kgt	Lk	Pr	Kgt	Lk	Pr	Kgt	Lk	Pr	
1	MI MA'ARIF NU PUCUK	1	13	13	1	15	7	1	15	7	1	15	15	7.290.000
2	MI HIDAYATUSSIBYAN	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
3	MI MUHAMMADIYAH	5	10	4	5	14	6	5	17	3	-	-	-	3.600.000
4	MI AL IKHLAS BANJARGONDANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MI ISLAMİYAH KEMBANGBAHU	1	7	-	1	9	1	1	8	2	-	-	-	4.425.000
6	MI MA'ARIF NU SUKOLILO	6	136	36	6	96	22	6	119	37	-	-	-	3.900.000
7	MI DARUL ULUM WUDI	3	19	39	3	19	39	3	19	39	-	-	-	-
8	MI AL MUKHLISIN	6	57	29	6	45	29	6	45	36	-	-	-	3.360.000
9	MI TARBIYATUL BANAT	6	2	175	6	6	158	6	16	162	-	-	-	19.200.000
10	MI NURUL HUDA	6	52	51	6	51	61	6	53	62	-	-	-	16.274.350
11	MI MA'ARIF NU CUMPLENG	5	18	8	4	12	10	6	26	25	-	-	-	2.400.000
12	MI MAZRA'ATUL ULUM 01	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1.750.000
13	MI MAMBAUL ULUM	6	508	216	6	516	127	6	495	212	-	-	-	10.000.000
14	MI MUHAMMADIYAH 3	2	17	9	2	15	9	2	17	13	-	-	-	3.300.000
15	MIS MA'ARIF NU SEKARAN	2	27	39	2	33	44	2	31	43	-	-	-	875.250
16	MIS THORIQUL HIDAYAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MTS AL KHOIRIYAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MTS DARUL HIKAM	5	10	4	5	14	6	5	17	3	-	-	-	20.120.625

No	Nama Madrasah	IPA			Bhs. Indonesia			Matematika			Bhs. Inggris			Pagu Program (Rp)
		Kgt	Lk	Pr	Kgt	Lk	Pr	Kgt	Lk	Pr	Kgt	Lk	Pr	
19	MTS AL MUSLIMUN	6	123	132	3	68	68	3	78	57	3	66	70	37.200.000
20	MTS IHYAUL ULUM	6	66	53	3	38	41	3	36	33	3	34	28	15.420.000
21	MTS AL ISLAHIYAH	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	30.592.800
22	MTS AL IRSYADYAH	2	41	44	1	26	28	1	29	28	1	26	26	-
23	MTS MIFTAHUL ULUM	3	36	28	3	37	30	3	38	30	3	38	29	15.900.000
24	MTS MUHAMMADIYAH 15	-	-	-	1	306	299	1	362	344	1	325	303	46.740.000
25	MTS BAHRUL ULUM	4	35	23	2	33	35	2	20	11	2	33	55	6.000.300
26	MTS MUHAMMADIYAH 3	6	49	21	6	46	23	6	42	30	6	50	21	7.170.000
27	MTS ISLAMYAH NGUWOK	3	53	38	3	45	32	3	42	30	-	-	-	53.600.000
28	MAS FATHUL HIDAYAH	9	117	98	4	52	38	4	39	41	4	46	44	2.750.000
29	MA SUNAN DRAJAT	-	-	-	3	52	52	3	58	56	3	60	58	18.468.000
30	MAS RAUDLOTUL ULUM	9	117	98	4	52	38	4	39	51	4	46	44	12.950.000
31	MAM 02 PONDOK MODERN	12	38	33	6	24	10	6	29	7	6	23	11	14.400.000

Tabel 15  
Realisasi Program Remedial di Jawa Timur

No	Nama Kabupaten	IPA			Bhs. Indonesia			Matematika			Bhs. Inggris			IPS/Lainnya			Pagu Program
		Kgt	Lk	Pr	Kgt	Lk	Pr	Kgt	Lk	Pr	Kgt	Lk	Pr	Kgt	Lk	Pr	
1	JOMBANG	59	1767	1547	56	1658	1235	58	1776	1567	18	669	330	0	0	0	444.821.500
2	BOJONEGORO	47	894	653	47	826	629	47	882	713	36	646	525	0	0	0	143.702.350
3	JEMBER	44	654	609	38	585	506	126	615	514	104	484	405	0	0	0	178.282.000
4	LAMONGAN	116	1551	1191	96	1624	1213	97	1690	1362	40	762	704	0	0	0	3.900.875.250
5	MALANG	1135	7	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	334.051.207
6	NGANUK	22	257	181	90	286	254	52	264	199	19	236	179	0	0	0	8750000
7	NGAWI	67	535	606	43	359	417	43	450	484	46	320	417	57	286	415	52.305.000
8	TRENGGALEK	39	573	539	41	850	1009	27	309	380	19	235	265	0	0	0	174.141.540
9	KEDRI	23	302	190	34	295	196	25	363	245	6	104	54	6	56	32	75.512.500
10	BANGKALAN	1	8	24													6.630.000
11	PACITAN	31	262	486	31	267	193	31	261	215	2	55	54	30	269	147	61648125
12	PONOROGO	12	95	73	9	57	27	9	112	54	12	84	108	0	0	0	38610000
JUMLAH		1596	6905	5799	486	6807	5679	516	6722	5733	303	3615	3041	93	611	584	1.222.355.087
		1596	12704	486		12486		516	12455		303	6656		93	1205		0
PERSENTASE																	
		53	46%			55%	45%		54%	46%		55%	45%		51%	49%	0

Data di atas menjelaskan bahwa

- 1) kegiatan remedial yang paling banyak pada mata pelajaran IPA, yaitu 1596 kegiatan dan kedua Matematika sebanyak 516 kegiatan. Hal ini mengindikasikan bahwa mata pelajaran yang dipandang sulit di madrasah adalah IPA dan Matematika.
- 2) Kecenderungan ketidaktuntasan belajar peserta didik laki-laki lebih tinggi dari pada peserta didik perempuan. Kemungkinan peserta didik perempuan lebih tekun dari pada peserta didik laki-laki dan lebih teliti dalam mengerjakan tugas-tugas dalam pelaksanaan ujian di madrasah.
- 3) Perbedaan anggaran dan kegiatan remedial antara satu madrasah dengan madrasah yang lain disebabkan perbedaan pelaksanaan remedial, yang meliputi pengulangan ujian atau penguatan pemahaman peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran sehingga guru harus menyiapkan sumber belajar, seperti lembar kerja, atau media dan alat peraga agar peserta didik lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran dan mencapai ketuntasan dalam belajar. Berikut adalah contoh kegiatan remedial di salah satu madrasah sasaran MEDP di Bangkalan:

## b. Kegiatan Program Transisi

**Tabel 16**  
**Realisasi Program Beasiswa Transisi**

NO	KABUPATEN	JUMLAH	JUMLAH	
			L	P
1	NGAWI	151	67	84
2	PACITAN	110	139	73
3	NGANJUK	88	29	59
4	JOMBANG	87	41	46
5	KEDIRI	241	1 06	135
6	PONOROGO	90	35	55
7	TRENGGALEK	259	99	160
8	BOJONEGORO	446	171	275
9	LAMONGAN	371	192	179
10	MALANG	171	91	80
11	JEMBER	142	69	73
12	BANGKALAN	70	25	45
	TOTAL	2222	958	1264
	PERSENTASE (%)	100.00	45.78	54.22

## c. Guru Pengganti

Program guru pengganti diperuntukkan bagi madrasah yang gurunya terpilih beasiswa kualifikasi pendidikan S1. Oleh karena itu, tidak semua kabupaten memiliki program

guru pengganti. Berikut adalah tabel realisasi Program guru pengganti

**Tabel 17**  
**Realisasi Program Guru Pengganti**

NO	KABUPATEN	JUMLAH	JUMLAH	
			L	P
1	NGAWI	7	3	4
2	PACITAN	10	4	6
3	NGANJUK	37	17	20
4	JOMBANG	30	12	18
5	KEDIRI	3	2	1
6	PONOROGO	4	1	3
7	TRENGGALEK	4	3	1
8	BOJONEGORO	-	-	-
9	LAMONGAN	-	-	-
10	MALANG	45	30	15
11	JEMBER	10	8	2
12	BANGKALAN	5	3	2
	TOTAL	155	84	71
	Persentase (%)	100.00	55.32	44.68

Secara keseluruhan terdapat kecenderungan penurunan jumlah siswa di madrasah sasaran MEDP meskipun kecil. Dari data siswa dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat 77 (29%) madrasah mengalami penurunan jumlah siswa. Angka penurunan jumlah siswa ada yang kecil dan bahkan cukup signifikan. Berikut ini tabel kecenderungan penurunan jumlah siswa di madrasah sasaran MEDP:

**Tabel 18**  
**Jumlah Madrasah yang Mengalami Penurunan Jumlah Siswa**

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Keseluruhan					
		Tahun 2008-2009		TOTAL	Tahun 2009-2010		TOTAL
		Lk	Pr		Lk	Pr	
1	MIS MUHAMMADIYAH BUBAKAN	116	113	229	111	99	210
2	MIS AL HUDA PLOSO	121	109	230	112	116	228
3	MIS KASIHAN I	99	85	184	101	85	186
4	MTSS MUHAMMADIYAH 02	76	63	139	63	53	116
5	MTSS MUHAMMADIYAH NAWANGAN	99	84	183	77	76	153
6	MTSS PONDOK TREMAS	138	150	288	182	153	335
7	MAS PEMBANGUNAN	88	98	186	76	102	178
8	MTS ASSALAM	79	89	168	88	78	166
9	MTS AL-AZHAR	115	107	222	109	98	207
10	MTS AL-HIKMAH	147	146	293	127	135	262
11	MI DARUL ULUM	74	69	143	76	53	129

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Keseluruhan					
		Tahun 2008-2009		TOTAL	Tahun 2009-2010		TOTAL
		Lk	Pr		Lk	Pr	
	SAWAHAN						
12	MI ASARAN I	92	89	181	89	91	180
13	MIS NURUL HUDA DONGKO	77	66	143	71	66	137
14	MI NURUL ULUM PARAKAN	89	89	178	85	87	172
15	MTS NURUL HUDA CAKUL DONGKO	114	94	208	95	87	182
16	MTS MAARIF KARANGAN	61	65	126	53	52	105
17	MTS GUPPI BENDUNGAN	102	113	215	98	103	201
18	MTS GUPPI POGALAN	82	77	159	74	70	144
19	MAN PANGGUL	114	100	214	72	91	163
20	MTSS DARUL HIKMAH NGOMPAK	153	212	365	137	198	335
21	MTS M TEMPURREJO	84	112	196	76	110	186
22	MI ISLAMIYAH KEDUNGGAMBU	123	111	234	115	108	223
23	MAN PARON	159	336	495	161	283	444
24	MTS YASPI SINE	74	50	124	72	41	113
25	MI SUNAN AMPEL PATIANROWO	65	91	156	68	83	151
26	MIS AL-HUDA TANJUNGANOM	94	95	189	92	94	186

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Keseluruhan					
		Tahun 2008-2009		TOTAL	Tahun 2009-2010		TOTAL
		Lk	Pr		Lk	Pr	
27	MI THORIQUL HUDA	78	77	155	76	74	150
28	MIN TERMAS	148	121	269	142	130	272
29	MTS NU MOJOSARI LOCERET	278	298	576	272	299	571
30	MTS PSM PACE	125	119	244	116	114	230
31	MTS MODERN SUNAN AMPEL PRAMBON	70	74	144	67	53	120
32	MTS AL-FATAH	250	233	483	230	220	450
33	MTS AL-AMIN	132	149	281	112	147	259
34	MTS YTP KERTOSONO	115	122	237	111	121	232
35	MA SUNAN KALIJAGA	101	125	226	104	113	217
36	MI MIFTAHUL HUDA KANDAT	144	111	255	142	110	252
37	MTS DIPONEGORO KANDAT	88	102	190	59	79	138
38	MI AL FALAH	171	131	302	159	142	301
39	MI BUSTANUL ULUM BADAS	105	135	240	100	133	233
40	MTS MASLAHIYAH	74	110	184	59	83	142
41	MTS SUNAN GUNUNGJATI	96	122	218	102	107	209
42	MIS ISLAMIYAH PUNCU	99	89	188	86	92	178
43	MIS ROUDLOTUT	120	127	247	122	132	254

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Keseluruhan					
		Tahun 2008-2009		TOTAL	Tahun 2009-2010		TOTAL
		Lk	Pr		Lk	Pr	
	THOLABAH						
44	MTS RAUDLATUT THALABAH	181	192	373	180	187	367
45	MTS ABDULLOH	221	205	426	200	189	389
46	MI MIFTAHUL ULUM JARAK KULON	152	130	282	132	136	268
47	MI MUJAHIDIN	213	158	371	157	197	354
48	MI GHOZALIYAH JOGOROTO	167	197	364	162	192	354
49	MTS NURUL QUR'AN	196	174	370	205	155	360
50	MTS UMAR ZAHID SEMELO	168	157	325	167	153	320
51	MTS MAMBAUL ULUM COROGO	110	111	221	105	107	212
52	MI DARUL ULUM 03 NGUMPUL	15	16	31	14	15	29
53	MTS BABUSSALAM MOJOAGUNG	185	182	367	185	169	354
54	MI TARBIYATUNNASYIIN 1 DIWEK	160	157	317	152	158	310
55	MI NURUL IMAN DEMPOK DIWEK	164	142	306	158	142	300
56	MI HIDAYATUL MUBTADIIN WEDI	102	78	180	93	62	155

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Keseluruhan					
		Tahun 2008-2009		TOTAL	Tahun 2009-2010		TOTAL
		Lk	Pr		Lk	Pr	
57	MI ISLAMIYAH TULUNGAGUNG	101	107	208	93	105	198
58	MI FATKHUL ULUM SUKOSEWU	54	63	117	44	51	95
59	ISLAMIYAH MLINJENG SUMBERREJ	91	90	181	83	83	166
60	MTS MUHAMMADIYAH 3 SUMBERREJO	147	177	324	148	156	304
61	MTS WALISINGO SUGIHWARAS	212	232	444	212	221	433
62	MI MA'ARIF NU PUCUK	136	140	276	134	138	272
63	MI MUHAMMADIYAH	90	86	176	85	82	167
64	MI AL IKHLAS BANJARGONDANG	93	73	166	92	66	158
65	MI MA'ARIF NU SUKOLILO	103	98	201	107	92	199
66	MI DARUL ULUM WUDI	46	55	101	44	9	53
67	MI TARBIYATUL BANAT	16	133	149	16	126	142
68	MI MAZRA'TUL ULUM 01	208	182	390	201	175	376
69	MI MAMBAUL ULUM	163	132	295	167	125	292

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Keseluruhan					
		Tahun 2008-2009		TOTAL	Tahun 2009-2010		TOTAL
		Lk	Pr		Lk	Pr	
70	MIS MA'ARIF NU SEKARAN	157	167	324	154	155	309
71	MTS AL KHOIRIYAH	104	121	225	106	110	216
72	MTS AL ISLAHIYAH	104	119	223	96	124	220
73	MTS MIFTAHUL ULUM	40	32	72	36	40	76
74	MTS MUHAMMADIYAH 15	94	91	185	97	86	183
75	MTS BHRUL ULUM	57	79	136	55	74	129
76	MTS MUHAMMADIYAH 3	100	103	203	88	93	181
77	MA SUNAN DRAJAT	56	55	111	43	53	96

- b. Terdapat 63 (24%) madrasah mengalami kenaikan jumlah siswa, bahkan ada yang mengalami kenaikan secara signifikan. Berikut ini adalah tabel jumlah madrasah yang mengalami kenaikan jumlah siswa:

**Tabel 19**

**Jumlah Madrasah Yang Mengalami Kenaikan Jumlah Siswa**

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Keseluruhan					
		Tahun 2008-2009		TOTAL	Tahun 2009-2010		TOTAL
		Lk	Pr		Lk	Pr	
1	MTSN PACITAN	294	243	537	316	252	568
2	MI MLARAK MAYAK	126	97	223	136	107	243
3	MI MAARIF PATIHAN WETAN	90	94	184	103	92	195
4	MTS AL-ISLAH	197	163	360	163	135	298
5	MTS AL-HASANAH	102	103	205	112	113	225
6	MI KARANGGANDU WATULIMO	78	81	159	76	83	159
7	MI WB IDAYATUTTULLAB DURENAN	103	88	191	101	94	195
8	MTS GUPPI DONGKO	145	95	240	144	110	254
9	MTS NURUL HUDA	76	73	149	74	76	150
10	MTSN WATULIMO	254	235	489	269	246	515
11	MTS AS SYAFIIYYAH POGALAN	81	75	156	91	68	159
12	MA NURUL ULUM MUNJUNGAN	118	218	336	225	248	473
13	MI AL-HUDA	86	83	169	83	90	173

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Keseluruhan					
		Tahun 2008-2009		TOTAL	Tahun 2009-2010		TOTAL
		Lk	Pr		Lk	Pr	
	KEDUNGLO CENKOK NGRONGGOT						
14	MI AINUL HUDA	81	75	156	83	90	173
15	MI NURUL HUDA BANGSRI	68	70	138	65	73	138
16	MIN TANJUNG ANOM	98	90	188	104	92	196
17	MI NURUL HUDA CENKOK	76	92	168	78	90	168
18	MTS AL-HUDA GONDANG	161	157	318	170	148	318
19	MTSN JUWET	104	111	215	110	115	225
20	MTS PSM KEDUNGOMBO TANJUNGANOM	97	101	198	109	121	230
21	MTS AL-MANAR PRAMBON	124	107	231	143	121	264
22	MA DARUSSALAM TANJUNGANOM	142	121	263	151	122	273
23	MTS HASAN MUCHYI	79	106	185	89	110	199
24	MA AL HIKMAH PURWOASRI	131	264	395	115	287	402
25	MTS AL HIKMAH	151	240	391	171	273	444

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Keseluruhan					
		Tahun 2008-2009		TOTAL	Tahun 2009-2010		TOTAL
		Lk	Pr		Lk	Pr	
	PURWOASRI						
26	MA SUNAN KALIJOGO	151	164	315	188	200	388
27	MI MAFATIHUL HUDA MOJO	76	92	168	94	97	191
28	MI AL MURSYIDAH MOJOAGUNG	93	110	203	98	122	220
29	MI ISLAMIYAH BANJARPOH PULOREJO	77	74	151	77	87	164
30	MTS AR-RAHMAH	122	146	268	140	156	296
31	MTS BAHRUL ULUM GENUK WATU	148	146	294	165	155	320
32	MI MIDANUTTA'LIM 1	185	175	360	186	176	362
33	MTSN PANGLUNGAN WONOSALAM	191	209	400	203	217	420
34	MA DARUL FAIZIN MOJOWARNO	54	132	186	72	137	209
35	MI IFTAKHUL ULUM POHBARU	75	54	129	75	54	129
36	MI ISLAMIYAH NGREJENG	67	58	125	68	57	125

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Keseluruhan					
		Tahun 2008-2009		TOTAL	Tahun 2009-2010		TOTAL
		Lk	Pr		Lk	Pr	
37	MI TANWIRURL QULUB	103	103	206	104	105	209
38	MTS ROUDLOH SEMAMBUNG	146	149	295	142	164	306
39	MTS WASILATUL HUDA NGASEM	276	225	501	260	246	506
40	MTS AL-FALAH GAJAH BAURENO	98	118	216	116	115	231
41	MTS YASPIRAH KACANGAN	172	142	314	178	138	316
42	MTS FALAKIYAH JAMPET	114	119	233	118	121	239
43	MA ABU DZARRIN	227	388	615	228	405	633
44	MI HIDAYATUSSIBYAN	112	131	243	119	126	245
45	MI AL MUKHLISIN	97	93	190	95	95	190
46	MI NURUL HUDA	61	81	142	62	82	144
47	MI MA'ARIF NU CUMPLENG	146	136	282	157	144	301
48	MI MUHAMMADIYAH 3	116	90	206	114	104	218
49	MIS THORIQUL HIDAYAH	102	96	198	101	97	198
50	MTS DARUL HIKAM	118	96	214	123	103	226
51	MTS AL MUSLIMUN	103	102	205	115	119	234

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Keseluruhan					
		Tahun 2008-2009		TOTAL	Tahun 2009-2010		TOTAL
		Lk	Pr		Lk	Pr	
52	MTS IHYAUL ULUM	145	178	323	140	154	294
53	MAS FATHUL HIDAYAH	55	98	153	78	121	199
54	MAS RAUDLOTUL ULUM	40	89	129	48	127	175
55	MIS 22 AL IKHLAS JEMBER	132	112	244	138	114	252
56	MIS TARBİYATUL ISLAMİYAH	123	122	245	134	122	256
57	MIMA 32 SALAFIYAH SYAFI'YAH	97	95	192	103	96	199
58	MI ASSALAM PLUS	120	110	230	140	100	240
59	MIS MIFTAUL ULUM	102	104	206	109	126	235
60	MTS WAHID HASYIM	130	181	311	138	181	319
61	MTSN ARJASA	133	117	250	161	119	280
62	MTSN UMBULSARI	180	139	319	220	175	395
63	MTS DARUL MANAN AROSBAYA BANGKALAN	119	92	211	134	133	267

**c. Terdapat kecenderungan stabilitas jumlah siswa.**

Di Jawa Timur terdapat kecenderungan penurunan jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional. Terdapat 31 (12%) madrasah yang jumlah siswanya tidak lulus ujian nasional dan jumlah tersebut cenderung menurun. Pada tahun 2008-2009, jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional sebanyak 288 siswa ; sedangkan pada tahun pelajaran 2009-2010 sebanyak 153 siswa yang tidak lulus ujian nasional. Dengan demikian, telah terjadi penurunan angka tidak lulus ujian nasional sebesar 53%. Berikut ini tabel jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional di madrasah sasaran MEDP;

**Tabel 20**

**Penurunan Jumlah Siswa Yang Tidak Lulus Ujian Nasional**

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Baru			
		Tahun 2008-2009		Tahun 2009-2010	
		Lk	Pr	Lk	Pr
1	MIS MUHAMMADIYAH BUBAKAN	21	19	27	10
2	MTSN PACITAN	3	2	2	0
3	MTSS PONDOK TREMAS	1	0	0	0
4	MTSS MUHAMMADIYAH	0	0	0	0
5	MAS PEMBANGUNAN	4	6	2	0
6	MTS MAARIF	5	7	0	1

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Baru			
		Tahun 2008-2009		Tahun 2009-2010	
		Lk	Pr	Lk	Pr
	KARANGAN				
7	MTS GUPPI BENDUNGAN	7	8	0	1
8	MTS GUPPI DONGKO	1	1	1	4
9	MTS GUPPI POGALAN	1	1	2	1
10	MTSN WATULIMO	8	4	4	1
11	MTS AS SYAFIIYYAH POGALAN	0	0	2	5
12	MAN PANGGUL	24	31	11	13
13	MA NURUL ULUM MUNJUNGAN	0	0	1	0
14	MI ISLAMIYAH KEDUNGGAMBU	2	2	2	2
15	MTS NU MOJOSARI LOCERET	5	2	0	0
16	MTS PSM PACE	0	0	0	1
17	MTS AL-FATAH	0	0	0	1
18	MTS AL-MANAR PRAMBON	14	12	0	0
19	MA DARUSSALAM TANJUNGANOM	15	1	4	0
20	MTS MASLAHIYAH	12	17	3	3
21	MA AL HIKMAH PURWOASRI	7	17	1	0

No	Nama Madrasah	Jumlah Siswa Baru			
		Tahun 2008-2009		Tahun 2009-2010	
		Lk	Pr	Lk	Pr
22	MTS ABDULLOH	0	0	0	1
23	MTS BAHRUL ULUM GENUK WATU	1	1	3	3
24	MTS UMAR ZAHID SEMELO	2	3	0	0
25	MTS WASILATUL HUDA NGASEM	2	0	1	1
26	MTS WALISINGO SUGIHWARAS	0	0	2	1
27	MA ABU DZARRIN	2	0	8	14
28	MTS DARUL MANAN AROSBAYA BANGKALAN	0	0	1	1
29	MTS MIFTAHUL ULUM	12	1	9	1
30	MTSN UMBULSARI	2	1	2	0
31	MTS AL HIDAYAH	1	0	0	0
JUMLAH		152	136	88	65
PERSENTASE		53%	47%	58%	42%

#### 4. Tata Kelola, Manajemen, dan Keberlanjutan Madrasah Sasaran MEDP

Bantuan blok atau Program MEDP merupakan bentuk pengembangan madrasah menuju madrasah yang mandiri, efektif, dan efisien. Bantuan Program MEDP bersifat bottom up, di mana pengajuan bantuan didasarkan pada kebutuhan dan kondisi madrasah. Hal ini menyebabkan bantuan MEDP

sangat bervariasi dan berbeda antara satu madrasah dengan madrasah lainnya. Dengan demikian, madrasah akan memiliki kemampuan tata kelola, memberdayakan sumber daya madrasah, meningkatkan kepemimpinan, pengambilan keputusan partisipatif, dan disertai keberlanjutan madrasah untuk tetap eksis meskipun persainagan antar madrasah dan sekolah semakin tinggi. Tata kelola dan manajemen madrasah yang baik akan menghasilkan:

**a. Efektivitas madrasah**

Efektifitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa hasil.

Dengan demikian dalam pengelolaan sekolah, efektifitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah (Mulyasa, 2002). Menurut Aan Komariah (2005), efektivitas menunjukkan ketercapaian sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas sekolah terdiri dari dimensi manajemen, kepemimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan personel lainnya, siswa, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan kelas, hubungan sekolah dan masyarakatnya.

Efektifitas pendidikan dalam setiap tahapannya berproses pada das sollen dan das sein dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Indikator input, meliputi karakteristik guru, fasilitas, perlengkapan dan materi pendidikan serta kapasitas

manajemen. Kegiatan MEDP dalam bentuk pelatihan untuk guru, kepala madrasah, komite madrasah, bantuan fisik dan non fisik akan menghasilkan kualitas input dan manajemen. Misalnya, performa guru madrasah MEDP semakin professional, penampilan dan penataan bangunan madrasah yang semakin indah, rapi, dan rindang, dan bersih.

- 2) Indikator proses, meliputi perilaku administratif, alokasi waktu guru, dan alokasi waktu peserta didik. Misalnya, pembukuan dan administrasi keuangan madrasah yang semakin tertib dan transparan karena sistem pencatatan dan pelaporan yang teratur dan terbuka. Realisasi Program yang tepat waktu juga indicator efektivitas madrasah dari aspek proses
- 3) Indikator out put, berupa hasil-hasil dalam bentuk perolehan peserta didik meliputi hasil prestasi belajar, sikap, keadilan dan persamaan. Program MEDP berdampak pada peningkatan prestasi siswa, baik prestasi akademik dan non akademik, seperti tingkat kelulusan yang meningkat dan prestasi kejuaraan yang meningkat.
- 4) Indikator out come, meliputi jumlah lulusan keningkat pendidikan berikutnya, prestasi belajar di sekolah yang lebih tinggi dan pekerjaan serta pendapatan (Mulyasa, 2002).

**b. *Effisiensi madrasah***

Efisiensi merupakan aspek yang penting, karena berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Suatu kegiatan dikatakan efisien, jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Dengan demikian, efisiensi dalam pengelolaan pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekolah, pemerataan, keadilan dan demokratisasi dengan didasarkan atas 2 hal, yakni manajemen pendidikan yang profesional dan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan yang meluas.

**c. *Mutu pendidikan yang meningkat***

Mutu bukanlah konsep yang mudah didefinisikan, terutama dalam bidang jasa yang dapat dipersepsi secara beragam. Mutu dapat didasarkan pada mutu mutlak/absolute dan mutu relatif. Mutu secara mutlak memiliki nilai tertinggi, terbaik, dan terunggul karena berkaitan dengan ungkapan kebaikan (*goodness*), keindahan (*beauty*), kebenaran (*truth*), dan idealitas. Mutu dalam arti relative adalah mutu yang berdasarkan standar, seperti standar ISO 9001 yang berfokus pada Jaminan Mutu dalam Pengembangan Produksi, Instalasi, dan Pelayanan; ISO 9002 berfokus pada Jaminan Mutu dalam Produksi dan Instalasi; dan ISO 9003 yang berfokus pada Jaminan Mutu dalam Inspeksi Akhir dan Tes.

Mutu, menurut Ishikawa sebagaimana dikutip Aan Komariah adalah kepuasan kepada pelanggan (*quality is customer satisfaction*). Efinisi ini sejalan dengan pendapat Crosby dalam Aan Komariah bahwa *quality is*

*conformance to custome requirement.* Dengan demikian, mutu adalah layanan yang berkualitas untuk mencapai kepuasan pelanggan. Suatu jasa memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui jaminan mutu agar tidak terjadi keluhan-keluhan pelanggan dan dari pihak produsen tidak melakukan kesalahan-kesalahan.

**d. Produktivitas**

Produktifitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Thomas (1982) dalam Mulyasa (2002) mengemukakan bahwa produktifitas pendidikan dapat ditinjau dari 3 dimensi sebagai berikut :

- 1) Meninjau produktifitas sekolah dari segi keluaran administratif, yaitu seberapa besar dan seberapa baik layanan yang dapat diberikan dalam proses pendidikan, baik oleh guru kepala sekolah maupun pihak lain yang berkepentingan.
- 2) Meninjau produktifitas dari segi keluaran perubahan perilaku, dengan melihat nilai-nilai yang diperoleh peserta didik sebagai suatu gambaran prestasi akademik yang telah dicapainya dalam periode belajar tertentu disekolah.
- 3) Melihat produktifitas sekolah dari keluaran ekonomis yang berkaitan dengan pembiayaan layanan pendidikan di sekolah. Hal ini mencakup “harga” layanan yang diberikan (pengorbanan atau cost) dan “perolehan” yang ditimbulkan oleh layanan itu atau disebut “peningkatan nilai baik”.

Peningkatan tata kelola dan manajemen madrasah sasaran MEDP berimbas pada peningkatan partisipasi perempuan dalam manajemen madrasah, seperti penjelasan tabel berikut ini;

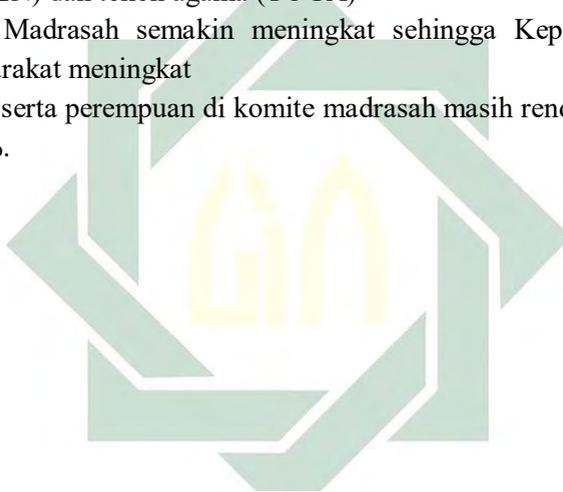
**Tabel 21**  
**Partisipasi Perempuan dalam Komite Madrasah**

No	Nama Kabupaten	Jumlah Pengurus Komite Aktif		Jumlah Pengurus Komite Aktif Tidak Aktif	
		Lk	Pr	Lk	Pr
1	JOMBANG	104	21	3	4
2	BOJONEGORO	116	38	-	-
3	JEMBER	151	38	8	1
4	LAMONGAN	286	33	13	1
5	MALANG	234	66	0	0
6	NGANJUK	127	32	4	1
7	NGAWI	36	11	-	-
8	TRENGGALEK	102	16	-	-
9	KEDIRI	97	8	-	-
10	BANGKALAN	17	7	-	-
11	PACITAN	141	21	-	-
12	PONOROGO	151	23	-	-
JUMLAH		1562	314	28	7
PERSENTASE		83,3%	16,7%	80%	20%

Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa program penguatan tata kelola, manajemen dan keberlanjutan

Madrasah proyek menunjukkan hasil positif, salah satu indikator yang dapat digunakan antara lain:

- a. Keterlibatan komite dalam pengembangan Madrasah cukup baik ditunjukkan dengan jumlah pengurus komite yang aktif jauh lebih banyak daripada yang tidak aktif.
- b. Unsur komite yang terlibat juga tidak hanya terbatas pada Yayasan dan wali murid saja melainkan juga melibatkan unsure tokoh masyarakat (TOMAS), tokoh pendidikan (TOPEN) dan tokoh agama (TOGA)
- c. Citra Madrasah semakin meningkat sehingga Kepercayaan masyarakat meningkat
- d. Peran serta perempuan di komite madrasah masih rendah yaitu 16,7%.



## BAB VI

### RELASI SOSIAL DI MADRASAH SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

#### A. Sistem Sosial di Madrasah

Madrasah dengan sengaja didirikan untuk meyelenggarakan dan mempermudah proses belajar mengajar. Madrasah juga dibentuk dengan tujuan di mana setiap hari orang-orang berhubungan satu sama lain dalam konteks madrasah; ada yang mengajar, ada yang bersusah payah untuk belajar, dan ada lagi yang membersihkan ruangan, menyediakan makanan atau melakukan berbagai kegiatan madrasah. Gambaran ini menunjukkan tujuan pendidikan di madrasah yang lebih kompleks dari apa yang dikesankan oleh definisi Etzioni. Menurut Etzioni, sebagai mana dikutip oleh Philip Robinson, menyatakan bahwa, madrasah adalah unit sosial atau himpunan manusia secara sengaja untuk mencapai tujuan.<sup>45</sup> Tujuannya bisa beraneka ragam mulai dengan tujuan sekedar untuk melewatkan waktu secepat dan seringan mungkin, sampai kepada mereka yang tujuannya untuk menanamkan dalam diri mereka rasa cinta akan pengetahuan, dan mereka yang mengiginkan kesempatan untuk memperoleh sekedar "uang saku". Tiap anggota organisasi akan menginginkan hal-hal yang berbeda atas keterlibatannya, dan banyak diantara

---

<sup>45</sup> Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hal. 237.

tujuan-tujuan itu berada jauh disebalik tujuan pembangunan yang dengan sengaja mendirikan madrasah itu.

Madrasah memiliki tujuan, didukung oleh sistem birokratis, dan didukung tenaga profesional. Menurut Jeanne H. Ballantine, madrasah sebagai organisasi karena didukung oleh sistem yang memiliki input, proses, output, lingkungan, dan didukung umpan balik untuk mengkritisi kinerja seluruh bagian-bagian dalam sistem. Sebagai organisasi, proses di madrasah memiliki struktur, tujuan, fungsi, aspek birokrasi, tenaga profesional, perkembangan, dan kontrol sosial.<sup>46</sup>

Madrasah merupakan sebuah sistem. Bagaimana madrasah dipandang sebagai sebuah sistem? Menurut pendekatan fungsionalis, madrasah merupakan sistem yang tersusun dari bagian-bagian yang saling terkait dalam mencapai tujuan. Jika salah satu bagian tidak berfungsi, bagian yang lain akan terpengaruh dalam mencapai tujuan.

Menurut Perrow, madrasah merupakan sistem karena memiliki bahan mentah yang harus diolah menjadi barang jadi, yaitu individu yang terdidik. Madrasah juga membutuhkan teknologi sesuai dengan input sehingga proses organisasinya dapat diramalkan. Madrasah tidak bisa berdiri sendiri dalam mencapai tujuan organisasi, tetapi dipengaruhi faktor lingkungan. Misalnya, ketika berbicara tujuan madrasah, tidak

---

<sup>46</sup>Jeanne H. Ballantine, *The Sociology of Education*, New jersey: Prentice, 1983, hal. 118.

bisa dipisahkan dari harapan masyarakat yang direfleksikan dalam tujuan madrasah.<sup>47</sup>

Dalam lingkungan madrasah terdapat suatu sistem sosial, yaitu struktur jaringan hubungan sosial antara sejumlah orang yang menempati kedudukan atau posisi tertentu. Adanya sistem sosial itu mengakibatkan adanya struktur organisasi sosial di madrasah, baik menurut pola organisasi formal maupun informal. Pola organisasi formal terbentuk secara resmi dan biasanya digambarkan dalam suatu bagan organisasi dengan menunjukkan garis perintah dan garis konsultasi. Dalam keseluruhan sistem sosial di madrasah, terdapat beberapa kedudukan atau posisi yang membawa prestise tinggi, baik dalam rangka pola organisasi formal maupun informal sehingga anggota organisasi itu mendapat penghargaan dan penghormatan tinggi, berdasarkan peranan atau wewenang yang mereka miliki. Misalnya, dalam rangka pola organisasi formal, kepala madrasah mendapat kehormatan tinggi berdasarkan wewenang yang dimilikinya, maka kedudukan kepala madrasah mendapat prestise tinggi. Demikian pula, kedudukan ketua OSIS mendapat prestise tinggi dan dipandang sebagai posisi terhormat, baik oleh para guru maupun oleh para siswa. Dalam rangka pola organisasi informal, seorang guru yang sudah lama bertugas di madrasah, mendapat penghargaan khusus dan kerap diakui oleh rekan

---

<sup>47</sup> Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi*, hal.

guru lain sebagai seorang pemimpin, meskipun kedudukannya sebagai seorang pemimpin.<sup>48</sup>

Kedudukan itu membawa prestise tinggi, seperti prestise suatu kelompok siswi yang pandai dalam berpakaian dan berhias atau suatu kelompok siswa yang pandai dalam keterampilan naik sepeda motor, dalam memperoleh kedudukan istimewa dalam kalangan siswa. Semua siswa akan kagum dengan prestasi rekan atau teman itu, meskipun bukan prestasi dibidang akademik. Selain itu, terdapat juga kedudukan atau posisi yang membawa prestise rendah, karena orang-orang yang menempati kedudukan itu belum mempunyai wewenang atau belum menunjukkan prestise yang patut dihargai. Misalnya, kedudukan sebagai guru baru membawa taraf prestise rendah; demikian pula kedudukan sebagai siswa baru

Tinggi atau rendahnya prestise yang melekat pada kedudukan tertentu, menunjuk pada status sosial. Status sosial adalah tinggi tau rendahnya prestise (kehormatan) yang diberikan kepada seorang warga madrasah, berdasarkan pada posisi yang dipegangnya dalam keseluruhan sistem sosial yang berlaku di madrasah, baik menurut pola organisasi formal maupun informal. Dengan demikian, seorang kepala madrasah menikmati status sosial tinggi; demikian pula guru senior yang dianggap sebaga seorang pemimpin oleh rekan-rekan guru.

---

<sup>48</sup> W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Media Abadi, 2004, hal.

Ada beberapa alasan, seperti dikemukakan oleh Ballantine, mengapa madrasah dipandang sebagai sistem, yaitu:<sup>49</sup>

1. Madrasah mencakup beberapa bagian-bagian dan pelayanan yang memiliki peran dan fungsi yang jelas untuk mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat (siswa) setelah tamat madrasah.
2. Madrasah memiliki kantor yang didukung tenaga pendidikan dan staff yang menjalankan fungsinya dalam menyelenggarakan pendidikan dan menjamin bahwa rutinitas madrasah tidak mengalami gangguan dan hambatan.
3. Madrasah memiliki ruang-ruang kelas sebagai tempat guru dan murid mengikuti proses belajar mengajar. Ruang kelas menjadi bagian interaksi sosial, memiliki aturan, mekanisme kerja, atmosfer, ukuran kelas, dan tempat siswa bekerja secara individu atau berkelompok. Semua ini berpengaruh terhadap aktivitas di kelas. Aktivitas antara kelas satu dengan kelas lain berbeda-beda. Setiap kelas memiliki iklim dan struktur sosial yang berbeda-beda.
4. Madrasah didukung pelayanan-pelayanan yang menunjang kebutuhan di kelas, seperti pelayanan terkait dengan makan siswa, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, madrasah juga mempunyai fasilitas untuk layanan konseling, layanan khusus aspek psikologis, bantuan tutorial, layanan transportasi, dan perpustakaan.

---

<sup>49</sup> Ballantine, *The Sociology*., hal. 118-120.

5. Semua sistem madrasah ini berada dalam konteks sosial yang luas, termasuk masyarakat dengan berbagai kelas sosial, kelompok minoritas, serta kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dengan madrasah, seperti komite madrasah, pemerintah, kebijakan, aturan, dan perundang-undangan.
6. Sistem madrasah meliputi orang, bangunan, ruang kelas, teks, dan segala perlengkapan. Semua ini menjadi syarat bagi interaksi dengan lingkungan.

Jika digambarkan, gambaran madrasah sebagai sistem sosial adalah seperti gambar dibawah ini:

## **B. Relasi Sosial di Madrasah: Perspektif Teori Jaringan**

Sistem sosial di madrasah menggambarkan bahwa , individu-individu di madrasah yang terhubung bersama untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan sosial ini membentuk hubungan sosial antara sejumlah orang yang menempati kedudukan atau posisi tertentu. Adanya sistem sosial itu mengakibatkan adanya struktur jaringan dalam organisasi sosial di madrasah. Dalam konteks Pendidikan Berbasis Masyarakat, madrasah tidak bisa didekati dengan teori "atomistis", di mana individu-individu di masyarakat dipandang dalam keadaan "terisolasi" dari aktor lain dan memandang individu-individu di madrasah sebagai "ciri pribadi." Pandangan akibatnya akan melihat actor yang menggerakkan sumber daya di madrasah dilihat secara mikroskopik dan mengabaikan hubungan antar aktor.

Dalam realitas sosiokultural rerdapat tindakan-tindakan individu yang saling terhubung. Setiap individu memiliki

keinginan untuk menyatu dengan individu lain dan alam sekitarnya. Keinginan ini untuk memudahkan proses hidup individu. Tindakan sosial dari individu dalam kelompoknya memiliki pola-pola, yang menurut Elly Setiadi dan Usman Kolip di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Imitasi

Dengan imitasi manusia meniru tingkah laku orang lain di sekitarnya yang dipengaruhi oleh tingkat jangkauan inderanya. Sejak lahir, manusia sudah mengimitasi dari dirinya dan orang lain dengan penglihatan, pendengaran, dan perasaannya. Setelah ia mampu melakukan tindakan secara otonom dan sampai dewasa mampu memahami tata pergaulan yang lebih luas, manusia akan menjadi manusia yang kompleks. Dalam kondisi ini, manusia tidak hanya sekedar meniru tetapi sudah mampu melakukan tindakan secara kritis dengan menggunakan akal dan penalaran.

2. Sugesti

Sugesti adalah proses di mana seseorang menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa berpikir kritis terlebih dahulu.

3. Identifikasi

Identifikasi adalah kemampuan memahami dan mempelajari norma-norma atau peraturan-peraturan yang harus ditaatinya.

4. Simpati

---

<sup>50</sup> Elly M. Seetiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala dan Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada, Cetakan I, 2011, h. 66-70.

Simpati adalah faktor tertariknya individu atau kelompok orang terhadap individu atau sekelompok orang yang lain. Simpati muncul bukan dari pemikiran yang logis dan rasional tetapi berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana dalam proses identifikasi. Orang tiba-tiba merasa tertarik bukan karena salah satu ciri, tetapi karena keseluruhan cara tingkah laku orang lain tersebut. Simpati mengakibatkan dorongan simpatisan (orang yang tertarik) untuk menjalin hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih.

Tindakan aktor dari tiap-tiap individu di madrasah berada dalam suatu struktur sosial karena "melekat" dalam hubungan pribadi konkret dalam struktur jaringan. Hubungan ini oleh Granoveter, sebagaimana dijelaskan oleh George Ritzer dan Douglas J. Goodman,<sup>51</sup> berlandaskan pada gagasan bahwa setiap aktor individu baik individu atau kolektivitas mempunyai akses yang berbeda terhadap sumber daya yang bernilai kekayaan, kekuasaan, atau informasi. Hubungan ini menggambarkan ikatan antar aktor yang bisa jadi terikat secara kuat atau lemah. Granoveter, membedakan ikatan yang kuat seperti hubungan antara seseorang dan teman karib. Contoh ikatan yang lemah adalah antar individu dengan kenalannya. Ikatan yang kuat terbentuk karena adanya ikatan sosial di masyarakat. Dalam lembaga di masyarakat, ikatan yang kuat ataupun ikatan yang lemah keduanya sangat penting karena dapat menjadi jembatan antar dua kelompok yang terisolir menjadi kekuatan. Isolasi antar kelompok atau

---

<sup>51</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, Cetakan ke-3, 2005. H. 383

individu jika tidak dijumpai akan menyebabkan sistem sosial semakin terfragmentasi. Dalam sebuah kelompok yang ikatan kelompoknya kuat, sedangkan ikatan individu yang lemah akan merasa dirinya terisolir dan akan kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Bagi Granoveter, ikatan yang kuat bisa mencegah isolasi dan memungkinkan individu mengintegrasikan dengan lebih baik dengan kelompok. Ikatan yang kuat akan memotivasi lebih besar untuk saling membantu dan lebih cepat untuk saling memberikan bantuan.

### C. Modal Sosial dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madrasah

Theodore W. Schultz dari Universitas Chicago adalah orang yang pertama memperkenalkan teori pendidikan sebagai *capital*. Di hadapan rapat tahunan Perhimpunan Ekonomi Amerika dalam bulan Desember 1960 dia mengemukakan teori *Investment in Human Capital*<sup>52</sup> teori tentang hubungan antara pendidikan dan ekonomi.<sup>52</sup> Schultz dianggap sebagai peletak dasar dari *Economics of Education*. Apa yang dikemukakan oleh Schultz adalah sangat sederhana: melalui pendidikan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan bukanlah semata-mata suatu kegiatan konsumtif tetapi merupakan suatu kegiatan investasi, yaitu investasi dalam sumber daya manusia. Dalam pidato Theodore W. Schultz ketika memperoleh nobel bidang ekonomi pada tahun 1979,

---

<sup>52</sup> H.A.R Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2002, hal. 407.

dikatakan bahwa faktor yang menentukan di dalam memperbaiki kemakmuran rakyat yang miskin bukanlah ruang atau lahan pertanian, melainkan perbaikan dari kualitas penduduk dan pemajuan ilmu pengetahuan.<sup>53</sup>

Pidato Schultz mengindikasikan betapa besarnya nilai investasi sumber daya manusia di dalam peningkatan ekonomi suatu bangsa. Pendidikan dan pelatihan ternyata memberikan kontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori Schultz tersebut kemudian dikembangkan oleh para pakar, baik di dalam bidang ekonomi maupun di dalam bidang pendidikan.

Dalam pembahasan ini manusia merupakan capital yang menunjuk pada tenaga kerja dan pemegang capital sebagaimana tercermin di dalam ketrampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerja seseorang. Robert M Lawang sebagaimana dikutip Damsar,<sup>54</sup> merumuskan capital manusia sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tertentu. Semua pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan semua atribut serupa ini dipandang sebagai capital manusia.

Ada tiga dimensi, capital manusia dalam meningkatkan pendapatan. Pertama dimensi kualitatif meliputi keahlian,

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Cetakan kedua (Jakarta: Kencana, 2012), h. 178.

ketrampilan, dan pendidikan. Kedua, dimensi produktivitas berupa kemampuan kerja dan kualitas kerja. Ketiga, dimensi hasil dalam bentuk penambahan penghasilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, pendidikan merupakan saluran dalam menambah kapasitas pendapatan.

Selanjutnya, akan dibahas modal sosial dalam pendidikan. Tujuan dari pembahasan ini adalah memahami implementasi modal sosial dalam pengembangan madrasah. Penjelasan sebelumnya adalah munculnya pandangan pendidikan sebagai capital. Pembahasan yang tak kalah pentingnya dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah tentang modal sosial. Teori modal sosial dapat dijadikan sebagai salah satu langkah penting untuk mencapai keberhasilan pengembangan madrasah. Penggunaan teori modal sosial dalam pengembangan mutu madrasah menganut prinsip dasar, bahwa hanya organisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang menghargai pentingnya kerjasama yang dapat maju dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Suatu kelompok masyarakat juga tidak akan maju jika hanya mengandalkan bantuan dari luar untuk memenuhi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan pendidikan. Modal sosial juga menekankan prinsip kemandirian untuk memecahkan masalah madrasah. Seluruh stakeholder madrasah secara bersama-sama harus memikirkan dan melakukan langkah-langkah terbaik untuk memecahkan masalah di madrasah dengan mengerahkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Menurut Rudi Syahra, bantuan hibah untuk madrasah dipandang perlu

sebagai pelengkap untuk memicu inisiatif dan produktivitas yang muncul dari warga madrasah sendiri.<sup>55</sup>

Modal sosial telah menjadi obyek dari berbagai disiplin ilmu, meliputi Sosiologi, Antropologi, Politik, dan Ekonomi. Sejak awal 1990-an sampai awal abad ke-20, teori modal sosial mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat.<sup>56</sup> Pada awal abad ke-20 Lyda Judson Hanifan, menurut Sasmita,<sup>57</sup> yang pertama kali memperkenalkan konsep modal sosial dalam tulisannya yang berjudul "*The School Community Centre*". Sebagai seorang pendidik di Amerika Serikat, Hanifan memperkenalkan konsep modal sosial dari pemikiran bahwa dibutuhkan kebersamaan dan kerjasama dari anggota masyarakat yang berkepentingan untuk memecahkan masalah mereka. Tidak mungkin mereka dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Konsep modal sosial yang dikemukakan Hanifan mengandung arti bahwa satu unit sosial, berlangsung pola hubungan timbal balik yang didasari oleh prinsip kebajikan bersama (*social virtues*), simpati dan empati (*altruism*) serta keeratan hubungan antar individu (*social cohesivity*).

Dengan demikian, modal sosial bekerja di bawah prinsip relasi sosial yang mengutamakan ikatan antar sesame

---

<sup>55</sup> Rudi Syahra, "*Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi*," dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003, h. 1.

<sup>56</sup> Ginanjar Kartasamita, "*Memperkuat Modal Sosial dalam Menghadapi Bencana*." Makalah disampaikan dalam Disnatis Universitas Paramadina ke-19 Jakarta, 10 Januari 2017.

<sup>57</sup> Ibid.

individu. Dalam pemberdayaan, masyarakat dapat memanfaatkan jejaringnya sebagai sumberdaya yang sangat fundamental. Modal sosial sering dihubungkan dengan faktor-faktor, seperti jejaring, stabilitas sosial, integrasi, kepercayaan, solidaritas, dan toleransi. Selanjutnya, faktor-faktor ini pada gilirannya digunakan untuk menjelaskan implikasi maksimal pada pembangunan masyarakat atau sebagai kekuatan yang mampu membangun masyarakat atau madrasah sesuai dengan idealitas-ideologik.<sup>58</sup>

Di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, konsep modal sosial menjadi populer setelah munculnya empat tokoh, yaitu Pierre Bourdieu, James S Coleman, Robert D. Putnam, dan Francis Fukuyama.<sup>59</sup> Pierre Bourdieu, sebagaimana dikutip oleh Dwiningrum mendefinisikan modal sosial sebagai sejumlah sumber daya, aktual maya yang berkumpul pada seseorang individu atau kelompok. Mereka memiliki jaringan yang tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang terlembagakan.<sup>60</sup> Dengan menjadi anggota suatu kelompok orang akan mendapat dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif karena modal sosial menurut Bourdieu didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Rudi Syahra, "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi"...

<sup>59</sup> Kartasmita "Memperkuat Modal Sosial..."

<sup>60</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan (Perspektif Teori dan Praktik)*. Yogyakarta; UNY Press, 2014.

<sup>61</sup> Syahra, "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi"... 3.

James Coleman, dalam Damsar, mendefinisikan modal sosial sebagai seperangkat sumber daya yang inheren dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial anak. Modal sosial, menurut Coleman juga merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur individu.<sup>62</sup> Dengan demikian, modal sosial menjembatani antara tindakan individu dan kolektif. Ada dua unsur penting dalam modal sosial James Coleman, yaitu (1) modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial, dan (2) modal sosial memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut. Coleman juga menyatakan adanya tiga pilar utama dalam modal sosial. Pertama, kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial, Misalnya, jika seseorang menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan madrasah, seseorang dengan kepercayaan, bahwa pengelola madrasah akan melanjutkan sumbangan tersebut untuk pembangunan sebagai keajiban dengan dasar Islam. Jika tidak dilanjutkan maka berarti menyalahi kepercayaannya. Sumbangan pembangunan pendidikan dan kewajiban merealisasikan kepercayaan ini didasari ajaran Islam yang memberi sumbangan dan melaksanakan sumbangan untuk pembangunan pendidikan, sama-sama berharap akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kedua pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan

---

<sup>62</sup> Damsar, *Sosiologi Pendidikan...*.h. 183.

dalam masyarakat. Arus informasi yang tidak lancar cenderung menyebabkan orang menjadi tidak tahu atau ragu-ragu sehingga tidak berani melakukan sesuatu. Ketiga adalah norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif.<sup>63</sup> Menurut Coleman, modal sosial inheren di dalam struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang dan di antara individu-individu yang mempunyai karakteristik tidak dapat dipisahkan dari individu. Modal sosial bukan sesuatu yang nyata seperti modal fisik. Modal sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesejahteraan. Masyarakat dengan kesejahteraan tinggi, memberikan bantuan sosial.<sup>64</sup>

Robert Putnam, dalam Damsar mendefinisikan modal sosial sebagai "jaringan, norma, dan kepercayaan" yang timbul di antara anggota perkumpulan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk manfaat bersama.<sup>65</sup> Ketiga elemen penting dalam modal sosial, yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan adalah tritunggal yang mendominasi diskusi konseptual Putnam yang menekankan perbedaan modal dengan modal-modal lainnya. Jaringan sosial perlu dikembangkan dan dikuatkan karena adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. Norma sosial yang berlaku bagi terbentuknya modal sosial perlu ditaati bersama. Kepercayaan antar individu perlu dibina dan ditumbuhkembangkan. Kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan

---

<sup>63</sup> Syahra, "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi" ..h. 4-5.

<sup>64</sup> Dwiningrum, *Modal Sosial*....9.

<sup>65</sup> Damsar, *Sosiologi Pendidikan*..

ermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu.

Sebagai fitur-fitur kehidupan sosial, jejaring, norma, dan kepercayaan, kesemuanya bisa digunakan oleh peserta untuk bertindak bersama-sama agar lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat.<sup>66</sup>

Yang menjadi gagasan utama dalam modal sosial adalah bahwa jaringan sosial menjadi asset yang sangat bernilai. Kohesi sosial akan terbentuk dengan adanya jaringan sosial yang berlanjut dengan kerja sama untuk memperoleh manfaat timbal balik. Walaupun pada awalnya, ikatan sosial sebagai modal adalah sekedar metafora dan ini adalah analogi longgar dengan "modal ekonomi". Menurut kartasamita, modal sosial memiliki karakteristik sebagai berikut.<sup>67</sup>

1. Modal sosial seperti modal yang lain, dapat diinvestasikan dengan harapan keuntungan yang akan diperoleh.

---

<sup>66</sup> Syahra, "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi"..h. 6.

<sup>67</sup> Kartasamita, "Modal Sosial..." h. 3-4.

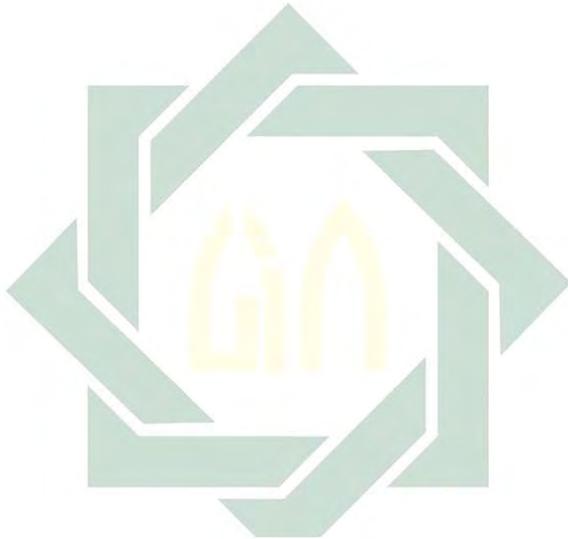
2. Modal sosial dapat digunakan untuk berbagai kegiatan (*appropriate* dan *convertible*).
3. Modal sosial dapat disubstitusikan atau dikomplementasikan dengan sumber daya lainnya.
4. Seperti modal lainnya, modal sosial harus dirawat. Modal sosial seperti udara yang bersih atau lingkungan yang aman adalah *collective goods*, artinya bukan hanya untuk dinikmati oleh yang menghasilkannya.
5. Modal sosial tidak terletak pada pelakunya, tetapi dalam hubungan dengan pelaku-pelaku lain. Hasil investasi atau pengembangannya tidak dapat diukur.

Dalam perkembangan selanjutnya modal sosial berperan dalam membangun kesuksesan.. Kunci keberhasilan dalam komunitas.<sup>68</sup> Pertama, diperlukan organisasi atau perkumpulan yang menjadi wahana bagi warga untuk membicarakan dan menyepakati berbagai hal yang merupakan kepentingan bersama. Kedua, seluruh warga mendapat tempat masing-masing dalam organisasi itu, dan diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Ketiga adanya peran dan partisipasi aktif dari seluruh warga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat bagi kepentingan bersama. Keempat, kesadaran diri setiap individu dalam berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bukan karena terpaksa. Kelima setiap warga memberi kontribusi sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-

---

<sup>68</sup> Syahra, "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi" ..h. 17.

masing. Keenam, tidak cepat patah semangat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.



## BAB VII

### PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH MENUJU STANDAR NASIONAL

#### A. Relasi antar Stakeholder Madrasah dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat

Mutu Pendidikan sangat bergantung pada stakeholder lembaga Pendidikan. yaitu masyarakat itu sendiri. Masyarakat secara langsung bertanggung jawab atas keberadaan dan proses pendidikan yang dimilikinya.<sup>69</sup> Penyelenggaraan pendidikan harus mengikutsertakan masyarakat karena masyarakat adalah *the stakeholder* yang pertama dan utama dari proses pendidikan. Dengan demikian, proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana pendidikan, termasuk pula mutu pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung mendorong sekolah menjadi maju. Berdasarkan data, madrasah yang berhasil dalam pengembangan mutu adalah madrasah yang telah mengoptimalkan keterlibatan masyarakat, terutama orang tua, dalam mencapai tujuan madrasah. Orang tua murid diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengenali madrasah, bukan saja bentuk fisiknya, tetapi juga program pendidikannya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Suryadi, Ace, "Menuju Otonomi Pendidikan" (Desember 30, 2002) <http://www.republika.co.id>

<sup>70</sup> Azra, Azyumardi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas, 2002). h.. 5.

Dalam mengembangkan madrasah, kita perlu menjadikan madrasah menjadi kepentingan semua stakeholder madrasah, baik internal maupun eksternal, seperti siswa, guru, kepala madrasah, tenaga kependidikan, yayasan, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Mukhamad Iksan mengandaikan adanya syarat syah dalam pengembangan madrasah”, yaitu menjadikan madrasah sebagai kepentingan yang mendesak bagi semua pihak.<sup>71</sup> Selanjutnya Iksan mengkontekstualisasikan gagasan Deems bersaudara, Richard S. Deems, Ph.D dan Terry A Deems, Ph.D tentang *Involvement* (keterlibatan) stakeholder madrasah sebagai titik awal yang penting dalam pengembangan madrasah. Namun, keterlibatan saja tidak cukup karena tidak menjamin orang yang diundang langsung merasa hidupnya untuk madrasah.

Syarat selanjutnya dibutuhkan keterlibatan batiniah (*engagement*). Iksan mensitir gagasan Deems dalam karyanya *Loading in Tough Times the Manager's Guide to Responsibility, Trust, and Motivation*, bahwa *when people are engaged, they voluntarily commit their minds, hearts, and talents*. Artinya, ketika setiap dari kita sudah terikat batinnya dengan madrasah, maka dengan sukarela kita akan memiliki komitmen atas pikiran, hati, dan talenta kita untuk madrasah.<sup>72</sup>

Keterlibatan (*involvement*) dan ikatan batin (*engagement*) adalah dua hal yang saling melengkapi dalam pengembangan madrasah. *Involment* biasanya melibatkan stakeholder madrasah dalam bentuk pembahasan-pembahasan yang bersifat diskusi.

---

<sup>71</sup> Mukhamad Iksan, *Belajar dari, oleh, dan untuk Madrasah: Catatan Reflektif dalam Memperkuat Kapasitas dan Mutu Pendidikan*. (Semarang: Fatawa, 2014) h. 138.

<sup>72</sup> Ibid.

Sedangkan keterikatan batin mengandung rasa kepemilikan atau memantik inovasi, melayani, dan mencurahkan pikiran, tenaga, dan pikiran dengan berbuat yang sebaik-baiknya. Keterlibatan (*involvement*) dan ikatan batin (*engagement*) perlu diterjemahkan ke dalam berbagai upaya untuk mengikat batin orang dalam mencapai tujuan bersama yang lebih besar.

*Engagement* dalam bidang pendidikan dan persekolahan yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan kalangan public dan peneliti, sebagaimana dipaparkan oleh Robert M. Klassen dkk.,<sup>73</sup> penting posisinya dalam memberi semua siswa akses kepada guru yang sangat terlibat dalam pekerjaan mereka (*access to teachers who are highly engaged in their work*). *Engagement* terutama bagi pekerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas guru dan kepala madrasah dalam tugasnya. *Engagement* merupakan index penting bagi kualitas kerja.<sup>74</sup>

Membangun pemahaman tentang keterlibatan guru di tempat kerja sangat vital dan memiliki peran kritis terhadap mutu pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa level sikap dan motivasi guru akan ditransmisikan ke siswa sehingga *engagement* guru dalam pembelajaran dan pendidikan sangat penting. Keterlibatan kerja *work engagement* adalah konsep motivasi yang mengacu pada alokasi sukarela sumber daya pribadi yang

---

<sup>73</sup> Robbert M. Klassen dkk., "Measuring Teacher Engagement: Development of the Engaged Teacher Scale (ETS)" dalam *Frontline Learning Research: an Official Journal of EARLI*, 2 (2013), h. 33-52.

<sup>74</sup> Bahadir Gulbahar, "The Relationship between Work Engagement and Organizational Trust: A Study of Elementary School Teachers in Turkey" dalam *Journal of Education and Training Studies*, vo. 5, No. 2, {ebruari 2017, h. 149.

diarahkan pada berbagai tugas yang dituntut oleh tugas vokasional tertentu<sup>75</sup>

Guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan. Meskipun fasilitas pendidikannya lengkap dan canggih, namun bila tidak ditunjang oleh keberadaan guru yang berkualitas maka mustahil akan menimbulkan proses belajar mengajar yang maksimal. Menurut Darling-Hammond dalam artikelnya *Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence*, sebagaimana dipaparkan dalam laporan project bantuan untuk Pendidikan dan pembaruan kolektif, bahwa guru adalah stakeholder kunci dalam sistem pendidikan yang berpengaruh terhadap mutu Pendidikan.<sup>76</sup>

McKinsey & Company termuat dalam laporan penelitian pada periode bulan Mei 2006 – Maret 2007, berjudul *How the world's best-performing school systems come out on top*, September 2007 bahwa *The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers*”, kualitas sebuah sistem pendidikan tidak bisa melebihi kualitas para gurunya. Secanggih apapun sistem dan fasilitas lengkap yang dimiliki sekolah dan madrasah, bila gurunya masih tidak kompeten dan tidak professional, maka harapan dan ketersediaan fasilitas adalah, sebuah kesia-siaan. Demikian juga sebaliknya, bila guru kreatif dan hebat, dalam lingkungan sekolah dan madrasah, secara perlahan proses pembelajaran dan kompetensi siswa akan dicapai. Guru yang hebat akan menginspirasi siswa untuk sukses. sebaliknya, guru yang tidak kompeten akan mematikan harapan dan keberhasilan siswa sebagaimana digambarkan Mochammad

---

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup>Tim Project Grantmakers for Education and Collective Invention, *Toolkit for Teacher Engagement*

Iksan, bahwa *its need the whole teachers for a school to be successful, and it takes only one teacher to make the whole school failed*. Artinya untuk sukses satu madrasah perlu kerja dan performa semua gurunya, dan perlu satu guru saja yang akan menghancurkan satu madrasah.<sup>77</sup>

Performa guru berkualitas dan hebat bergantung pada kepemimpinan kepala madrasah yang profesional. Hasil penelitian di berbagai negara maju seperti Amerika, Kanada, dan Inggris menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat potensial dalam mendorong hasil pendidikan yang berkualitas terutama dalam mendistribusikan tugas dengan guru agar terjadi *engagement* dalam pekerjaan baik di kalangan guru maupun kepala madrasah. Distribusi peran dan tanggung jawab yang baik antara guru dan kepala madrasah ini akan menjadi syarat penting terwujudnya pembelajaran dan Pendidikan berkualitas.<sup>78</sup> Kepala madrasah adalah pimpinan pembelajaran di madrasah. Tugas kunci kepala madrasah yang menjadi bagian integral dari kompetensi kepala madrasah, adalah kepemimpinan manajerial dan instruksional yaitu kepemimpinan untuk mengendalikan seluruh kegiatan pembelajaran, mendampingi guru, dan terlibat secara batin atau *engage* dalam aktivitas pembelajaran.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Maria Vlachadi dan Maria Ferla, "Differentiation of Teachers` and Principals` Engagements in Distributed Leadership according to Their Demographic Characteristic" dalam *Journal of Education and Learning*, Vol. 4, No. 2, 2013, h. 20-21.

<sup>79</sup> Arman, Syamsul Bachri Thalib, dan Darman Mandar, "The Effect of School Supervisors Competence School Principals Competence on Work Motivation and performance of Junior High School Teachers in Maros Regency Indonesia" dalam *International Journal of Enviromental and Science*

Pengembangan kompetensi guru bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala madrasah, tetapi juga pengawas. Pengawas memiliki peran penting dalam memotivasi dan mengarahkan guru dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran maupun evaluasi pembelajaran.<sup>80</sup>

Dalam sistem pendidikan yang desentralistik, *involvement* dan *engagement* stakeholder madrasah perlu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang lebih luas, seperti organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, instansi terkait, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Manajemen berbasis madrasah sebagai konsekuensi desentralisasi atau otonomi pendidikan, memberikan kewenangan kepada madrasah untuk mengelola madrasah berdasarkan kebutuhan dan kondisi madrasah. Yang memahami kebutuhan dan kondisi madrasah adalah semua warga madrasah itu sendiri. Semua madrasah memiliki potensi masing-masing, seperti SDM yang berkualitas, sarana yang lengkap, siswa yang unggul, dan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Guru yang berkualitas dan berdedikasi tinggi tidak dapat bekerja secara terarah jika tanpa dikelola secara benar dan tertib. Sarana dan prasarana yang memadahi tidak berfungsi secara maksimal atau optimal jika tidak dimanfaatkan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah bukan hanya kelengkapannya, tetapi juga kemanfaatannya, Siswa-siswa yang unggul jika dididik secara terarah, teratur, dan tertib akan menjadi produk pendidikan yang berkualitas. Begitu pula dengan partisipasi masyarakat akan meningkat apabila dikoordinasikan secara cermat.

Membangun smadrasah adalah proses berkelanjutan yang menfokuskan pada perubahan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mengembangkan madrasah membutuhkan strategi perbaikan yang menggunakan prinsip-prinsip dan praktek ilmu

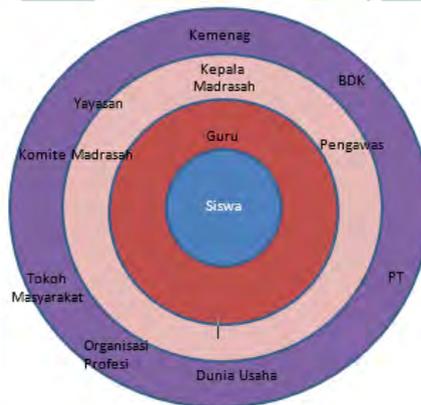
---

*Education*, 2016, vol. 11, No. 15, h. 7310.

<sup>80</sup> *Ibid.*

keperilakuan untuk meningkatkan efektivitas individu, kelompok dan organisasi.

Madrasah sebagai sistem sosial, individu-individu di madrasah harus terhubung bersama untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan sosial ini membentuk hubungan sosial antara sejumlah orang yang menempati kedudukan atau posisi tertentu. Adanya sistem sosial itu mengakibatkan adanya struktur jaringan dalam organisasi sosial di madrasah. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan madrasah tidak bisa didekati dengan teori "atomistis", di mana individu-individu di masyarakat dipandang dalam keadaan "terisolasi" dari aktor lain dan memandang individu-individu di madrasah sebagai "ciri pribadi." Setiap individu memiliki peran karena masing-masing individu adalah aktor yang menggerakkan sumber daya di madrasah. Hubungan stakeholder madrasah dalam meningkatkan mutu Pendidikan dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 1  
Hubungan Stakeholder Madrasah

Dari gambar tersebut Kepala madrasah adalah aktor penting dalam lembaga pendidikan yang mempengaruhi kemajuan sekolah karena baik tidaknya kualitas sekolah sangat dipengaruhi oleh pola kepemimpinannya. Ibarat kereta api, keberadaan kepala sekolah seperti lokomotifnya. Jika dia bisa berperan dengan baik, rangkaian gerbong di belakangnya akan berjalan dengan baik. Jika pimpinan lembaga pendidikan tidak memiliki visi untuk meningkatkan mutu pendidikan hampir dapat dipastikan lembaga yang dipimpinnya tidak akan maju dan bermutu.

Kepemimpinan adalah istilah yang memiliki banyak makna di dalam organisasi termasuk dalam pendidikan. Dalam pengelolaan sekolah, peran kepala sekolah sangat menonjol. Bukti bahwa peran tersebut sangat kuat, hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberadaan kepala sekolah yang baik, sangat besar sumbangannya terhadap sekolah efektif. Tidak ada madrasah yang bermutu memiliki kepala madrasah yang bermutu rendah.

Dilaporkan bahwa *School Improvement Program* (Program Perbaikan Sekolah) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri Columbus, Ohio, selama tahun ajaran 1982/1983 untuk memperbaiki prestasi akademik siswa dan berbagai ketrampilan dasar, berhasil meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ini karena didukung oleh kepemimpinan yang kuat. Gibbons (1986), sebagaimana dikutip oleh Moedjiarto,

Standfield, dalam Moedjiarto, melakukan penelitian selama 20 bulan, menggambarkan sekolah dasar Garvin, Missouri. Ia mengamati perilaku kepemimpinan kepala sekolahnya. Dalam perspektif pola kepala sekolah yang efektif, kepala sekolah dipandang sebagai “ksatria” yang menyelamatkan anak-anak

dengan jalan memberikan pendidikan yang efektif. Ketika tokoh pendidik ini baru tiba di sekolah tersebut, dijumpainya prestasi siswa yang rendah, disiplin yang tak terwujud, dan moral staf yang kurang baik.

Ellis, sebagai mana dirujuk Moedjiarto, dalam penelitiannya menemukan sekolah efektif karena kepala sekolahnya adalah seorang pemimpin instruksional yang cakap. Pimpinan sekolah yang kurang cakap dan kreatif, akan menyebabkan sekolah menjadi tidak efektif. Demikian pula Williams yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang berhasil, mempunyai kepala sekolah dengan kepemimpinan instruksional yang kuat. Dari kepemimpinan yang kuat tercipta harapan-harapan yang tinggi, iklim belajar yang teratur, dan penekanan kuat pada aktivitas membaca.

Pemikiran tradisional tentang kepemimpinan sekolah adalah membayangkan pemimpin adalah super hero, kepala sekolah yang kharismatik dengan kemampuannya sendiri memimpin sekolah untuk menentukan keberhasilan siswa. Masalah yang timbul dari mitologi ini adalah guru kurang dilibatkan dalam mendesain kurikulum, penilaian, dan pencapaian siswa, lebih jauh kepemimpinan tunggal ini tidak bisa menjamin sustainable program sekolah. Jenis kepemimpinan seperti ini jika kepala sekolah meninggal, maka meninggal pula sistem yang ada. Super hero di dunia seperti sekarang ini menyebabkan sekolah sulit berkembang.

Di dalam masyarakat, beredar semacam mitos bahwa kepemimpinan memang telah ditakdirkan untuk orang-orang tertentu saja. Kepemimpinan bukanlah Sesuatu yang kita bawa

sejak lahir. Kepemimpinan juga bukan sesuatu yang Bersifat mistik. Kepemimpinan merupakan suatu kumpulan tindakan yang Dipelajari sekaligus diamati .Banyak sekali orang biasa yang mampu memandu Orang lain untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Pada.hakekatnya, kepemimpinan merupakan urusan semua orang. Kita mendapatkan kepercayaan Diri yang dibutuhkan untuk memimpin dengan cara mempelajari diri sendiri. Kita perlu mempelajari ketrampilan, bakat, prasangka serta kelemahan yang Ada pada diri kita. Kita perlu membangun rasa percaya diri dengan mengembangkan Kekuatan dan mengatasi kelemahan kita. Kita dapat belajar lewat pelatihan Namun kita juga harus belajar dengan mengamati orang lain dan juga dari Pengalaman kita sendiri. Kepemimpinan bisa dilukiskan sebagai kemampuan untuk memberikan pengaruh Positif kepada orang lain. Orang memimpin atas alas an yang berbeda-beda. Namun. Satu hal yang biasanya dimiliki para pemimpin adalah mereka memiliki Kecintaan yang mendalam pada hidup dan pada apa yang mereka kerjakan. Semua ini pada hakekatnya tentang sikap. Para pemimpin tidaklah lahir begitu saja. Mereka belajar bagaimana cara memimpin . Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah menjadi pemimpin. Ketika seseorang tergugah untuk memimpin, mereka memegang kontrol diri mereka sendiri. Mereka ingin agar organisasi atau sekolah mereka menjadi jauh lebih baik. Mereka.menggali.berbagai.kesempatan. Mereka memberikan pengaruh kepada Orang lain agar melakukan pekerjaan sebaik-baiknya . Mereka memecahkan Masalah. Mereka memberikan kontribusi pada kemajuan orang lain. Mereka Melakukan sesuatu untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Tak satu pun dari semua kemampuan tersebut yang membutuhkan gelar tertentu.

Sebagai pimpinan madrasah, kepala madrasah yang memiliki peran penting dalam menjalin ikatan dengan seluruh pemangku kepentingan. Kepala madrasah yang merajut ikatan-ikatan kuat dalam mengelola semua relasi sosial di madrasah. Kemampuan mengarahkan dan menggerakkan semua warga agar berpartisipasi dan memainkan peran masing-masing baik dengan pola imitasi, sugesti, identifikasi, maupun simpati. Dalam pola imitasi, transparansi, sosialisasi program, atau memberikan penghargaan atas kontribusi warga sekolah dapat mendorong munculnya perilaku dan sikap baik yang meniru dari berbagai informasi atau tindakan setiap aktor dari warga madrasah. Dengan sugesti, warga madrasah dapat menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa berpikir kritis terlebih dahulu. Pola simpati adalah bentuk relasi pemangku kepentingan yang mendorong hadirnya simpatisan (orang yang tertarik) untuk menjalin hubungan kerja sama dalam mendukung program pengembangan mutu di madrasah..

Mutu Pendidikan dalam perspektif produk, menurut Edward Salis dalam bukunya *Total Quality Manajemen*, adalah mutu lulusan. Indikator kunci dari mutu lulusan adalah penguasaan kompetensi siswa dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Kompetensi siswa sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru dalam menjalankan tugas Pendidikan dan pembelajaran. Kompetensi guru sangat ditentukan oleh kompetensi kepala madrasah. Kompetensi guru dan kepala madrasah ditentukan oleh kompetensi pengawas madrasah. Mensinergikan kompetensi siswa, guru, kepala madrasah, dan

pengawas membutuhkan keterlibatan komite , yayasan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Ellen Behrstock, ada empat langkah dalam membangun komunikasi dan mempertahankan keberlanjutan partisipasi stakeholder pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, yaitu (1) mengidentifikasi kelompok stakeholder yang menjadi faktor kunci penentu mutu pendidikan; (2) menetapkan peran dan harapan; (3) mengembangkan rencana komunikasi antar stakeholder, dan (4) saling memberi masukan.<sup>81</sup>

Pertama, mengidentifikasi stakeholder madrasah sebagai pemangku kepentingan dan kebijakan terhadap mutu madrasah. Dalam program pendampingan ini akan diutamakan stakeholder internal yang berkepentingan secara langsung terhadap mutu madrasah, seperti guru, kepala madrasah, yayasan, komite madrasah, dan organisasi yang mendukung pengembangan kompetensi guru dan kepala madrasah. Berikut ini akan digambarkan hubungan engagement stakeholder dengan mutu madrasah:

Kedua, menetapkan peran stakeholder melalui pemetaan *involvement* dan *engagement* stakeholder madrasah dalam mewujudkan madrasah bermutu. *Engagement* stakeholder madrasah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *work engagement* dan *non-work engagement*. Untuk meningkatkan *work engagement* guru kepala madrasah dengan melakukan *capacity building* melalui pelatihan guru dan kepala madrasah serta mendorong pengembangan profesi guru dan kepala

---

<sup>81</sup> Ellen Behrstock-Sherratt, Kietha Biggers, dan Jenni Fetters, *Policy-to- Practice Brief, Lesson Learned on Communication and Engagement for Educator Evaluation: Colorado Case Study* (National Comprehensive Center for Teacher Quality, 2012), h. 5-11.

madrasah terutama melalui forum profesi guru dan kepala madrasah. Forum komunikasi guru adalah kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MGMP), di mana forum ini adalah professional learning community atau komunitas belajar profesi. Sedangkan kepala madrasah didorong melakukan pengembangan profesi melalui forum komunikasi kepala madrasah yang dikenal dengan Keelompok Kerja Kepala Madrasah atau KKM.

Ketiga, pengembangan pola komunikasi dirancang berdasarkan pemetaan *involment* dan *engagement stakeholder* disertai dengan pelatihan, dan pendampingan. Sinergi antar stakeholder akan membangun pola komunikasi yang baik dalam meningkatkan mutu madrasah.

Keempat, komunikasi yang baik dan inten akan menjadi media untuk saling berbagi informasi dan memberikan masukan. Komunikasi berkelanjutan dan sharing informasi sangat mendukung bagi pengembangan profesi guru dan kepala madrasah secara berkelanjutan. Guru dan kepala madrasah yang professional adalah salah satu faktor penting terwujudnya mutu madrasah sehingga akan tercipta sustainability atau keberlanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan.

Dari gambar diagram hubungan antar stakeholder di madrasah dapat dipahami bahwa hubungan dalam bentuk engagement yang kuat antara guru dan siswa akan menghasilkan partisipasi akademik maupun non akademik bagi peserta didik. Partisipasi peserta didik dapat ditampilkan dalam bentuk prestasi dan penguasaan kompetensi. Penguasaan kompetensi adalah pencapaian kognisi dan skill yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Guru adalah ujung tombak dalam menghubungkan relasi dengan kepala madrasah dan peserta didik.

Jejaring yang dibangun oleh kepala madrasah dengan pihak-pihak eksternal yang sangat beragam, seperti dengan masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, atau akademisi dari perguruan tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat dapat bekerja dengan maksimal dalam mendukung program pengembangan madrasah menuju standar nasional dengan mengidentifikasi relasi sosial dan hubungan-hubungan sosial yang dapat membentuk kerja sama dan dukungan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah mengetahui berbagai hubungan stakeholder, kepala madrasah dengan kepemimpinan dan otoritasnya dapat menggerakkan berbagai hubungan sosial ini untuk mendukung guru yang profesional dalam menjalankan proses pembelajaran yang berkualitas. Proses pembelajaran yang berkualitas selanjutnya akan mendorong partisipasi akademik maupun non akademik peserta didik yang menampilkan bentuk mutu lulusan. Lulusan-lulusan madrasah yang berkualitas akan berdampak bagi bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, dana, atau mengarahkan minat masyarakat untuk belajar ke madrasah.

## **B. Model Pendidikan Berbasis Masyarakat di Madrasah**

Dengan menggunakan perspektif jaringan sosial dan modal sosial di madrasah, tulisan ini mencoba memetakan pola-pola hubungan antar stakeholder yang merupakan modal sosial dalam mendukung madrasah mengembangkan mutu menuju madrasah bertsandar nasional. Hubungan stakeholder madrasah ini oleh Granoveter, sebagaimana djelaskan oleh George Ritzer dan

Douglas J. Goodman,<sup>82</sup> setiap aktor individu baik individu atau kolektivitas mempunyai akses yang berbeda terhadap sumber daya yang bernilai kekayaan, kekuasaan, atau informasi. Kekayaan bisa diartikan berbagai dukungan fisik, material, atau pendanaan yang mendukung keberlanjutan pengembangan mutu di madrasah. Pengembangan mutu di madrasah bukanlah suatu program yang bersifat temporer atau sesaat, tetapi diharapkan menjadi kesadaran dan strategi yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam menjamin masyarakat mendapatkan kebermanfaatannya dari penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Manfaat yang lebih jauh adalah kehadiran pendidikan berbasis masyarakat di madrasah dapat mendorong terjadinya transformasi masyarakat.

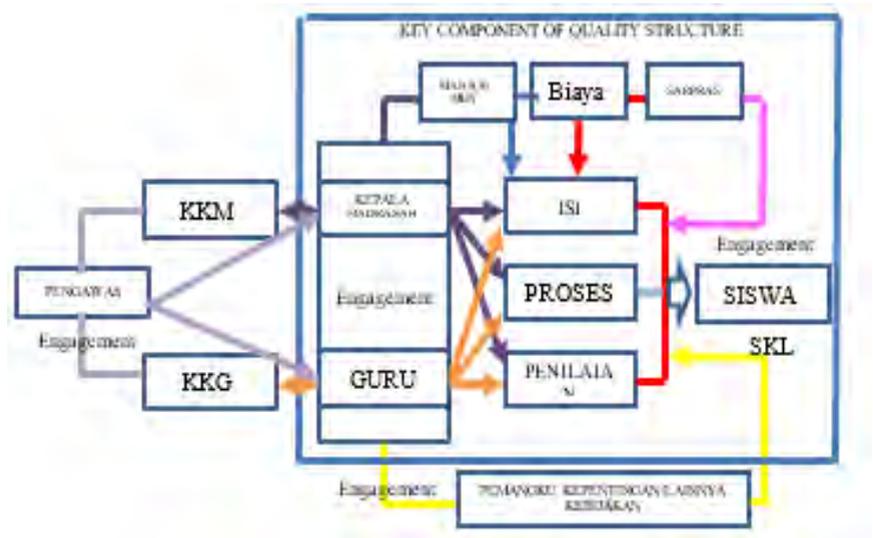
Hubungan stakeholder di madrasah dalam bentuk ikatan antar aktor yang bisa jadi terikat secara kuat atau lemah. Dalam sebuah kelompok yang ikatan kelompoknya kuat, sedangkan ikatan individu yang lemah akan merasa dirinya terisolir dan akan kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Bagi Granoveter, ikatan yang kuat bisa mencegah isolasi dan memungkinkan individu mengintegrasikan dengan lebih baik dengan kelompok. Ikatan yang kuat akan memotivasi lebih besar untuk saling membantu dan lebih cepat untuk saling memberikan bantuan.

Selanjutnya, dengan pendekatan modal sosial *best practice* yang dipaparkan pada bab sebelumnya dianalisis untuk melihat

---

<sup>82</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, Cetakan ke-3, 2005. H. 383

pola-pola hubungan yang membentuk model pendidikan berbasis masyarakat di madrasah untuk mendukung program pengembangan madrasah menuju standar nasional pendidikan. Berikut ini adalah diagram yang menjelaskan model partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu madrasah:



Gambar 2

Diagram Pola Hubungan Stakeholder dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat untuk Meningkatkan Mutu Madrasah menuju SNP

Dari gambar 2 tergambar ada dua kelompok stakeholder madrasah, yaitu stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal, meliputi guru, kepala madrasah, yayasan, komite madrasah, dan pengawas. Guru, kepala madrasah, dan pengawas stakeholder sebagai profess yang partisipasinya terkait dengan pendidikan berbasis masyarakat dalam bentuk

*Work Involvement* dan *Engagement*. Yayasan dan komite madrasah dipetakan dalam menunjang kinerja kepala madrasah dan guru. Sedangkan pengawas dipetakan sebagai *Work Involvement* dan *Engagement* yang bersinergi dalam peningkatan mutu madrasah melalui program supervisi madrasah.

Stakeholder eksternal meliputi instansi terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan sebagainya. Stakeholder eksternal ini memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendukung program pengembangan madrasah. Adapun peran stakeholder eksternal antara lain:

1. Pemerintah
  - a. Bantuan sarpras
  - b. Biaya Pendidikan
  - c. Pelatihan guru
  - d. Kebijakan pendidikan
  - e. dsb
2. Dunia Usaha
  - a. Pemikiran
  - b. Bantuan fisik
3. Masyarakat
  - a. Merelakan sebagian tanahnya untuk diwakafkan atau dijual dengan harga murah untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren.
  - b. Menjadi donatur tetap atau tidak tetap bagi pembiayaan madrasah.
  - c. Memberikan bahan-bahan material yang diperlukan ketika madrasah sedang ada kegiatan pembangunan.

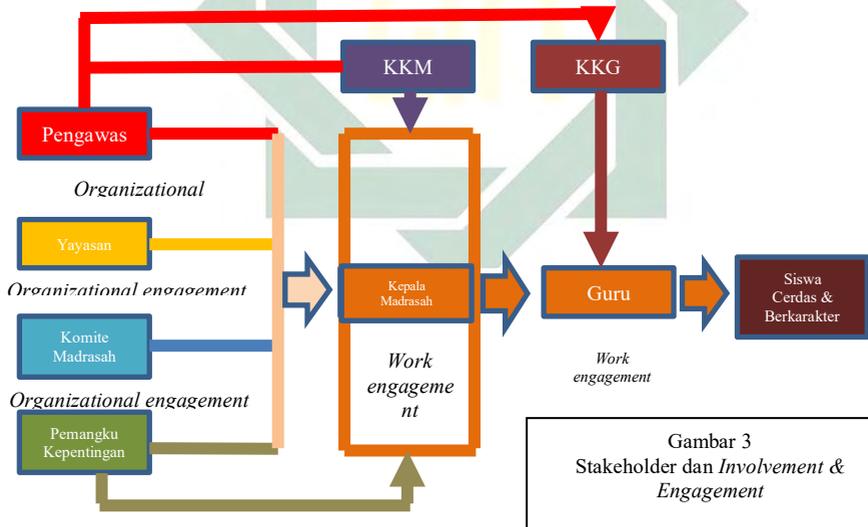
- d. Mewakafkan sebagian pohon/tanaman yang dimilikinya dengan cara menyerahkan hasilnya ketika berbuah/panen kepada madrasah.
  - e. Menyerahkan zakat atau sadaqah ke madrasah
  - f. Menyerahkan sumbangan sukarela ketika mendapatkan kelapangan rezki
4. Perguruan Tinggi
- a. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan bagi guru
  - b. Kerja sama magang mahasiswa ke madrasah
  - c. Kerja sama pendampingan madrasah
  - d. Dsb.

Menurut Galbahar *engagement stakeholder* madrasah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *work engagement* dan *non-work engagement*.<sup>83</sup> *Work engagement* guru dan kepala madrasah dalam mendukung tugasnya dapat dilakukan *capacity building* melalui pelatihan guru dan kepala madrasah serta mendorong pengembangan profesi guru dan kepala madrasah terutama melalui forum profesi guru dan kepala madrasah yang disebut dengan *professional learning community* atau komunitas belajar profesi. Forum profesi guru dikenal dengan KKG/MGMP sedangkan forum *professional learning community* dikenal dengan Keelompok Kerja Kepala Madrasah atau KKM. Sedangkan *engagement stakeholder* eksternal dan internal yang tidak terkait profesi disebut dengan *organizational engagement*. *Work engagement* yang merupakan partisipasi dari *professional pendidikan* di madrasah akan berdampak pada peningkatan kapasitas tenaga

---

<sup>83</sup> Bahadir Gulbahar, "The Relationship between Work Engagement and Organizational Trust: A Study of Elementary School Teachers in Turkey" dalam *Journal of Education and Training Studies*, vo. 5, No. 2, {ebruari 2017, h. 149.

professional seperti kepala madrasah dan guru dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan di madrasah, seperti pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif yang akan berdampak pada mutu lulusan madrasah. Partisipasi kepala madrasah akan berdampak pada kepemimpinan kepala madrasah, peningkatan kompetensi manajerial, supervisi, atau administrasi di madrasah yang memaksimalkan pengelolaan sumberdaya material dan sumber daya manusia untuk mendukung mutu pembelajaran dan mutu lulusan. Partisipasi stakeholder eksternal dapat mendukung peningkatan kapabilitas dan kualitas SDM serta peningkatan kapasitas madrasah dalam pengadaan sumber daya material yang mendukung program pengembangan madrasah menuju standar nasional pendidikan. Berikut ini akan digambarkan stakeholder madrasah dan jenis *engagement* nya:



Gambar 3  
Stakeholder dan *Involvement & Engagement*

Gulbahar mengelompokkan *engagement* stakeholder dalam lembaga Pendidikan menjadi 2, yaitu *work engagement* dan *organizational engagement*. *Engagement* adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja seorang pegawai, begitu juga dapat mempengaruhi lembaga atau organisasi. *Engagement* seseorang dapat dipengaruhi oleh pekerjaannya dan juga organisasinya.<sup>84</sup>

### **C. Hubungan Stakeholder Madrasah sebagai Modal Sosial dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Faktor kunci keberhasilan pendidikan berbasis masyarakat dalam program pengembangan madrasah adalah bagaimana mengoptimalkan hubungan stakeholder di madrasah sebagai modal sosial. Berikut ini adalah perspektif modal sosial dalam peningkatan Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam program pengembangan madrasah menuju standar nasional di madrasah:

1. Hibah sebagai pancingan dalam mendorong warga madrasah dalam berpartisipasi dan penguatan *engagement* dalam pengembangan madrasah menuju standar nasional pendidikan.
2. Memperkuat relasi-relasi antar warga sebagai modal sosial untuk meningkatkan partisipasi dan *engagement* stakeholder madrasah dalam program pengembangan pendidikan menuju standar nasional pendidikan.
3. Semua warga atau stakeholder madrasah diberi kesempatan sesuai peran masing-masing untuk berpartisipasi dalam pembangunan madrasah menuju standar nasional pendidikan

---

<sup>84</sup> Ibid.

4. Melakukan komunikasi secara intens dengan stakeholder madrasah agar partisipasi dan *engagement* tinggi. Komunikasi yang baik dan persuasive mendorong partisipasi stakeholder dengan kesadaran diri dan bukan karena paksaan. Kesadaran diri ini membuka hati para pemangku kepentingan sesuai dengan keahlian masing-masing.
5. Bentuk-bentuk partisipasi dan *engagement* pemangku kepentingan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dukungan yang mempengaruhi kinerja tenaga profesi, seperti guru dan kepala madrasah dan organisasi atau lembaga, dukungan sarana prasarana, dukungan pendanaan, atau tenaga dan pemikiran yang bisa dikonversi secara ekonomi.
6. Pengelolaan bantuan hibah secara swakelola menjadi daya tarik para stakeholder eksternal untuk berpartisipasi dalam pengembangan mutu madrasah. Dukungan masyarakat ini sangat berarti bagi pengembangan organisasional madrasah.

Modal sosial bekerja dengan maksimal didukung dua dimensi. Dua dimensi ini oleh Bain dan Hicks, dalam Syahra,<sup>85</sup> merupakan karnagka konseptual untuk mengukur keberadaan modal sosial. Pertama, dimensi kognitif yang berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas, dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dimensi ini di madrasah bisa dilihat dari nilai-nilai agama yang menjadi landasan tindakan individu untuk menyerahkan sebagian hartanya atau kekayaannya untuk kepentingan pembangunan madrasah.

---

<sup>85</sup> Rudi Syahra, "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi," dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003, h. 9.

Nilai-nilai profesionalitas yang mengikat tenaga profesional di madrasah untuk berpartisipasi dan melakukan *engagement* di forum *professional learning community* untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas dalam mendukung mutu pendidikan di madrasah. Setiap masyarakat memiliki dimensi kognitif yang juga disebut dimensi kultural, dalam kadar yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat memiliki kekayaan nilai-nilai budaya sebagai modal sosial yang memungkinkan terpeliharanya hubungan yang harmonis, baik semua warga masyarakat secara internal maupun dengan orang-orang dari kelompok eksternal. Kekayaan kultural di lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah berbeda dengan dimensi kognitif di lembaga pendidikan umum. Madrasah merupakan modal archaic pendidikan berbasis masyarakat karena didukung ajaran Islam yang menjadikan madrasah sangat dekat dengan masyarakat. Nilai-nilai Islam mampu mengatur keharmonisan dan solidaritas yang memungkinkan terciptanya kerja sama dan hubungan saling menguntungkan dengan warga madrasah eksternal yang disebut dengan *bridging social capital*.

Dimensi kedua berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga. Dimensi ini dikenal dengan dimensi struktural.

Dimensi struktural ini sangat penting karena berbagai upaya upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Dimensi struktural modal sosial yang secara umum adalah berupa jaringan hubungan dalam kelembagaan mendapat perhatian penting di dalam menelaah pentingnya modal sosial di masyarakat.

Dalam berbagai hubungan sosial, ditemukan nilai lebih yang bersumber pada rasa simpati yang disebut sebagai barang sosio-emosional (*socioemotional goods*).<sup>86</sup> Nilai tersebut terbentuk oleh perasaan atau emosi dari seseorang untuk menjadi partisipan di madrasah misalnya. Nilai terhadap sesuatu yang bersumber pada kondisi sosio-emosional itu dapat dikatakan sebagai nilai nominal yang tinggi rendahnya ditentukan oleh sikap pribadi. Pemberian nilai atau *value attachment* inilah yang merupakan faktor penentu modal sosial.<sup>87</sup> Rasa simpati ini yang menghadirkan perhatian sosial dari kelompok lain atau individu ke madrasah dalam mencapai tujuan program pengembangan mutu pendidikan. Sosio-emosional inilah dapat mendukung kemandirian madrasah dalam pendanaan sehingga tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah.

---

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Ibid.

## BAB VIII

### PENUTUP

Pembahasan pendidikan berbasis masyarakat di madrasah didasari dengan teori-teori sosiologi, seperti relasi sosial dan modal sosial yang diperkuat dengan teori *engagement* untuk menganalisis data best practices program pengembangan madrasah menuju standar nasional pendidikan di Jawa Timur. Berdasarkan refleksi teoritis berdasarkan data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Madrasah sebagai sistem sosial merupakan himpunan individu-individu yang terhubung bersama untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan sosial ini membentuk hubungan sosial antara sejumlah orang yang menempati kedudukan atau posisi tertentu. Adanya sistem sosial itu mengakibatkan adanya struktur jaringan dalam organisasi sosial di madrasah. Jaringan antar stakeholder madrasah membentuk hubungan yang digambarkan seperti lingkaran. Inti dari hubungan stakeholder adalah siswa. Hubungan antara siswa dengan stakeholder lainnya dihubungkan oleh peran guru sebagai ujung tombak pendidikan yang melakukan transfer pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang merupakan isi mutu lulusan. Peran guru akan dihubungkan dengan oleh prang kepala madrasah sebagai motor penggerak organisasi di madrasah. Kepala madrasah menjadi mediasi hubungan antara guru dan siswa dengan yayasan, komite madrasah, pengawas, Kementerian Agama, Dunia Usaha, masyarakat lainnya, dan perguruan tinggi. Hubungan-hubungan antar stakeholder yang menghasilkan

- kerja sama dan partisipasi seluruh stakeholder sesuai dengan peran dan fungsinya.
2. Pola-Pola hubungan stakeholder madrasah dalam pengembangan pendidikan menuju standar nasional pendidikan dengan analisis teori *engagement* menemukan model partisipasi dan *engagement* dalam Pendidikan Berbasis Madrasah. Model ini dibangun atas jaringan stakeholder internal dan eksternal serta indikator kunci mutu pendidikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. *Engagement* stakeholder madrasah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *work engagement* dan *organizational engagement*. *Work engagement* meliputi partisipasi guru dan kepala madrasah, serta pengawas dalam mendukung tugas mereka. Jaringan *work engagement* merupakan partisipasi tenaga profesional dalam pengembangan profesi guru dan kepala madrasah terutama melalui forum profesi guru dan kepala madrasah yang disebut dengan professional learning community atau komunitas belajar profesi. Sedangkan *engagement* stakeholder eksternal dan internal yang tidak terkait profesi disebut dengan *organizational engagement* yang mampu mempengaruhi lembaga atau organisasi.
  3. Jaringan dan hubungan antar stakeholder madrasah merupakan modal sosial yang menjadi faktor kunci keberhasilan pendidikan berbasis masyarakat dalam program pengembangan madrasah menuju standar nasional pendidikan. Modal sosial bekerja di bawah prinsip relasi sosial yang mengutamakan ikatan antar sesama individu. Modal sosial diakibatkan terjadinya jejaring, stabilitas sosial, integrasi, kepercayaan, solidaritas, dan toleransi. Faktor-faktor inilah yang berimplikasi maksimal pada pembangunan madrasah

sesuai dengan idealitas-ideologik. Jaringan sosial menjadi asset yang sangat bernilai. Kohesi sosial akan terbentuk dengan adanya jaringan sosial yang berlanjut dengan kerja sama untuk memperoleh manfaat timbal balik. selanjutnya modal sosial berperan dalam membangun kesuksesan.. Kunci keberhasilan dalam komunitas.

Temuan penelitian ini seperti yang tertuang dalam tiga kesimpulan di atas merupakan refleksi ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam melakukan kajian ilmiah tentang pendidikan berbasis masyarakat. Model pendidikan berbasis masyarakat semoga bisa menjadi perspektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan yang membutuhkan dukungan fisik maupun non fisik. Temuan model pendidikan berbasis masyarakat ini adalah telaah kritis terhadap *best practices* dalam pengembangan madrasah menuju standar nasional. Harapannya, temuan ini akan berimplikasi praktis bagi pelaku pendidikan untuk pengembangan pendidikan yang lebih berkualitas. Tulisan ini belum sempurna dan masih terbuka peluang untuk melakukan pengujian-pengujian lanjut. Dengan pengujian lanjut, akan ditemukan hal-hal baru yang melengkapi hasil riset sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arman, Syamsul Bachri Thalib, dan Darman Mandar, *–The Effect of School Supervisors Competence School Principals Competence on Work Motivation and performance of Junior High School Teachers in Maros Regency Indonesia*” dalam *International Journal of Enviromental and Science Edcation*, 2016, vol. 11, No. 15.
- Asrohah Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum santri: Wajah Baru Pendidikan Islami*, (Bandung: Mizan, 2009).
- Azra, Azyumardi, 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas.
- Azra, *Paradigma Baru Pendidikan.*,
- Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas, 2002).
- Ballantine, *The Sociology.*,
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Cetakan kedua (Jakarta: Kencana, 2012).
- Danny Meirawan, *–Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan Secara Nasional dalam Otonomi Pendidikan*” dalam *Educationist*, Vol. IV No. 2 Juli 2010.
- Dionne Rosser-Mims dan James Maloney, *"The Historical and Contemporary, Relevance of the Interconnectivity of Community, Community-Based Education, and Transformative Education,"* dalam *International Journal of Adult Vocational Education and Technology*, Volume 8 •Issue 1 • January-March 2017.

- Duhou, Ibtisam Abu-, 2002. *Manajemen Berbasis Madrasah*, Jakarta: Logos,.
- Ellen Behrstock-Sherratt, Kietha Biggers, dan Jenni Fetters, *Policy-to- Practice Brief, Lesson Learned on Communication and Engagement for Educator Evaluation: Colorado Case Study* (National Comprehensive Center for Teacher Quality, 2012).
- Elly M. Seetiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala dan Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada, Cetakan I, 2011.
- Gaoming Zheng , Yuzhuo Cai & Shaozhuang Ma2017. *Towards an analytical framework for understanding the development of a quality assurance system in an international joint programme. European Journal of Higher Education*, 7(3), 243–260.doi:10.1080/21568235.2017.1290877 ).
- George Makdisi, –Muslim Institution of Learning in Eleventh-Century Baghdad” dalam George Makdisi (Ed.), *Religion, Law, and Learning in Classical Islam*, Britain: Variorum, 1991.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman , *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, Cetakan ke-3, 2005.
- Ginanjar Kartasamita, "Memperkuat Modal Sosial dalam Menghadapi Bencana." Makalah disampaikan dalam Disnatis Universitas Paramadina ke-19 Jakarta, 10 Januari 2017.

- Gulbahar Bahadir, *–The Relationship between Work Engagement and Organizational Trust: A Study of Elementary School Teachers in Turkey*” dalam *Journal of Education and Training Studies*, vo. 5, No. 2, Pebruari 2017.
- H.A.R Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Ibn Khaldun (1978), *The Muqaddimah: An Introduction to History*, diterjemahkan oleh Franz Rosental. New York: Bollingen Foundation.
- Ismanto Bambang, "Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Provinsi Jawa Tengah", Volume 5 Nomor 1, Mei 2018).
- Jack Demaine, *Education Policy and the Contemporary Politics*. Britain: Palgrave Macmillan, 1999).
- Jaja Jahari, "Pengukuran Kinerja Mutu Sekolah Berbasis *Balanced Scorecard (BSC)*" *Jurnal Administrasi Pendidikan* Vol.XXV No.1 April 2018.
- Jean Madsen, *Educational Reform at the State level: The Politics and Problems of Implementation*, (London: The Falmer Press, 1994).
- Jeanne H. Ballantine, *The Sociology of Education*, New jersey: Prentice, 1983,.
- John Creswell, *Riset Penelitian: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif* (Pustaka Pelajar: 2015) Cetakan kelima.
- Kartasasmita "Memperkuat Modal Sosial...."  
-----, "Modal Sosial...".

- Leigh Anne Howard, " *Performance, Pedagogy, Potential: Utopian Performance as Community-Based Education*," dalam *Michigan Journal of Community Service Learning*, 2019.
- Les Bell dan Howard Stevanson, *Education Policy: Process, Themes, and Impact*, (New York:Routledge, 2006).
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Maria Vlachadi dan Maria Ferla, "Differentiation of Teachers' and Principals' Engagements in Distributed Leadership according to Their Demographic Characteristic" dalam *Journal of Education and Learning*, Vol. 4, No. 2, 2013,.
- Moedjiarto, 2002. *Madrasah Unggul: Metodologi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Duta Graha Pustaka,.
- Mukhamad Iksan, *Belajar dari, oleh, dan untuk Madrasah: Catatan Reflektif dalam Memperkuat Kapasitas dan Mutu Pendidikan*. (Semarang: Fatawa, 2014).
- Mulyasa, *Menjadi Kepala Madrasah Profesional*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Paul B.Horton dan Chester L. Hunt, *Sociology*, Tokyo: Mc Graw-Hill, cet. III, 1972.
- Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Robbert M. Klassen dkk., "Measuring Teacher Engagement: Development of the Engaged Teacher Scale (ETS)" dalam *Frontline Learning Research: an Official Journal of EARLI*, 2 (2013).
- Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi*,.

- Rudi Syahra, "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi" ...
- Rudi Syahra, *"Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi,"* dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003.
- Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar,*.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan(Perspektif Teori dan Praktik).* Yogyakarta; UNY Press, 2014.
- Supriyoko, *–Refleksi Hardiknas 2 Mei: Menggugat Komitmen Pemerintah”* (Mei 02, 2003) <http://www.jawapos.co.id>
- Suryadi, Ace, *–Menuju Otonomi Pendidikan”* (Desember 30, 2002) <http://www.republika.co.id>
- Syahra, *"Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi"...*
- Syalabi Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, terjemahan oleh Mughtar Jahja dan Sanusi Latief, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Thomas H. Elliot, *–Foward an Understanding of Public School Politics”* dalam *American Political science Review*, vol. 53, No. 4 Desember,.
- Tilaar, H.A.R., 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka,.
- , 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka, h. 77. Azra, Azyumardi, 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas.
- Tim Project Grantmakers for Education and Collective Invention, *Toolkit for Teacher Engagement*
- W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Media Abadi, 2004,.

Waluyo Iman Isworo, –Beberapa Pendekatan Dalam Analisis dan Implementasi Kebijakan Publik,” dalam Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti (Penyunting), *Teori-Teori Politik Dewasa Ini*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pres, Cet. I, 1996),.

Waluyo Iman Isworo, –*Beberapa Pendekatan Dalam Analisis dan Implementasi Kebijakan Publik,*”.

Zainie Abdullah, –Dilema Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” dalam Syamsuddin Haris (Edt.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005).

